



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan daerah, perlu disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan, untuk itu perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016–2026.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat Kesejahteraan Rakyat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah Rencana Kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana aksi tahunan adalah rencana kerja Pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perjalanan daerah untuk periode 1 tahun.
14. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas

pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur .

15. Kriteria penerima adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
16. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses kegiatan pemantauan pengawasan, evaluasi dan penilaian secara sistematis terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program setiap tahunnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan dan melakukan perbaikan suatu kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk merumuskan Rencana Penanggulangan Kemiskinan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun (2021 – 2026) kedalam Rencana Aksi Tahunan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai :

- a. Pedoman dalam menyusun rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan yang dimuat dalam dokumen RPJMD.
- b. Pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) terkait penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dengan penanggulangan kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi kebijakan berupa strategi dan program dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

Pasal 5

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan :

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. Sinergi Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin ;
- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan mikro, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan ; dan

- c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dari dana desa/ dana kelurahan.

Pasal 7

Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan data berbasis Nama, Alamat, dan Nomor Induk Kependudukan sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial.

Pasal 8

RPKD Kabupaten Kotawaringin Timur disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 9

- (1) RPKD Tahun 2021 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematisa Penyusunan RPKD Tahun 2021 –2026 disusun dengan sistematisa sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II KONDISI UMUM DAERAH
 - BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH
 - BAB IV PRIORITAS PROGRAM
 - BAB V LOKASI PRIORITAS
 - BAB VI. PENUTUP

Pasal 10

RPKD Kabupaten memuat :

- a. Kondisi Umum Daerah ;
- b. Profil Kemiskinan Daerah ;
- c. Prioritas Program ;
- d. Lokasi Prioritas ; dan
- e. Rencana Kerja untuk 5 tahun

Pasal 11

Dokumen RPKD menjadi bagian dari dokumen RPJMD.

Pasal 12

- (1) RPKD yang disusun memuat Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penjabaran dari RPKD akan disusun Rencana Aksi Tahunan.
- (3) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. Kebijakan dan strategi tahun berjalan ;
 - c. Matriks target keberhasilan; dan
 - d. Lokasi prioritas.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melalui TKPK Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

- (2) RPKD dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian terhadap dokumen RPKD.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam rentang waktu 2021-2026 ini, dapat dilakukan perubahan apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR
11....

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD)



KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha Esa karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 ini disusun dalam rangka memetakan program-program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya afirmatif yang sudah dijalankan selama ini dengan cara menyediakan data dan informasi mengenai kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk lima tahun yang akan datang secara akurat agar masyarakat dapat memahami “Masalah utama” Kemiskinan.

Semua program penanggulangan kemiskinan yang terdapat didalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan upaya nyata pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkerja keras untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Bagaimanapun, peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan hasil dan kemajuan berbagai program pembangunan diseluruh perangkat daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dokumen ini diharapkan dapat menggambarkan gambaran rinci program penanggungan kemiskinan yang telah , sedang dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain profil program penanggulangan kemiskinan, juga ditampilkan capaian keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sampai tahun 2020, sehingga masyarakat memperoleh data kuantatif yang akurat.

Akhirnya, semoga dokumen rencana penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 bermanfaat didalam percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan dokumen ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa dalam upaya kita mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Mandiri, Maju dan Sejahtera.

Sampit,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

H. HALIKINNOR, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	4
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT RPKD	5
1.4 ARAH KEBIJAKAN	6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	6
 BAB II KONDISI UMUM DAERAH	 8
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	8
2.1.1 Aspek Geografi	8
2.1.2 Aspek Demografi	31
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	35
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi	35
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	45
2.2.3. Fokus Kebudayaan.....	53
2.2.4 Fokus Kepemudaan dan Olah Raga.....	54
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	55
2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib	55
2.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan	81
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	85
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	85
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi	93
 BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH.....	 111
3.1 PERKEMBANGAN KONDISI KEMISKINAN DAERAH	111
3.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0) dan Jumlah Penduduk Miskin	111
3.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	116
3.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	121
3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	123
3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi	126
3.1.6 Tingkat Inflasi	128
3.1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK)	130
3.1.8 Angka Partisipasi Murni (APM).....	135
3.1.9 Angka Kematian Bayi (AKB).....	139
3.1.10 Angka Kematian Balita (AKBa)	141
3.1.11 Angka Kematian Ibu (AKI).....	142
3.2 DETERMINANSI KEMISKINAN DAERAH	144
3.2.1 Pembangunan Manusia	146
3.2.2 Ketimpangan Pengeluaran	149
3.2.3 Gender.....	150
3.2.4 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Miskin	153

BAB IV PRIORITAS PROGRAM.....	156
4.1 PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU	159
4.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL	162
4.3 PROGRAM LAINNYA.....	166
BAB V LOKASI PRIORITAS.....	155
5.1 LOKASI PRIORITAS BIDANG KESEHATAN	170
5.2 LOKASI PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN	171
BAB VI PENUTUP	156

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Administratif Kecamatan Serta Desa/Kelurahan.....	8
Tabel 2.2 Profil Klimatologi Kabupaten Kotawaringin Timur	16
Tabel 2.3 Jumlah IUP Ekplokasi dan Produksi di Kabupaten Kotawaringin Timur.....	18
Tabel 2.4 Profil Sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur	20
Tabel 2.5 Peramalan Air Pasang Tertinggi, Air Surut Terendah dan Tunggang Maksimum Pasang Surut di Perairan Pantai Kalimantan Tengah	21
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur.....	29
Tabel 2.7 Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	31
Tabel 2.8 Pertumbuhan Penduduk Hingga Tahun 2020	32
Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	32
Tabel 2.10 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	33
Tabel 2.11 Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	34
Tabel 2.12 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan, Atas Dasar Harga Berlaku, dan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016- 2020	35
Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016- 2020	36
Tabel 2.15 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020.....	37
Tabel 2.16 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020.....	38
Tabel 2.17 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020	39
Tabel 2.18 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020.....	40
Tabel 2.19 Indeks Harga Konsumen, Laju Inflasi, dan Inflasi Kota Sampit Tahun 2020	42
Tabel 2.20 Laju Inflasi Kota Sampit menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020.....	42
Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten-Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	43
Tabel 2.22 Jumlah BBLR di Kabupaten Kotawaringin Timur	44
Tabel 2.23 Status Kesejahteraan Keluarga Dan Individu	44
Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 -2020	46
Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur 2011- 2020	46
Tabel 2.26 Koefisien Gini Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2021	46
Tabel 2.27 Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur	47
Tabel 2.28 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020	49
Tabel 2.29 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020.....	49
Tabel 2.30 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020	50
Tabel 2.31 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020.....	51
Tabel 2.32 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020	52

Tabel 2.33 Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	52
Tabel 2.34 Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	53
Tabel 2.35 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kebudayaan 2016-2020	53
Tabel 2.36 Fasilitas Olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	54
Tabel 2.37 Indikator Capaian Urusan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020	55
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	57
Tabel 2.39 Jumlah Satuan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020	59
Tabel 2.40 Jumlah Satuan SD di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020	59
Tabel 2.41 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dengan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.42 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dengan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.43 Jumlah Satuan SMP di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020	61
Tabel 2.44 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016-2020	61
Tabel 2.45 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.46 Jumlah Satuan SMA di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020	62
Tabel 2.47 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Atas dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.48 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Atas dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas Tahun 2016-2020	63
Tabel 2.49 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	63
Tabel 2.50 Perkembangan Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020	63
Tabel 2.51 Perkembangan Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020	64
Tabel 2.52 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur	65
Tabel 2.53 Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Timur	65
Tabel 2.54 Jumlah BBLR di Kabupaten Kotawaringin Timur	66
Tabel 2.55 Indikator Capaian Urusan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	66
Tabel 2.56 Data Jaringan Jalan (Kilometer) di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	69
Tabel 2.57 Indikator Capaian Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	70
Tabel 2.58 Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019	71
Tabel 2.59 Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	71
Tabel 2.60 Indikator Capaian Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	72
Tabel 2.61 Indikator Capaian Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	72

Tabel 2.62 Indikator Capaian Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 2.63 Indikator Capaian Urusan Perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020.....	73
Tabel 2.64 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	74
Tabel 2.65 Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	74
Tabel 2.66 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	75
Tabel 2.67 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	76
Tabel 2.68 Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	76
Tabel 2.69 Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	77
Tabel 2.70 Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	77
Tabel 2.71 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	77
Tabel 2.72 Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	78
Tabel 2.73 Kinerja Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	78
Tabel 2.74 Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	79
Tabel 2.75 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	79
Tabel 2.76 Kinerja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	80
Tabel 2.77 Kinerja Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	80
Tabel 2.78 Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	80
Tabel 2.79 Kinerja Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	81
Tabel 2.80 Kinerja Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	81
Tabel 2.81 Kinerja Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	81
Tabel 2.82 Kinerja Pertanian Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	82
Tabel 2.83 Kinerja Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	82
Tabel 2.84 Kinerja Pertanian Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	82
Tabel 2.85 Kinerja Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	83
Tabel 2.86 Kinerja Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	83
Tabel 2.87 Kinerja ESDM Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	83
Tabel 2.88 Kinerja Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	83

Tabel 2.89 Kinerja Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	84
Tabel 2.90 Kinerja Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	84
Tabel 2.91 Kinerja Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020.....	85
Tabel 2.92 PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Pengeluaran (Miliar Rupiah) Periode 2015-2019.....	87
Tabel 2.93 PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Pengeluaran (Persentase) Periode 2015-2019	88
Tabel 2.94 PDRB Persentase laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Komponen Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2019.....	88
Tabel 2.95 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2015-2019.....	88
Tabel 2.96 Perkembangan Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB).....	89
Tabel 2.97 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB).....	89
Tabel 2.98 Pertumbuhan dan Persentase Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019.....	90
Tabel 2.99 Pertumbuhan dan Persentase Perubahan Inventori Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019	91
Tabel 2.100 Pertumbuhan dan Persentase Ekspor Netto Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019.....	92
Tabel 2.101 Pertumbuhan dan Persentase ICOR Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019.....	92
Tabel 2.102 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018-2020.....	93
Tabel 2.103 Waktu Proses Perijinan, di DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur	94
Tabel 2.104 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020.....	95
Tabel 2.105 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020.....	97
Tabel 2.106 Analisis Pertumbuhan PAD 4 Tahun Sebelumnya	98
Tabel 2.107 Analisis Pertumbuhan Dana Perimbangan 4 Tahun Sebelumnya	98
Tabel 2.108 Analisis Pertumbuhan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 4 Tahun Sebelumnya	99
Tabel 2.109 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020.....	100
Tabel 2.110 Desa Unggulan dan Sektor/ Produk Unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur	114
Tabel 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	113
Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	115
Tabel 3.3 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	118
Tabel 3.4 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	120
Tabel 3.5 Perkembangan TPAK Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	123
Tabel 3.6 Perkembangan TPT Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.....	125
Tabel 3.7 Komponen IPM Perempuan dan Laki-laki Kab. Kotim Tahun 2010-2020	152

Tabel 3.8 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja (Persen).....	154
Tabel 3.9 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Terakhir (Persen)	154
Tabel 4.1 Prioritas Program Bantuan Sosial Dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, Atau Individu.....	160
Tabel 3.8 Prioritas Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil	163
Tabel 3.9 Prioritas Program Lainnya.....	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Kotawaringin Timur	10
Gambar 2.2 Peta Administratif Kabupaten Kotawaringin Timur	11
Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur.....	13
Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Timur.....	19
Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur	22
Gambar 2.6 Peta Bathimetri Kabupaten Kotawaringin Timur.....	23
Gambar 2.7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Timur	28
Gambar 2.8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Timur.....	30
Gambar 2.9 Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	34
Gambar 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020	36
Gambar 2.11 Distribusi Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020	40
Gambar 2.12 Perkembangan PDRB dan PDRB per Kapita 2015-2020	41
Gambar 2.13 IHK, Laju Inflasi MoM dan Inflasi YoY tahun 2020.....	43
Gambar 2.14 Dinamika Melek Huruf Usia 15+ Kabupaten Kotawaringin Timur	47
Gambar 2.15 Dinamika Umur Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	48
Gambar 2.16 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013- 2020	50
Gambar 2.17 Perkembangan APM dan APK Kabupaten Kotawaringin Timur	58
Gambar 2.18 Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019	86
Gambar 2.19 Kontribusi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam PDRB Provinsi Kalteng Atas Dasar Harga Berlaku 2016-2019	87
Gambar 2.20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur 2016- 2020	87
Gambar 2.21 Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan LNPRT Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2019	90
Gambar 2.22 Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2019	91
Gambar 3.1 Relevansi Tren Tingkat Kemiskinan Kab. Kotim Tahun 2016-2020	112
Gambar 3.2 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kab. Kotim Tahun 2020.....	113
Gambar 3.3 Relevansi Tren Jumlah Penduduk Miskin (dalam jiwa) Kab. Kotim Tahun 2016-2020.....	114
Gambar 3.4 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (dalam jiwa) Kab. Kotim Tahun 2020	115
Gambar 3.5 Relevansi Tren Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Kotim Tahun 2016-2020	116
Gambar 3.6 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Kotim Tahun 2020	117
Gambar 3.7 Relevansi Tren Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Kotim Tahun 2016-2020	119
Gambar 3.8 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Kotim Tahun 2020	120
Gambar 3.9 Relevansi Tren TPAK Kab. Kotim Tahun 2016-2020.....	122
Gambar 3.10 Posisi Relatif TPAK Kab. Kotim Tahun 2020.....	123
Gambar 3.11 Relevansi Tren TPT Kab. Kotim Tahun 2016-2020	124
Gambar 3.12 Posisi Relatif TPT Kab. Kotim Tahun 2020	125
Gambar 3.13 Relevansi Tren Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kotim Tahun 2016-2020 ...	126
Gambar 3.14 Relevansi TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kotim Tahun 2016- 2020	127

Gambar 3.15 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kotim Tahun 2020	128
Gambar 3.16 Relevansi Tren Tingkat Inflasi Kab. Kotim Tahun 2016-2020	129
Gambar 3.17 Relevansi Tingkat Inflasi dan P1 Kab. Kotim Tahun 2016-2020	129
Gambar 3.18 Relevansi Tingkat Inflasi dan P2 Kab. Kotim Tahun 2016-2020	130
Gambar 3.19 Relevansi Tren APK SD Kab. Kotim Tahun 2016-2020	131
Gambar 3.20 Posisi Relatif APK SD Kab. Kotim Tahun 2020	132
Gambar 3.21 Relevansi Tren APK SMP Kab. Kotim Tahun 2016-2020	132
Gambar 3.22 Posisi Relatif APK SMP Kab. Kotim Tahun 2020	133
Gambar 3.23 Relevansi Tren APK SMA Kab. Kotim Tahun 2016-2020	134
Gambar 3.24 Posisi Relatif APK SMA Kab. Kotim Tahun 2020	134
Gambar 3.25 Relevansi Tren APM SD Kab. Kotim Tahun 2016-2020	135
Gambar 3.26 Posisi Relatif APM SD Kab. Kotim Tahun 2020	136
Gambar 3.27 Relevansi Tren APM SMP Kab. Kotim Tahun 2016-2020	137
Gambar 3.28 Posisi Relatif APM SMP Kab. Kotim Tahun 2020	137
Gambar 3.29 Relevansi Tren APM SMA Kab. Kotim Tahun 2016-2020	138
Gambar 3.30 Posisi Relatif APM SMA Kab. Kotim Tahun 2020	139
Gambar 3.31 Relevansi Tren AKB Kab. Kotim Tahun 2016-2020	140
Gambar 3.32 Posisi Relatif AKB Kab. Kotim Tahun 2020	141
Gambar 3.33 Tren AKBa Kab. Kotim Tahun 2016-2020	142
Gambar 3.34 Posisi Relatif AKBa Kab. Kotim Tahun 2020	142
Gambar 3.35 Relevansi Tren AKI Kab. Kotim Tahun 2016-2020	143
Gambar 3.36 Posisi Relatif AKI Kab. Kotim Tahun 2020	144
Gambar 3.37 Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)	145
Gambar 3.38 Ringkasan Capaian Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kotim 2021-2026	146
Gambar 3.39 Efektivitas IPM terhadap Tingkat Kemiskinan Kab. Kotim Tahun 2016-2020	148
Gambar 3.40 Relevansi Tren Komponen IPM terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2020	149
Gambar 3.41 Relevansi Tren Rasio Gini Kab. Kotim Tahun 2016-2020	150
Gambar 3.42 Relevansi Tren IPG Kab. Kotim Tahun 2016-2020	152
Gambar 5.1 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan AKI dan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020	170
Gambar 5.2 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Prevalensi Stunting dan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020	171
Gambar 5.3 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan APM dan DTKS Tahun 2020	172

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di Indonesia, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan selalu menyertakan upaya pengentasan kemiskinan di dalamnya. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal pandemi covid-19 bulan Maret 2020 penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 132,94 ribu orang atau menurun sebanyak 1,65 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang mencapai 134,59 ribu orang (4,98 %). Ditambahkan pula Persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan Maret 2019 sebesar 4,98 persen turun menjadi 4,82 persen atau 016 persen pada Maret 2020. hal ini pastinya akan terus bertambah hingga bulan oktober 2020 untuk itu ,Pemerintah Daerah perlu segera mencari solusi atau jalan keluar untuk menurunkan kasus kemiskinan di Kalteng.

Dimasa sekarang yang menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana dapat membangkitkan perekonomian nasional yang sempat terpuruk akibat pandemi, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi covid 19 ini masih ada ditengah-tengah kita, sehingga jangan sampai segala aktivitas perekonomian dalam upaya perbaikan ekonomi malah membuat lonjakan kasus positif covid 19 dan menyebabkan lebih banyak membawa dampak.

Ada beberapa bantuan yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi, yakni program Kartu Prakerja, Penyaluran Sembako, BLT, Listrik Gratis hingga subsidi gaji karyawan.

Ditengah masa bertahan hidup selama pandemi ini, diperlukan sinergi yang baik antar berbagai pihak . Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan yang disediakan pemerintah dengan sebaik mungkin serta dapat mengembangkan potensi berwirausaha dan pengembangan diri selama masa pandemi.

Pemerintah dalam hal ini, diharapkan untuk dapat membaca peluang yang ada, sehingga dapat menjaga atau bahkan meningkatkan daya beli masyarakat selama pandemi. Selain itu, terjaminnya kebutuhan sembako atau bahan pokok bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah menjadi salah satu hal yang sangat penting dan mendasar untuk dilakukan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat. Upaya menyeluruh hingga ketingkat daerah perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi dan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatur mekanisme kerja TKPK daerah sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota.

TKPK kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program secara periodik, pengendalian penanganan pengaduan masyarakat dan penyiapan laporan pelaksanaan dan capaian program kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini sedang menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021 – 2026, didalam dokumen tersebut terdapat Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG
MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”**

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

Selanjutnya dari beberapa isu strategis yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai penjabaran misi yang ditetapkan, salah satu nya adalah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran dengan prioritas dan program pembangunan adalah Penguatan Ekonomi masyarakat, yang nantinya akan dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh stakeholder terkait penanggulangan kemiskinan.

Selaras apa yang menjadi prioritas Nasional untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif sekaligus sebagai tindak lanjut dari strategi tingkat nasional, maka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan dengan pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat secara berkeadilan tanpa perbedaan yang diupayakan melalui kebijakan strategi dan program.

Strategi dan Program merupakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Agar strategi dan program Penanganan kemiskinan dapat berjalan tepat sasaran, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan suatu dokumen yang berisi kebijakan berupa strategi dan program penanggulangan kemiskinan didaerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal. RPKD mempunyai kedudukan yang strategis karena merupakan penjabaran rumusan kebijakan pemerintah daerah yang melibatkan seluruh stakeholder terkait termasuk peran masyarakat miskinnya.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor, 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; sebagaimana telah diubah dengan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2)

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten kotawaringin Timur Tahun 2020 nomor 6);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT RPKD

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026 ini dimaksudkan sebagai landasan kebijakan daerah dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini adalah :

- a. Mensinergikan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten kotawaringin Timur bersama para *stakeholders*.
- b. Pengintegrasian dokumen perencanaan dan anggaran daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. Menetapkan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur secara bertahap, berkelanjutan, komprehensif, dan sinergi.

Sedangkan manfaat disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 ini adalah :

- a. Terbentuknya komitmen pemangku kepentingan pembangunan dalam mendukung pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyusun kebijakan yang mendukung Pro-Pertumbuhan (*pro-growth*), Pro-Lapangan Kerja (*pro-job*), dan Pro-Masyarakat Miskin (*pro-poor*).
- c. Acuan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kotawaringin Timur dan bagi semua pihak yang terlibat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

- d. Terbentuknya sinergisitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.4 ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2021 – 2026 yang disusun meliputi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan dilakukan melalui strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
4. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kemudian program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud terdiri dari:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan RPKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, Tujuan dan Manfaat RPKD , Arah Kebijakan dan Sistematika Penyusunan RPKD.

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Bab ini menyajikan data dan Profil Kondisi Kemiskinan Daerah beserta factor yang mempengaruhinya.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

Bab ini memuat prioritas program dalam penanggulangan kemiskinan untuk 5 (lima) tahunan

BAB V LOKASI PRIORITAS

Bab ini memuat lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan untuk 5 (lima) tahunan

BAB VI PENUTUP

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan satu dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di antara 112° 4' 3"-113° 16' 11" Bujur Timur dan 1° 11' 35"-3° 18' 8" Lintang Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 1.679.600 Ha. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah luas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Sedangkan luas wilayah fungsi berdasarkan perencanaan pemanfaatan ruang seluas kurang lebih 1.554.584,6 Ha. Adapun batas-batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Katingan;
- Sebelah Timur : Kabupaten Katingan;
- Sebelah Selatan : Laut Jawa;
- Sebelah Barat : Kabupaten Seruyan.

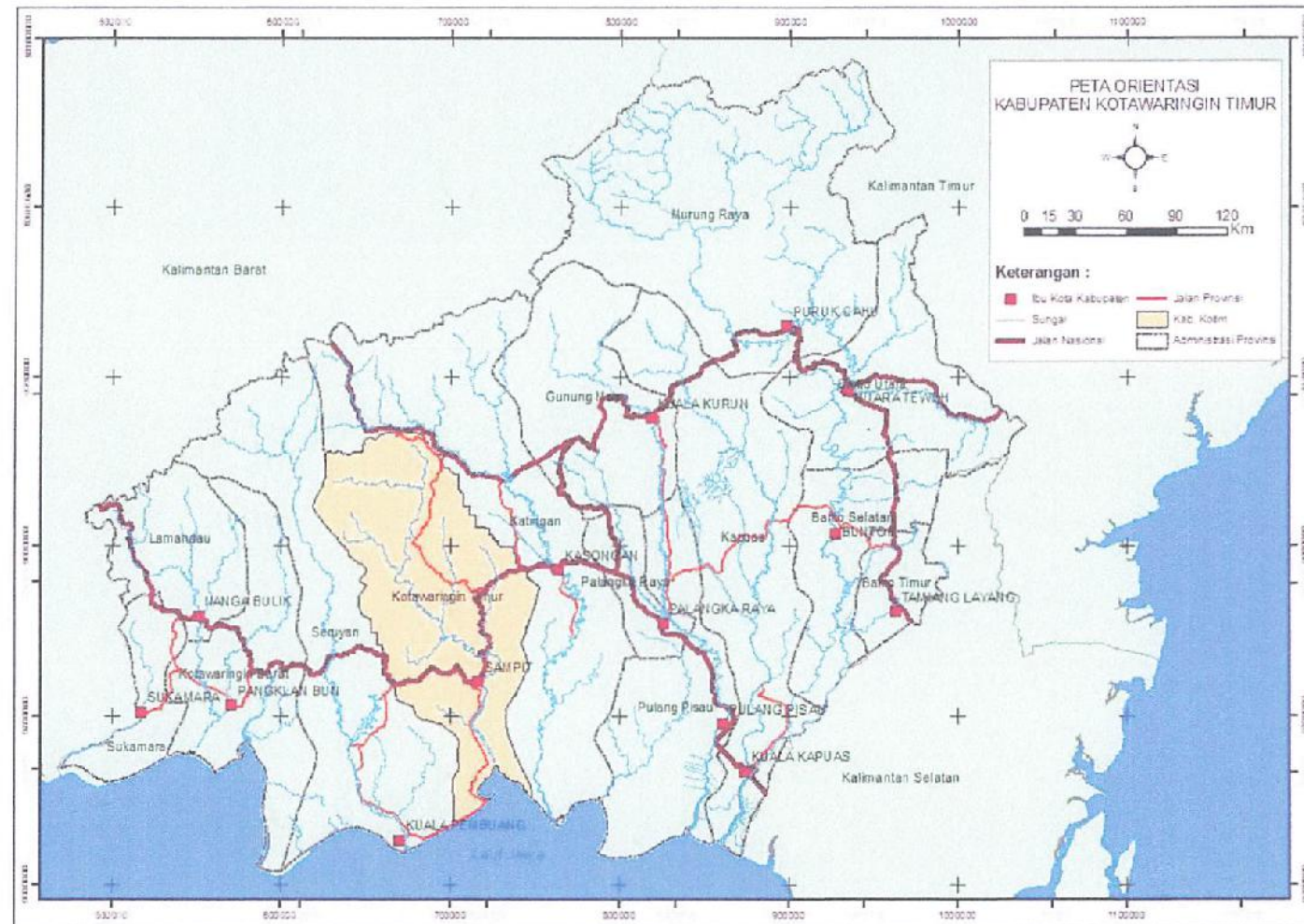
Orientasi Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap kabupaten/kota disekitarnya dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1. Wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.2. Sejak tahun 2011 Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi atas 17 kecamatan. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Administratif Kecamatan Serta Desa/Kelurahan

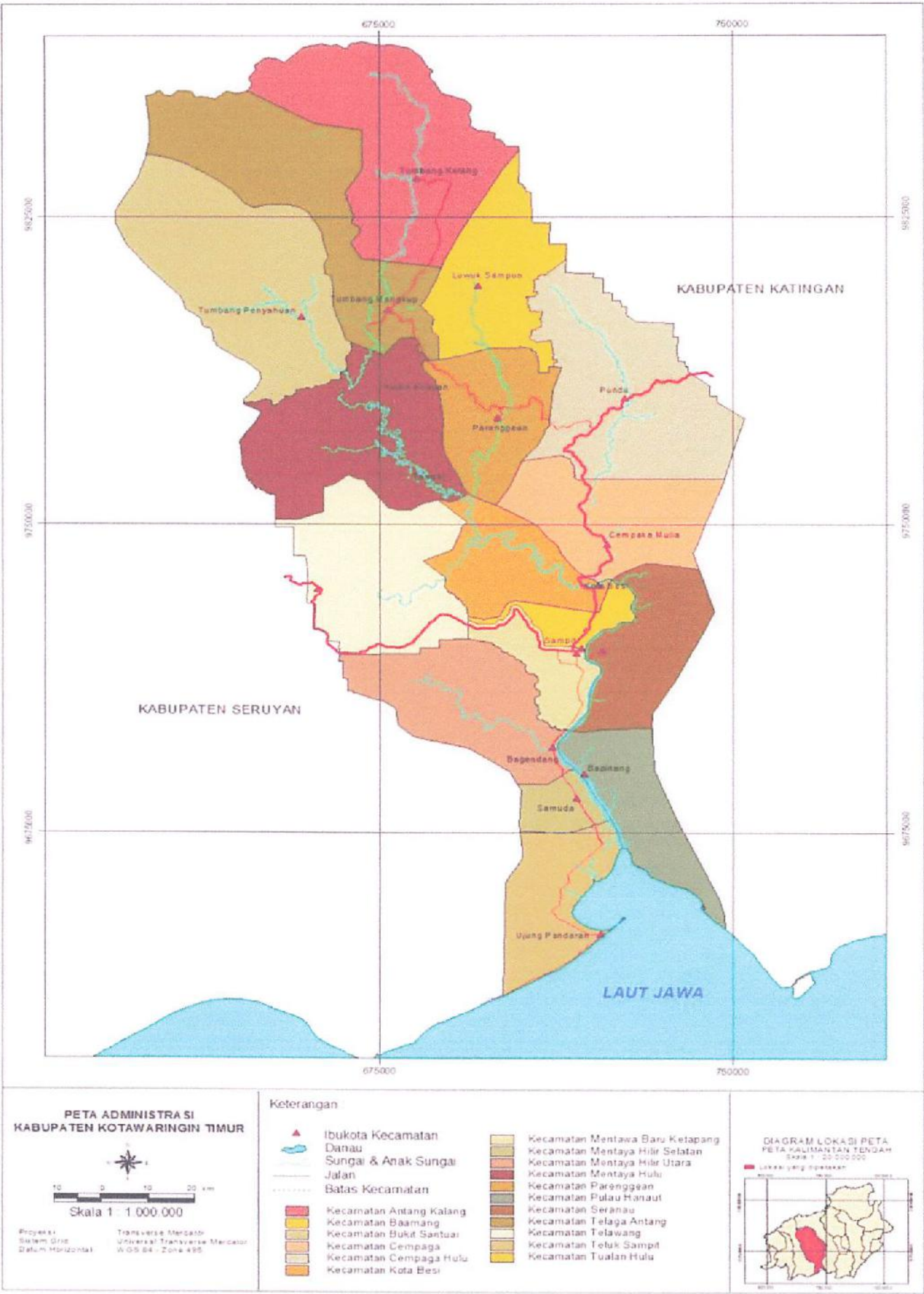
No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (Km ²)	Persentase terhadap Kab (%)	Luas berdasarkan Pemanfaatan Ruang (Ha)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kab (Km)
1	Mentaya Hilir Selatan	Samuda	318	1.89	21.058.1	10	48
2	Teluk Sampit	Ujung Pandaran	610	3.63	66.449.4	6	128
3	Pulau Hanaut	Bapinang	620	3.69	62.515.6	14	48
4	Mentawa Baru Ketapang	Sampit	726	4.32	34.900.3	11	1
5	Seranau	Mentaya Seberang	548	3.26	71.115.8	6	3
6	Mentaya Hilir Utara	Bagendang	725	4.32	96.443.7	7	28
7	Kota Besi	Kota Besi	1.889	11.25	63.581.2	11	18
8	Telawang	Sebabi	317	1.89	11.6412.3	6	93
9	Baamang	Baamang	639	3.80	20.640.7	6	3
10	Cempaga	Cempaka Mulia	1.253	7.46	88.297.1	8	48
11	Cempaga Hulu	Pundu	1.183	7.04	15.1045.9	11	124
12	Parenggean	Parenggean	493.15	2.94	71.147.1	15	105
13	Tualan Hulu	Luwuk Sampun	1.090.85	6.49	84.510.8	11	165
14	Mentaya Hulu	Kuala Kuayan	1.712.79	10.20	131.926.2	16	167
15	Bukit Santuai	Tumbang	1.636	9.74	168.005.1	14	207

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (Km ²)	Persentase terhadap Kab (%)	Luas berdasarkan Pemanfaatan Ruang (Ha)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kab (Km)
		Penyahuan					
16	Antang Kalang	Tumbang Kalang	1.579	9.40	160.402.4	15	183
17	Telaga Antang	Tumbang Mangkup	1.456.21	8.67	146.133.1	18	160
Kotawaringin Timur		Sampit	16.796	100%	1.554.584.6	185	1

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021



Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim, 2012



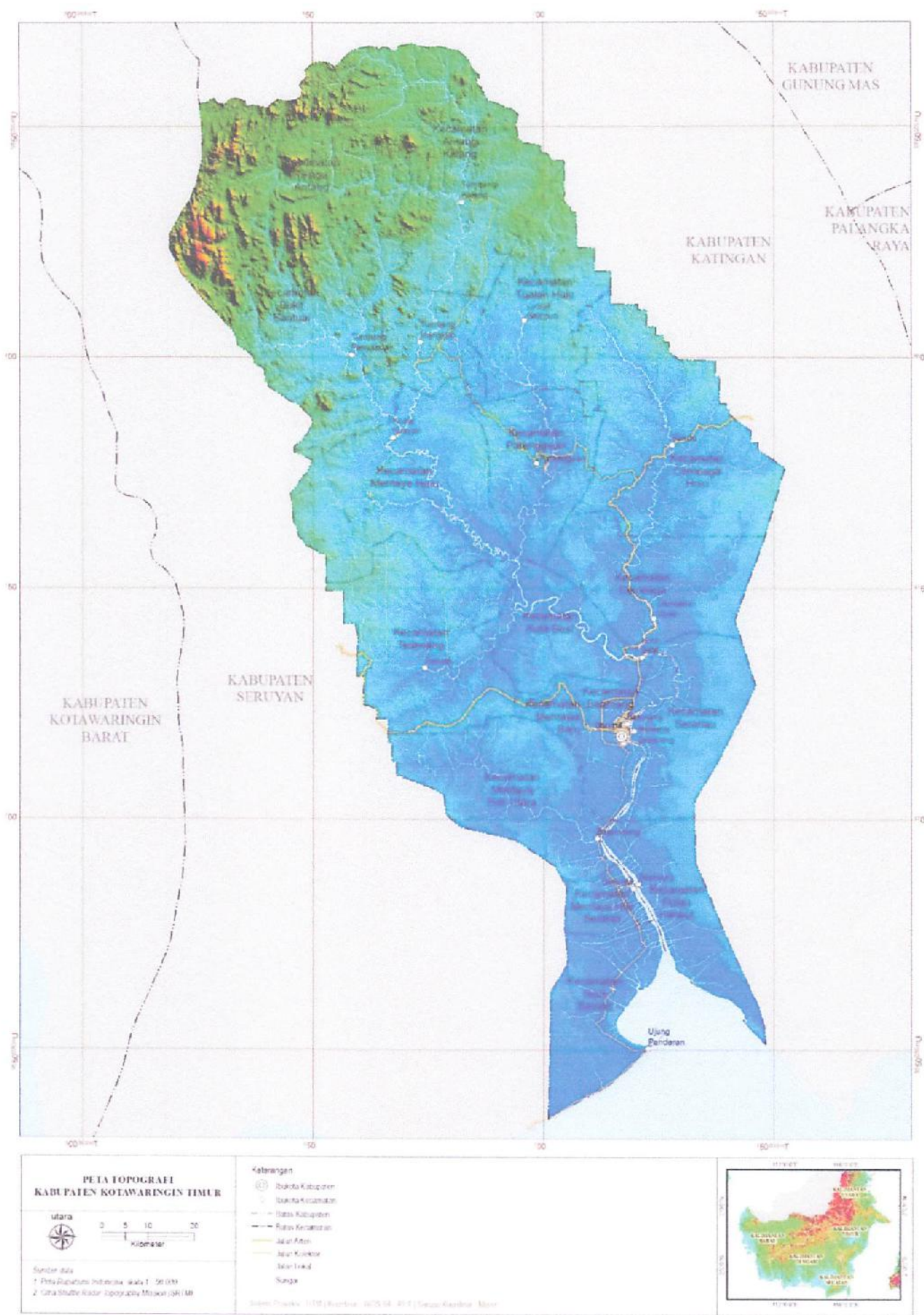
Gambar 2.2 Peta Administratif Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2035

2. Topografi

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang bervariasi, dapat dibagi dalam lima kelompok lereng yaitu 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, dan >40%. Wilayah Selatan didominasi oleh kemiringan lereng 0-2%, wilayah tengah didominasi kemiringan 2-5%, sedangkan wilayah Utara didominasi kemiringan lereng 5-15% dan 15-40%. Umumnya pembagian lini topografi di kelompokkan dalam dua zona, yaitu :

1. Wilayah Selatan dan Tengah dengan ketinggian tempat 0-100 m-dpl.
2. Wilayah Utara dengan ketinggian tempat bervariasi antara 0-1000 m-dpl, tempat tertinggi terdapat di Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Telaga Antang, dan Kecamatan Bukit Santuai.

Daerah ini merupakan wilayah berbukit hingga pegunungan yang terdiri dari batuan intrusi masam terdapat di Bagian Utara, sedangkan Bagian Tengah sampai Selatan didominasi oleh dataran rendah. Dataran Bagian Tengan terdiri dari dome gambut serta dataran rendah endapan sungai (fluvial) serta backswamp atau rawa belakang di sepanjang aliran sungai. Dibagian selatan, dataran rendah didominasi oleh dataran rendah endapan pantai (fluviomarine) dan pesisir pantai.



Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Bappelitbangda Kab. Kotim. 2021

3. Geomorfologi

Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dibagi ke dalam beberapa wilayah fisiografis yang terdiri atas::

1. Dataran rendah, endapan pantai

Wilayah ini terdapat di tepi pantai, tepatnya pantai yang berbatasan dengan Laut Jawa, yang berjarak 2-5 km dari pantai. Dataran ini terbentuk dari hasil pengendapan pantai, yang berupa tanah kering atau sedikit tergenang dan memiliki tekstur kasar.

2. Dataran rendah, endapan sungai

Wilayah ini terdapat di tepian sungai yang berbelok-belok (meander) atau danau kecil. Letaknya agak tinggi, namun kadang-kadang tergenang dan banjir akibat limpahan air sungai. Dataran ini bertekstur tanah sedang sampai halus. Seluruh wilayah dataran rendah, baik yang berupa endapan sungai maupun endapan pantai, masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

3. Lahan Gambut

Wilayah ini terletak di belakang wilayah endapan sungai (levee), yang terbentuk akibat hutan rawa monoton telah mencapai klomaks, sehingga terbentuk gambut yang cembung (dome).

4. Dataran rendah, batuan endapan pantai

Wilayah ini terletak agak ke hilir/tengah, terutama di sekitar Sungai Mentaya. Dataran ini membentang dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya terus ke timur. Pada wilayah ini air sulit mengalir keluar karena wilayah ini sangat datar, sehingga pada beberapa tempat drainase agak terhambat. Dataran ini memiliki tekstur tanah yang kasar.

5. Pegunungan/perbukitan batuan intrusi masam

Wilayah ini merupakan daerah patahan (told) dan lipatan (fault), terdapat di bagian hulu. Bentuk wilayah ini berbukit dan bergunung, yang didominasi oleh batuan endapan pasir dan liat dan diselingi dengan batuan intrusi yang umumnya masam.

6. Delta/Pulau

Merupakan daratan dengan luasan yang kecil di tengah laut maupun sungai.

7. Lain-Lain

Bagian yang termasuk lain-lain adalah tubuh air, diantaranya danau dan rawa, yaitu merupakan depresi atau cekungan yang airnya masih dalam. Pada daerah ini belum sempat terbentuk gambut.

Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh pegunungan/ perbukitan intrusi masam dan dataran rendah batuan pantai. Pegunungan atau perbukitan terdapat pada bagian Utara wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pegunungan/perbukitan tersebut terdiri dari batuan intrusi dan endapan masam, sehingga memiliki kendala dalam pembudidayaan lahan.

Dataran rendah endapan pantai banyak ditemui pada bagian tengah dan pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain dataran rendah dengan batuan pantai, pada bagian tengah Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki kondisi fisiografis yang terdiri dari dome gambut, serta dataran rendah endapan sungai dan backswamps di sepanjang aliran sungai. Sedangkan pada bagian Selatan, fisiografis wilayahnya merupakan dome gambut dan dataran rendah endapan sungai. Pada bagian pesisir fisiografis wilayahnya terdiri dari dataran rendah endapan pantai. Kendala yang dihadapi Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam membangun saluran air, dimana air sulit mengalir keluar serta kadang-kadang tergenang dan banjir.

4. Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk beriklim tropis basah (lembab) dengan tipe B (menurut Schmidt dan Ferguson) dengan kelembaban nisbi berkisar antara 82%-89% dan suhu rata-rata bulanan berkisar antara 27°C-36°C. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan curah hujan bervariasi. Pada daerah pedalaman kecenderungan curah hujannya tinggi sedang dikawasan pantai memiliki curah hujan sedang. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah kabupaten ini berkisar antara 1.934 mm/tahun. Profil klimatologi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Profil Klimatologi Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Bulan	Suhu Maksimum (°C)	Rerata Kelembaban (%)	Rerata Penguapan (ml)	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Durasi Sinaran Matahari	Kecepatan Angin (Knot)	Arah Angin
1	Januari	35,60	88,20	3,3	305,50	23	45,83	5,66	Utara
2	Februari	34,30	88,68	3,4	403,60	22	49,91	6,69	Timur
3	Maret	35,10	88,47	3,8	202,90	24	56,03	5,66	Barat
4	April	35,00	87,85	4,1	407,00	24	69,50	6,69	Selatan
5	Mei	35,00	88,18	3,8	314,80	21	70,36	5,66	Tenggara
6	Juni	34,80	86,68	4,1	178,00	19	65,04	6,69	Tenggara
7	Juli	33,30	86,65	4,5	387,30	27	71,29	7,20	Tenggara
8	Agustus	34,10	84,47	4,5	185,60	17	77,46	7,20	Selatan
9	September	34,80	85,97	4,3	170,70	26	66,54	10,29	Selatan
10	Oktober	35,00	85,71	4,7	333,70	23	68,19	7,72	Selatan
11	November	35,00	87,12	4,6	378,30	23	68,96	7,72	Barat Laut
12	Desember	34,80	86,71	3,8	220,90	25	52,88	7,20	Barat Laut

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

5. Geologi

Geologi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersusun oleh lima jenis formasi yaitu Formasi Dahor, Formasi Kuayan, Formasi Mentaya, Formasi Pembuang dan endapan Aluvial. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi masing-masing formasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Formasi Dahor dapat ditemui di sebagian besar selatan wilayah kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya pada bagian belakang disepanjang Daerah Aliran Sungai Mentaya. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Dahor ini terdiri dari konglomerat dengan komponen fragmen kuarsif dan basal berselingan dengan batu pasir, batu lempung. Umur formasi ini diperkirakan Miosen Tengah sampai Pleistosen, berdasarkan korelasi dengan formasi Dahor dilembar Tewah (Sumintadipura, 1976). Tebal formasi ini diperkirakan 300 m yang diendapkan dilingkungan paralik.
2. Formasi Kuayan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di Utara. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Kuayan ini terdiri dari breksi dengan komposisi andesit dan basal, aliran lava, batu pasir tufaan dan tuf. Formasi ini tidak dapat ditentukan umurnya, tetapi di Kalimantan Barat, Van Emmichoven (1939) op. Cit. Margono U, dkk (1995) menemukan fosil di formasi ini berumur Trias.
3. Formasi Mentaya terletak disekitar Kota Kuala Kuayan. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Mentaya ini dibagian bawah didominasi oleh batu pasir sedangkan dibagian atas batu pasir arkosa berbutir halus-kasar, terdapat struktur silang siur (cross bedding) dan gelembur gelombang. Setempat terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung yang kadang-kadang mengandung batubara. Formasi ini diendapkan pada kala Eosen-Oligosen dalam lingkungan pengendapan litoral, setempat berupa rawa-rawa.
4. Formasi Pembuang terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di sekitar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Pembuang ini terdiri dari batupasir karbonan (carbonaceous sandstone), konglomerat (conglomerate), batu lanau (siltstone), batu lempung (claystone) dan gambut (peat).
5. Endapan aluvial, tersusun oleh endapan delta (deltaic deposit) dan endapan klastika tak terpisahkan (undifferentiated clastic deposit).

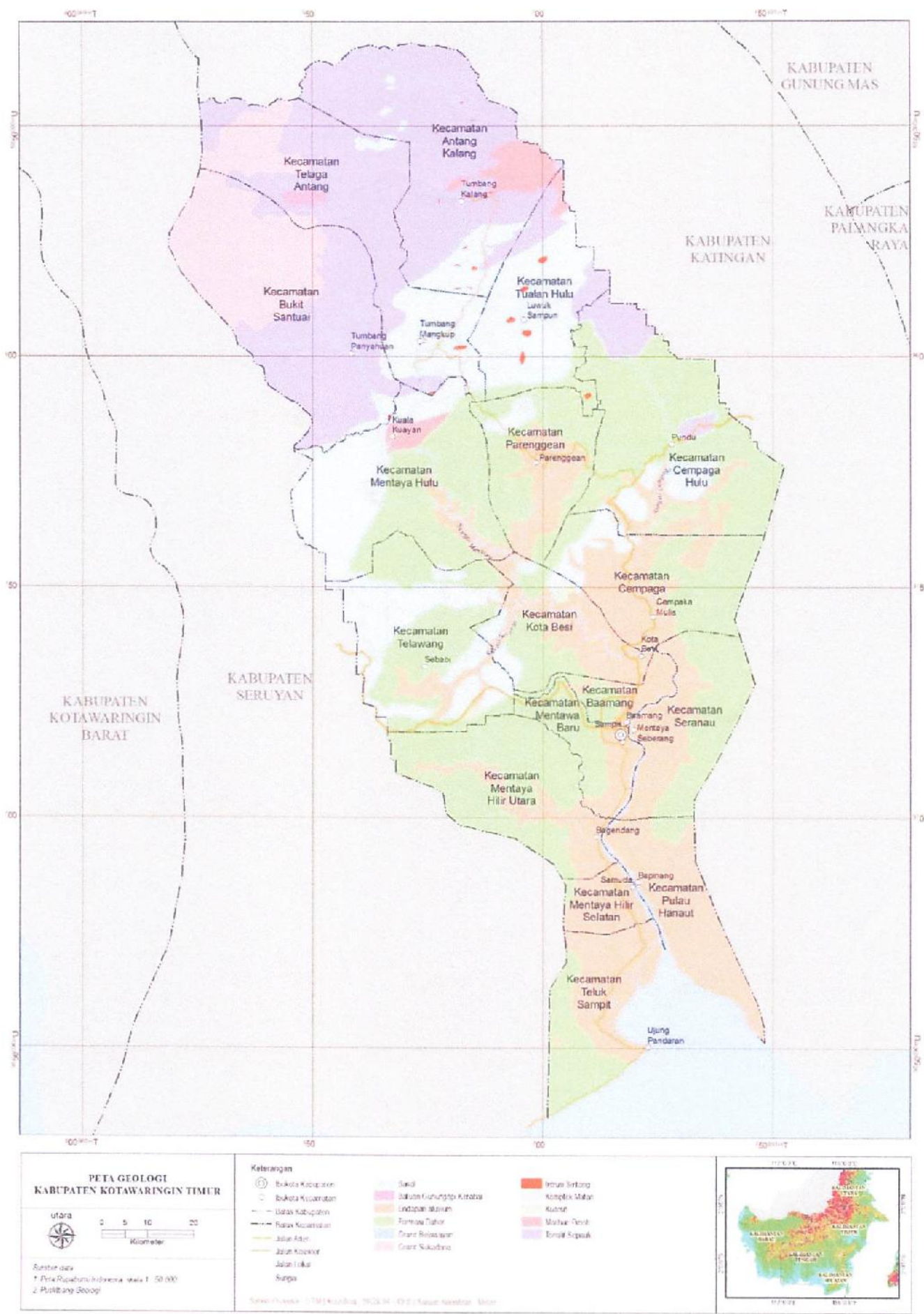
Endapan delta terdiri dari pasir kasar-halus (coarse to fine grained sands), lanau (silt) dan lumpur (mud). Sedangkan endapan klastika tak terpisahkan terdiri dari pasir (sand), lanau (silt), lempung (clay) dan gambut (peat). Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah struktur sesar/patahan (fault) dan kekar (join). Struktur patahan dapat memicu terjadinya bencana alam geologi. Daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi ini antara lain Kecamatan Mentaya Hulu karena pada daerah ini terdapat struktur sesar/patahan. Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain batubara, bijih besi, emas primer (dengan asosiasi mineral perak dan atau mineral tembaga timah hitam atau seng), emas sekunder, kwarsa kristal (termasuk kecubung atau amethyst), bentonit, kaolin, pasir kwarsa, granit, basalt, gambut, dan tanah liat.

Kondisi geologi dapat dilihat pada Gambar 2.4. Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari berbagai macam batuan, endapan, dan di beberapa bagian terdapat sesar. Struktur geologi tersebut mengakibatkan wilayah ini memiliki cukup banyak potensi bahan galian tambang yang dapat dimanfaatkan, baik bahan galian A, B, maupun C. Bahan-bahan galian yang banyak terdapat di wilayah ini meliputi batubara, air raksa, emas, kaolin, bijih besi, pasir kwarsa, granit, gambut, bauksit, dan lain-lain. Potensi bahan galian ini tersebar hampir di seluruh wilayah. Data IUP eksplorasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah IUP Ekplorasi dan Produksi di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Jenis Bahan Tambang	Eksplorasi				Produksi			
		2017		2018		2017		2018	
		IUP	Luas (Ha)	IUP	Luas (Ha)	IUP	Luas (Ha)	IUP	Luas (Ha)
1	Batubara	4	12730	4	12730	6	17936	5	15941
2	Zircon	3	9151	-	-	2	1074.58	-	-
3	Bijih Besi	2	10000	-	-	6	2432.68	4	2138.6
4	Emas	-	-	4	21268	-	-	-	-
5	Bauksit	1	250	1	250	9	11815.89	9	11815.8
6	Pasir	3	15000	-	-	-	-	-	-
7	Laterit	1	4.8	-	-	1	-	-	-
8	Mineral Logam	-	-	-	-	-	-	13	13954.4

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2019



6. Hidrologi - Oceanografi

Secara umum pola sungai di Kotawaringin Timur adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah-daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Dalam Wilayah Kotawaringin Timur terdapat sungai besar yang dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai prasarana transportasi. Beberapa sungai tersebut dapat dilayari oleh sarana perhubungan seperti kapal, speed boat, dan long boat. Sungai besar tersebut antara lain yaitu : Sungai Mentaya, Sungai Cempaga, Sungai Tualan, Sungai Kuayan, Sungai Kalang, Sungai Sampit, Sungai Lenggana, Sungai Mentobar, Sungai Seranau, dan Sungai Penyahuan (Tabel 2.4). Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta persawahan. Selain air sungai, penduduk juga memanfaatkan air danau, rawa-rawa, dan air tanah untuk keperluan sehari-hari.

Tabel 2.4 Profil Sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Panjang Anak Sungai (Km)	Jalur pelayaran (Km)	Rerata Kedalaman (m)	Rerata Lebar (m)
1	Mentaya	400	-	270	6	400
2	Cempaga	42	100 Km	38	6	250
3	Sampit	46	75 Km	40	6	200
4	Kuayan	48	100 Km	40	6	200
5	Kalang	18	65 Km	18	3	200
6	Seranau	21	75 Km	21	3	200

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Kondisi batimetri perairan laut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, umumnya dangkal dan memiliki gradasi landai, dimana garis isobath (garis khayal yang menghubungkan kedalaman perairan yang sama) 10 meter ditemui sekitar 10 – 20 km dari pantai. Kedalaman perairan laut dangkal rerata pada kisaran 0,5 – 4 meter. Kondisi batimetri yang paling dalam hanya terdapat di sekitar 70 km ke arah luar muara sungai Mentaya dengan kedalaman sekitar 25 meter. Gradasi kedalaman pantai bagian Timur Tenggara – Selatan Relatif sangat landai dibanding bagian Utara – Barat, akibat pengaruh tingkat sedimentasi ambang Sungai Mentaya yang lebih besar. Pantai dengan gradasi relatif tajam terdapat di bagian Timur (dekat mulut muara), sebagai akibat pengaruh gelombang laut Jawa dan arus muara sungai yang menggeser sedimen transport ke arah lepas pantai. Berdasarkan hasil peramalan pasang surut terhadap beberapa stasiun lokasi di perairan pantai Kalimantan Tengah, dapat diinformasikan variasi tunggang pasut. Data menunjukkan tunggang

pasut berkisar antara 47,35 cm di Tanjung Keluang (Tanjung Penghujan), hingga 321,54 cm di Teluk Sampit. Secara umum tunggang pasut terendah di perairan pantai bagian barat dan semakin tinggi ke arah timur (lihat Tabel 2.5). Kondisi Hidrologi dan Occanografi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6.

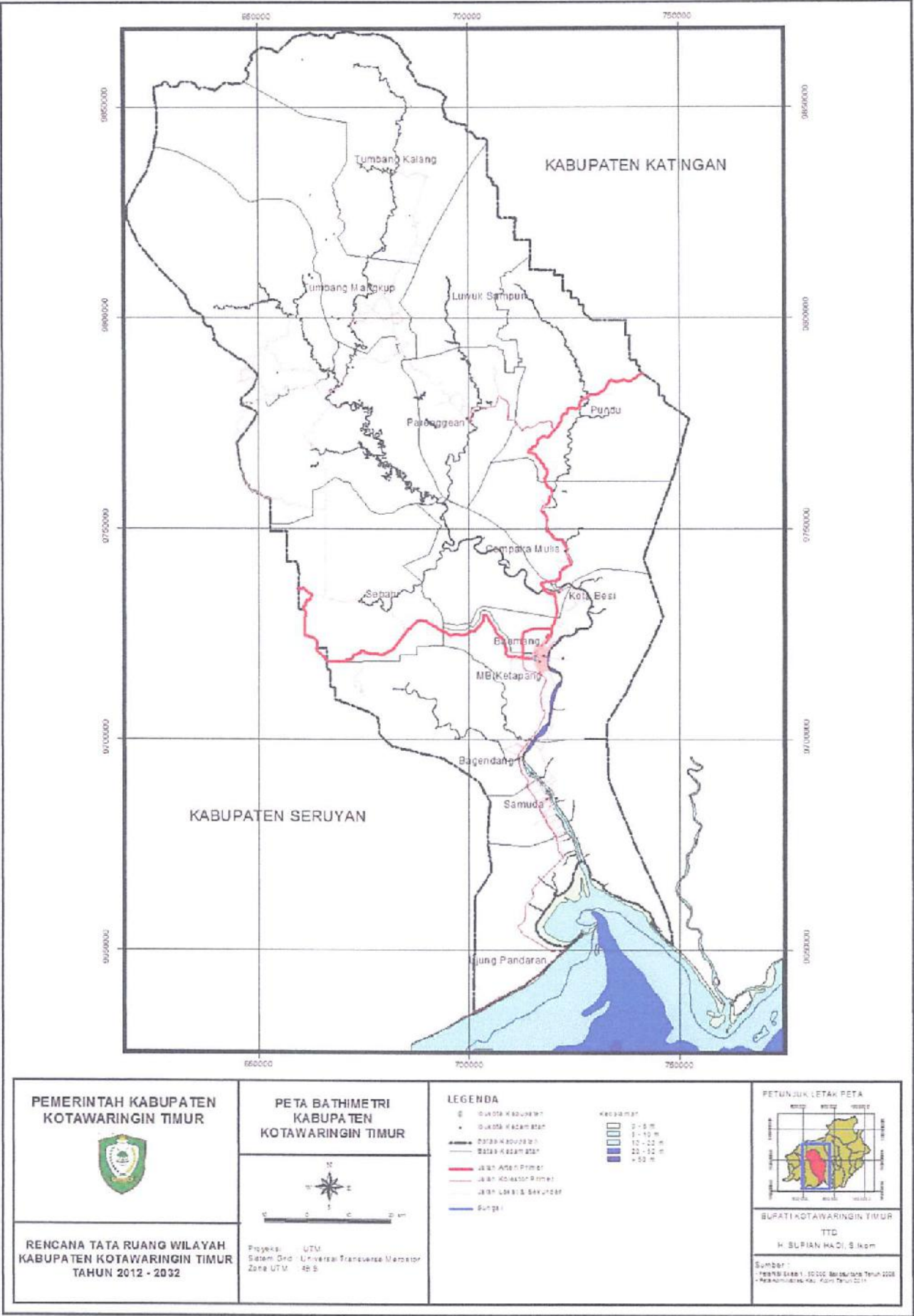
Tabel 2.5 Peramalan Air Pasang Tertinggi, Air Surut Terendah dan Tunggang Maksimum Pasang Surut di Perairan Pantai Kalimantan Tengah

No	Stasiun	Air Pasang Tertinggi (cm)	Air Surut Terendah (cm)	Tunggang Maksimum (cm)
1.	Tanjung Keluang (03°29'30" LS & 110°40'00" BT)	+27,81	-19,54	47,35
2.	PPI Kuala Pembuang (03°24'27,9" LS & 112°33'33" BT)	+98,90	-67,76	166,66
3.	Tanjung Buaya (03°29'05" LS & 112°30'49" BT)	+97,60	-66,49	164,09
4.	Teluk Kotawaringin (03°00'30" LS & 111°22'20" BT)	+60,26	-33,42	93,68
5.	Pantai Sei Bakau (02°59'19,3" LS & 111°35'31,4" BT)	+69,78	-39,27	109,05
6.	Pantai Kubu (02°59'00" LS & 110°45'00" BT)	+76,53	-43,60	120,13
7.	Percabangan S. Kumai & S. Sekonyer (02°46'26,8" LS & 111°42'50,9" BT)	+75,15	-42,64	117,79
8.	Pelabuhan Ujungpandaran (03°09'17,58" LS & 113°00'33,6" BT)	+188,79	-132,53	321,32
9.	Teluk Sampit (03°00'10" LS & 113°28'48" BT)	+188,92	-132,62	321,54
10.	Teluk Sebangau (03°01'24" LS & 113°30'30" BT)	+188,91	-132,62	321,53
11.	Pelabuhan Pulang Pisau (02°45'52" LS & 114°15'1,8" BT)	+113,66	-103,9	217,56
12.	Gosong Rining (03°02'24" LS & 114°01'17" BT)	+117,44	-98,87	216,31
13.	Batanjung (03°21'19,1" LS & 114°14'59,1" BT)	+113,67	-103,90	217,57

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim, 2012



Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim. 2012



Gambar 2.6 Peta Bathimetri Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim, 2012

7. Ekosistem Wilayah Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang, dan Estuaria)

Ekosistem Hutan mangrove di Pesisir Kotawaringin Timur meliputi type/bentuk pantai; bentuk muara sungai/laguna dan bentuk pulau. Hutan mangrove ini merupakan habitat alami ikan dimana berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan atau biota laut lainnya, perlindungan terhadap kehidupan pantai dan laut disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut dan pelindung usaha budidaya di belakangnya. Sebaran hutan mangrove di pesisir Kotawaringin Timur terdiri dari hutan mangrove primer terdapat di Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Pulau Hanaut, sedangkan hutan mangrove sekunder terdapat di Kecamatan Pulau Hanaut.

Di wilayah Pesisir dan Laut Kotawaringin Timur mempunyai jenis –jenis flora dan fauna yang beragam baik ukuran maupun jenis. Jenis-jenis flora diantaranya adalah bakau, cemara laut, jambu mete, kelapa, nipah dan galam serta jenis tumbuhan yang hidup sebagai semak belukar. Tumbuhan yang hidup di perairan yang tergolong plankton terutama chlorophyta, cyanophyta, diatomae, pyrophyta.

Jenis fauna yang ditemukan antara lain : Bekantan, siamang, ular rawa, burung elang, udang (*Penaeus monodon*), udang manis (*Penaeus semisulcatus*), udang putih (*Penaeus merguensis*), kepiting (*Sella serrata*), rajungan (*Portunos pelagicus*), dan kerang-kerangan. Jenis ikan yang ditemukan antara lain : ikan kakap (*Lates calcarifer*), tembang (*Sardinella longicep*), tenggiri (*Scomberomerus commerson*), bambangan (*Lutjanus malabaricus*), kembung lelaki (*Rastrelliger kanagurta*), kembung perompangan (*Rastrelliger neglectus*), belanak (*Valamugil speigleri*), bawal putih (*Pampus argentus*), tongkol (*Auxis thazard*), pari kembang (*Orygonsepha*), pari burung (*Actomyles nichofie*), cucut hiu (*Hermigaleus balfouri*), sembilang (*Plotosus cavius*), telang (*Scomberomerus guttatus*), selungsungan (*Scomberomerus australosius*), selangat (*Dhorosoma chacunda*) dan bandeng (*Channos channos*).

Ekosistem mangrove dapat dibedakan dalam tiga tipe utama, bentik antai/delta, bentuk muara sungai/laguna, dan bentuk pulau. Ketiga tipe tersebut terwakili di sebagian besar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang paling produktif dan merupakan sumber hara untuk perikanan pantai. Hutan ini menyokong kehidupan sejumlah besar spesies binatang dengan menyediakan tempat berbiak, berpijah, dan makan. Spesies tersebut meliputi berbagai jenis burung, ikan, kerang dan krustasea seperti udang, kepiting. Hutan bakau juga berfungsi sebagai pelindung pantai

dan penstabilisasi serta berperan sebagai penyangga pencegah erosi yang disebabkan oleh arus, gelombang, dan angin. Mereka juga memainkan peranan penting sebagai pengendali banjir dan pemelihara permukaan air di bawah tanah.

Ada tiga tipe akar yang biasa dijumpai pada hutan mangrove, yaitu akar lutut, akar nafas dan akar tunjang. Jenis hutan mangrove (bakau) yang ditemukan di pesisir wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara langsung atau tidak langsung, hutan mangrove melindungi dan menyediakan makanan bagi komunitas binatang, termasuk burung-burung pantai dan banyak organisme laut. Hutan mangrove mempunyai fauna yang kaya akan udang-udangan yang besar dan moluska, juga merupakan tempat yang penting untuk memijah dan pembibitan bagi udang dan banyak jenis ikan pelagis bernilai komersil penting.

Jenis mangrove yang dominan ditemukan pada kawasan pesisir pantai Kotawaringin Timur terdapat disebelah timur (pesisir teluk sampit) antara lain Api- api (*Avicennia alba*) dan bakau-bakauan (*Rhizophora spp.*). Sementara dibagian ujung timur didominasi jenis cemara laut. Pada pantai sebelah barat jenis nipah (*Nympae, sp.*) mendominasi vegetasi mangrove sebelah dalam, sementara pada arah keluar mendekati pantai, jenis Api-api (*Avicennia alba*) dan bakau-bakauan (*Rhizophora spp.*) yang lebih dominan. Bagian kawasan pantai paling luar yang berbatasan dengan laut umumnya berpasir dan tidak ditumbuhi vegetasi.

Pada kawasan Timur Selatan tidak ditemukan komunitas mangrove yang berarti, sedangkan pada sebelah utara teluk sampit terdapat endapan/sedimen lumpur yang mulai ditumbuhi oleh vegetasi mangrove secara alamiah dari jenis Api-api dan bakau. Dipantai barat, sedimenasi yang cukup kuat juga terjadi sehingga mendangkalkan lingkungan dermaga tradisional milik masyarakat setempat dan pertumbuhan komunitas mangrove yang cukup besar dari jenis api- api, bakau, rambai. Bibit mangrove yang tumbuh disebelah utara teluk sampit berpeluang besar berasal dari pantai barat teluk sampit yang cukup rapat ditumbuhi beberapa mangrove.

Komunitas terumbu karang tidak ditemukan pada perairan laut dangkal (pesisir) dalam wilayah kajian. Berdasarkan informasi nelayan, komunitas terumbu karang ditemukan sekitar 3 mil dari pantai, namun demikian keberadaan terumbu karang harus diperhatikan karena selain sebagai komunitas penting dalam ekosistem perairan laut (sebagai habitat berbagai jenis biota laut, nursery area, pawning area serta feeding area dan bernilai ekonomi

penting, juga memiliki nilai ekologis penting sebagai natural barrier bagi daratan karena fungsinya menjadi breaker water yang melindungi daratan dari peluang abrasi gelombang.

Estuaria adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan erat dengan pertemuan perairan sungai dengan air laut. Produktivitas estuaria dan lautan dangkal sekitar pantai menunjang perikanan pantai yang sangat kaya. Sungai Mentaya secara terus menerus membawa endapan, mineral dan zat-zat hara ke dalam estuaria, memperbaharui bahan-bahan yang hilang untuk memelihara produktivitas yang tinggi. Termasuk dalam estuaria adalah

8. Jenis Tanah

Untuk seluruh wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari tiga jenis tanah yang terbagi dalam tiga bagian geografis. Di pesisir atau di bagian Selatan terdiri dari Alluvial Marine yang memiliki kandungan hara rendah. Sedang di bagian tengah sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsol air tanah, Podsol Kuning dan Alluvial Gleihumus yang berada di sepanjang sungai. Wilayah ini memiliki kendala pada drainase yang terhambat. Sedang di bagian utara sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsolik Merah Kuning, Regosol dan Litosol. Wilayah ini terdiri dari batuan, sebagian bersifat masam. Memiliki kandungan hara yang rendah dan berbukit-bukit. Kemampuan tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase erosi serta faktor pembatas lainnya. Secara umum kondisi kemampuan tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sepanjang aliran Sungai Mentaya memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur sedang, tergenang secara periodik dan tidak ada erosi.
- b. Dibagian barat wilayah kabupaten yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Baamang dan Kotabesi memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur sedang, tidak pernah tergenang dan tidak ada erosi.
- c. Semakin ke utara kemampuan tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur halus, tidak pernah tergenang dan tidak ada erosi.

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.7. Secara garis besar terbagi adalah sebagai berikut :

a. Bagian Selatan

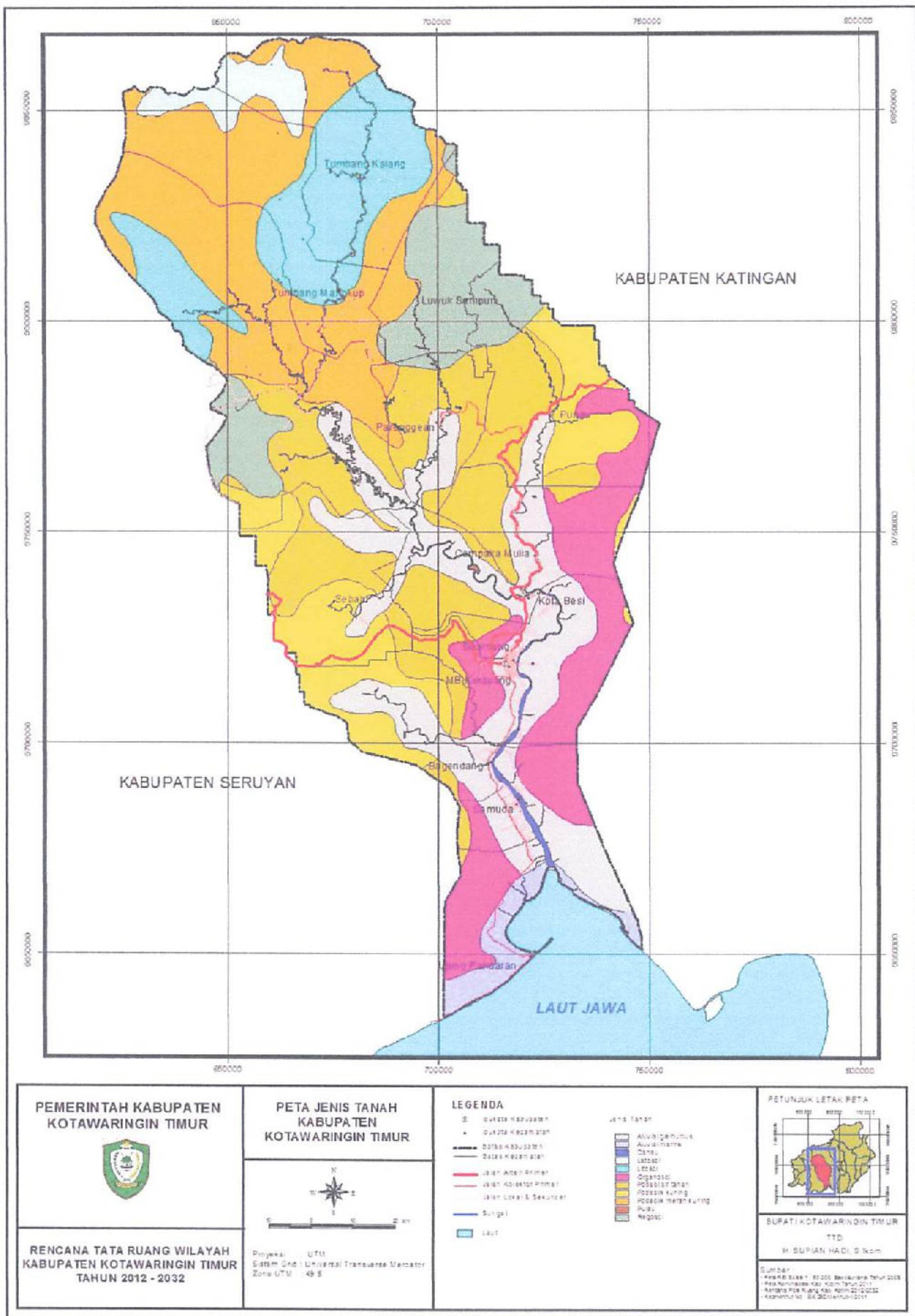
Sebagian besar jenis tanahnya adalah organosol dan alluvial glei humus yang memiliki kendala pada drainase yang terhambat namun memiliki kandungan unsur hara yang baik. Di bagian pesisir terdiri dari alluvial marine yang memiliki kandungan unsur hara rendah.

b. Bagian Tengah

Sebagian besar jenis tanahnya adalah podsol air tanah, podsol kuning dan alluvial glei humus yang berada di sepanjang sungai. Wilayah ini memiliki kendala drainase yang terhambat.

c. Bagian Utara

Sebagian besar jenis tanahnya adalah podsolik merah kuning, regosol dan litosol. Wilayah ini terdiri dari batuan, sebagian bersifat masam, memiliki kandungan hara yang rendah dan berbukit-bukit.



Gambar 2.7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim, 2012

9. Penggunaan lahan

Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tgl 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan. Penggunaan lahan meliputi :

- a. Areal Penggunaan Lain (APL), merupakan areal bukan kawasan hutan termasuk didalamnya areal permukiman pedesaan dan perkotaan.
- b. Hutan Lindung (HL), merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Produksi Tetap (HP), merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
- d. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
- e. Hutan Produksi Terbatas (HPT), merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
- f. Perairan, merupakan perairan darat yang terdiri atas sungai, danau, dan badan air lainnya.

Luasan untuk masing-masing penggunaan lahan atau kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6. Peta penggunaan lahan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Penggunaan Lahan/Kawasan	Luas (Ha)
1	Areal Penggunaan Lain (APL)	435.987,7
2	Hutan Lindung (HL)	17.471,57
3	Hutan Produksi Tetap (HP)	506.156,3
4	Hutan Produksi Konversi (HPK)	391.875,2
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	191.299,6
6	Perairan	11.794,64
Total		1.554.585

Sumber: Sk Menhut 8110 2018, RTRW Prov. Kalteng. 2015-2035

2.1.2 Aspek Demografi

1. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 375.649 jiwa dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 428.900 jiwa.

Tabel 2.7 Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Rumah Tangga (2018)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Distribusi Penduduk (%)
			2010	2020	
1	Mentaya Hilir Selatan	6.750	20.877	23.000	5,36
2	Teluk Sampit	2.665	8.968	10.600	2,46
3	Pulau Hanaut	4.628	15.530	16.800	3,92
4	Mentawa Baru Ketapang	24.160	77.207	98.700	23,01
5	Seranau	2.826	9.619	10.900	2,54
6	Mentaya Hilir Utara	5.360	15.891	18.800	4,38
7	Kota Besi	4.727	15.055	18.400	4,30
8	Telawang	5.658	16.907	20.500	4,78
9	Baamang	15.554	51.719	69.700	16,25
10	Cempaga	5.558	19.183	22.300	5,20
11	Cempaga Hulu	7.725	23.393	21.600	5,03
12	Parenggean	8.590	25.337	26.600	6,21
13	Tualan Hulu	3.895	25.034	7.800	1,81
14	Mentaya Hulu	8.376	8.096	20.500	4,79
15	Bukit Santuai	2.862	14.135	10.400	2,42
16	Antang Kalang	4.553	10.399	13.400	3,11
17	Telaga Antang	6.012	18.300	19.000	4,42
Kotawaringin Timur		119.899	375.649	428.900	100,00

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka tahun 2019 dan tahun 2021

Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan sebaran distribusi penduduknya sebesar 23,01 persen. Kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 98,7 ribu per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tualan Hulu dengan distribusi sebaran penduduk sebesar 1,81 persen. Kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 7,8 ribu per kilometer persegi.

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019-2020 meningkat sebesar 3,48 persen. Bila

dibandingkan laju pertumbuhan selama lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 pertumbuhan cenderung menunjukan tren naik yaitu 1,33 persen (Tabel 2.8).

Tabel 2.8 Pertumbuhan Penduduk Hingga Tahun 2020

No	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk					Laju dan Rerata Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020	2010 - 2020
1	Mentaya Hilir Selatan	23.750	24.000	24.649	24.668	23.000	-6.76	0,98
2	Teluk Sampit	10.201	10.000	10.588	11.125	10.600	-4.71	1,63
3	Pulau Hanaut	17.667	17.000	18.336	18.441	16.800	-8.89	0,80
4	Mentawa Baru Ketapang	85.623	86.000	88.116	98.424	98.700	0.28	2,44
5	Seranau	10.667	10.000	10.979	11.635	10.900	6.31	1,23
6	Mentaya Hilir Utara	17.482	17.000	17.943	15.808	18.800	18.92	1,66
7	Kota Besi	18.823	19.000	20.162	19.303	18.400	-4.67	2,03
8	Telawang	21.140	21.000	22.643	15.275	20.500	34.20	1,94
9	Baamang	58.068	59.000	60.006	68.309	69.700	2.03	2,97
10	Cempaga	25.063	26.000	27.241	22.426	22.300	-0.56	1,52
11	Cempaga Hulu	30.563	31.000	33.219	18.984	21.600	13.78	-0,72
12	Parenggean	28.643	29.000	29.665	25.852	26.600	2.89	-2,77
13	Tualan Hulu	11.756	28.000	12.176	6.937	7.800	12.44	-
14	Mentaya Hulu	28.300	12.000	29.311	18.200	20.500	12.63	-3,13
15	Bukit Santuai	11.863	16.000	13.397	8.282	10.400	25.57	2,51
16	Antang Kalang	15.979	11.000	16.550	12.269	13.400	9.21	-7,15
17	Telaga Antang	20.688	21.000	21.428	18.525	19.000	2.56	-
Kotawaringin Timur		436.276	446.094	456.409	414.463	428.900	3.48	1,33

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka Tahun 2017-2021; Hasil Analisis. 2021.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar 25 Ribu/Km2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bukit Santuai yang hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 6,34 Ribu/Km2 , sedangkan yang tertinggi yaitu pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebesar 135,92 Ribu/Km2. Data kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Ribu/Km²)
1	Mentaya Hilir Selatan	23,0	318,00	72,36
2	Teluk Sampit	10,6	610,00	17,31
3	Pulau Hanaut	16,8	620,00	27,11
4	Mentawa Baru Ketapang	98,7	726,00	135,92
5	Seranau	10,9	548,00	19,84
6	Mentaya Hilir Utara	18,8	725,00	25,90
7	Kota Besi	18,4	1.889,00	9,76
8	Telawang	20,5	317,00	64,73
9	Baamang	69,7	639,00	109,10
10	Cempaga	22,3	1.253,00	17,79
11	Cempaga Hulu	21,6	1.183,00	18,25
12	Parenggean	26,6	493,15	54,00
13	Tualan Hulu	7,8	1.090,85	7,12
14	Mentaya Hulu	20,5	1.712,79	11,99
15	Bukit Santuai	10,4	1.636,00	6,34
16	Antang Kalang	13,4	1.579,00	8,46

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Ribu/Km ²)
17	Telaga Antang	19,0	1.456,21	13,02
	Kotawaringin Timur	428,9	16.796,00	25,54

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

4. Struktur Penduduk berdasarkan *Sex Ratio* dan Kelompok Umur
Aspek ratio jenis kelamin (*Sex Ratio*), penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur lebih banyak laki-laki dibanding dengan perempuan. Dari total 428,9 penduduk pada tahun 2020, terdapat 222,6 laki-laki atau 51,90 persen. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 107,9 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki (Tabel 2.10).

Tabel 2.10 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Ribu)			Rasio Jenis Kelamin (L/P)
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Total	
1	Mentaya Hilir Selatan	11,7	11,3	23,0	104,0
2	Teluk Sampit	5,5	5,0	10,6	109,4
3	Pulau Hanaut	8,7	8,1	16,8	106,4
4	Mentawa Baru Ketapang	50,5	48,2	98,7	104,9
5	Seranau	5,7	5,2	10,9	108,8
6	Mentaya Hilir Utara	9,9	8,9	18,8	111,9
7	Kota Besi	9,7	8,8	18,4	110,1
8	Telawang	11,1	9,4	20,5	118,9
9	Baamang	35,5	34,2	69,7	103,7
10	Cempaga	11,6	10,7	22,3	109,1
11	Cempaga Hulu	11,5	10,1	21,6	113,1
12	Parenggean	13,8	12,8	26,6	107,6
13	Tualan Hulu	4,1	3,7	7,8	111,5
14	Mentaya Hulu	10,7	9,8	20,5	109,9
15	Bukit Santuai	5,5	4,8	10,4	114,8
16	Antang Kalang	7,2	6,2	13,4	115,4
17	Telaga Antang	9,9	9,1	19,00	108,3
	Kotawaringin Timur	222,6	206,3	428,9	107,9

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

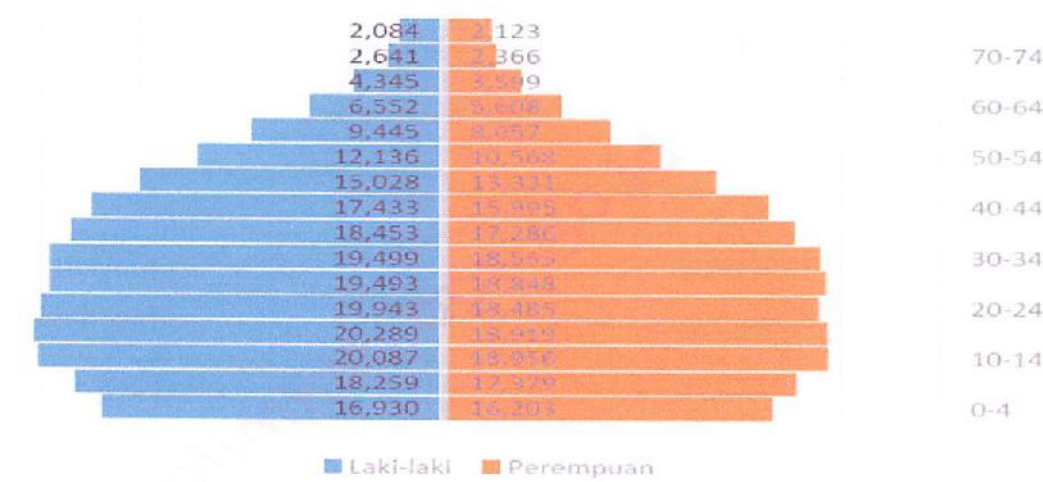
Tinjauan penduduk menurut kelompok umur menggambarkan dominasi penduduk usia anak dan usia produktif di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebaran strukturnya dapat dilihat pada Tabel 2.11 dan Gambar 2.9. Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh kelompok usia produksi dengan persentase penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 70 persen, sedangkan untuk penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas) sebesar 30 persen. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif merupakan modal dasar bagi Kabupaten Kotawaringin Timur untuk

melakukan percepatan pembangunan daerah. Jika dikaitkan dengan angka beban ketergantungan, jumlah penduduk produktif yang menanggung penduduk tidak produktif masih tinggi yaitu sebesar 42 persen. Ditinjau dari komposisi penduduknya, sebanyak 6,49 persen penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam kelompok umur 0 sampai dengan 4 tahun. Hal ini juga mengindikasikan masih tinggi nya angka kelahiran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.11 Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Total
1	0-4	16,9	16,2	33,1
2	5-9	18,3	17,4	35,6
3	10-14	20,1	19,0	39,0
4	15-19	20,3	18,9	39,2
5	20-24	19,9	18,5	38,4
6	25-29	19,5	18,8	38,3
7	30-34	19,5	18,6	38,1
8	35-39	18,5	17,3	35,7
9	40-44	17,4	16,0	33,4
10	45-49	15,0	13,3	28,4
11	50-54	12,1	10,6	22,7
12	55-59	9,4	8,1	17,5
13	60-64	6,6	5,6	12,2
14	65-69	4,3	3,6	7,9
15	70-75	2,6	2,4	5,0
16	>75	2,1	2,1	4,2
Kotawaringin Timur		222,6	206,3	428,9

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021



Gambar 2.9 Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto/PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen. Angka PDRB menurut harga berlaku Kabupaten Kotawaringin Timur 2020 mencapai angka 26.957,3 miliar rupiah. Ekonomi Kotawaringin Timur pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 3,09 persen. Nominal ini merupakan angka terbesar pertama di Provinsi Kalimantan Tengah. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar sejak tahun 2017 mulai bergeser dari pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menuju industri pengolahan. Trend ini menunjukkan bahwa tingka ketergantungan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap hasil alam yang bersifat mentah mulai berkurang dan makin tingginya kemampuan melakukan pengolahan bahan mentah dari alam sehingga memperoleh nilai tambah/*value added* yang lebih tinggi.

Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 7,16 persen dengan migas namun pertumbuhan tanpa migas terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun menjadi 5,59 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor industri pertanian, kehutanan dan perikanan (3,86 persen). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur masih ditopang secara dominan oleh sektor primer. Penurunan harga komoditas pertanian memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.12 – Tabel 2.16, Gambar 2.10 dan Gambar 2.11.

Tabel 2.12 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan, Atas Dasar Harga Berlaku, dan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Tahun	PDRB ADHK		PDRB per Kapita ADHB (Rupiah)	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)
	Jumlah (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)		
2016	14.932,8	7.93	44.81	19.622,9
2017	16.118,2	7.94	50.19	22.390,7
2018	17.234,3	6.92	53.82	24.565,4
2019	18.463,5	7.13	57.49	26.812,5
2020	17.892,3	-3,09	56.63	26.957,3

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan Riil PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.56	6.13	6.83	3.89	-3.10
2. Pertambangan dan Penggalian	9.56	12.22	7.73	33.47	17.35
3. Industri Pengolahan	8.88	11.18	7.37	5.14	-2.17
4. Pengadaan Listrik dan Gas	13.18	5.65	9.24	11.55	12.01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.41	0.86	3.40	9.39	14.64
6. Konstruksi	5.06	4.17	4.29	5.12	-29.88
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.03	8.64	8.92	9.39	-6.82
8. Transportasi dan Pergudangan	12.22	9.41	6.76	5.81	3.59
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.74	5.21	4.94	4.20	-3.67
10. Informasi dan Komunikasi	3.48	3.52	4.42	2.02	7.49
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.01	7.06	2.90	7.36	5.57
12. Real Estate	5.04	4.80	6.34	4.43	0.44
13. Jasa Perusahaan	5.26	5.50	6.31	2.18	-27.43
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.12	-0.28	4.99	2.69	-1.09
15. Jasa Pendidikan	5.35	4.14	7.38	3.46	8.79
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.98	4.90	8.20	0.13	1.37
17. Jasa Lainnya	5.85	6.05	7.61	5.01	-8.54
Rata-rata	7.93	7.94	6.92	7.13	-3.09

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan PDRB					
Dengan Migas	7,93	7,94	6,92	7,13	-3.09
Tanpa Migas	7,84	7,70	6,91	5,59	-4.67

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020



Gambar 2.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.15 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 375,2	4 773.1	5 104.1	5 282.5	5 789.8
2. Pertambangan dan Penggalian	603,6	691.8	769.8	1 081.4	1 364.9
3. Industri Pengolahan	4 356,0	5 290.9	5 641.5	5 775.6	5 843.1
4. Pengadaan Listrik dan Gas	9,5	11.4	13.2	15.0	17.7
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23,5	25.6	28.9	31.8	39.1
6. Konstruksi	1 89.2	2 117.8	2 366.9	2 605.3	1 898.3
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 414.3	4 015.7	4 639.9	5 413.4	5 125.7
8. Transportasi dan Pergudangan	2 143.2	2 48.1	2 665.8	2 971.2	3 090.4
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	275.6	301.0	320.7	344.8	335.9
10. Informasi dan Komunikasi	134.1	138.9	148.2	159.4	173.0
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	721.9	805.4	866.2	969.5	1 036.6
12. Real Estate	306.0	341.4	385.1	410.5	424.4
13. Jasa Perusahaan	6.8	7.4	8.4	8.9	6.6
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	423.3	429.0	474.6	502.5	498.0
15. Jasa Pendidikan	604.9	639.3	707.1	777.8	851.2
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201.3	228.5	260.7	274.8	288.4
17. Jasa Lainnya	130.4	145.3	164.2	187.9	174.2
Produk Domestik Regional Bruto	19 622.9	22 390.7	24 565.4	26 812.5	26 957.3

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.16 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 352.8	3 558.3	3 801.4	3 949.5	3 827.2
2. Pertambangan dan Penggalian	789.9	884.1	952.4	1 271.2	1 491.7
3. Industri Pengolahan	3 410.8	3 792.2	4 071.7	4 281.1	4 188.1
4. Pengadaan Listrik dan Gas	8.5	9.0	9.8	10.9	12.2
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.0	17.2	17.7	19.4	22.2
6. Konstruksi	1 433.5	1 493.2	1 557.3	1 637.1	1 147.9
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 510.5	2 727.5	2 970.8	3 249.7	3 028.0
8. Transportasi dan Pergudangan	1 429.32	1 563.6	1 669.4	1 766.4	1 829.8
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	177.2	186.5	795.7	203.9	196.4
10. Informasi dan Komunikasi	123.8	128.1	133.8	136.5	146.7
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	544.3	582.8	599.6	634.8	679.6
12. Real Estate	214.6	224.9	239.2	249.8	250.9
13. Jasa Perusahaan	5.1	5.4	5.7	5.8	4.2
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	249.9	294.1	308.7	317.0	313.6
15. Jasa Pendidikan	387.1	403.1	432.8	447.8	487.2
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.1	150.1	162.4	162.6	164.9
17. Jasa Lainnya	92.5	98.1	105.6	110.9	101.4
Produk Domestik Regional Bruto	14 932.8	16 118.2	17 234.3	18 463.5	17 892.3

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Terdapat delapan kategori yang mengalami kontraksi pada tahun 2020, antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Lainnya. Kontraksi terbesar terjadi pada sektor Konstruksi yaitu sebesar 29,88 persen. Sementara sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 17,35 persen.

Struktur perekonomian Kotawaringin Timur masih didominasi oleh tiga kategori yaitu Industri Pengolahan (21,68 persen), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,48 persen), dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (19,01 persen). Kenaikan angka laju pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan terdapat percepatan perkembangan iklim perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur. Distribusi persentase PDRB ADHB dan ADHK dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18.

Tabel 2.17 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

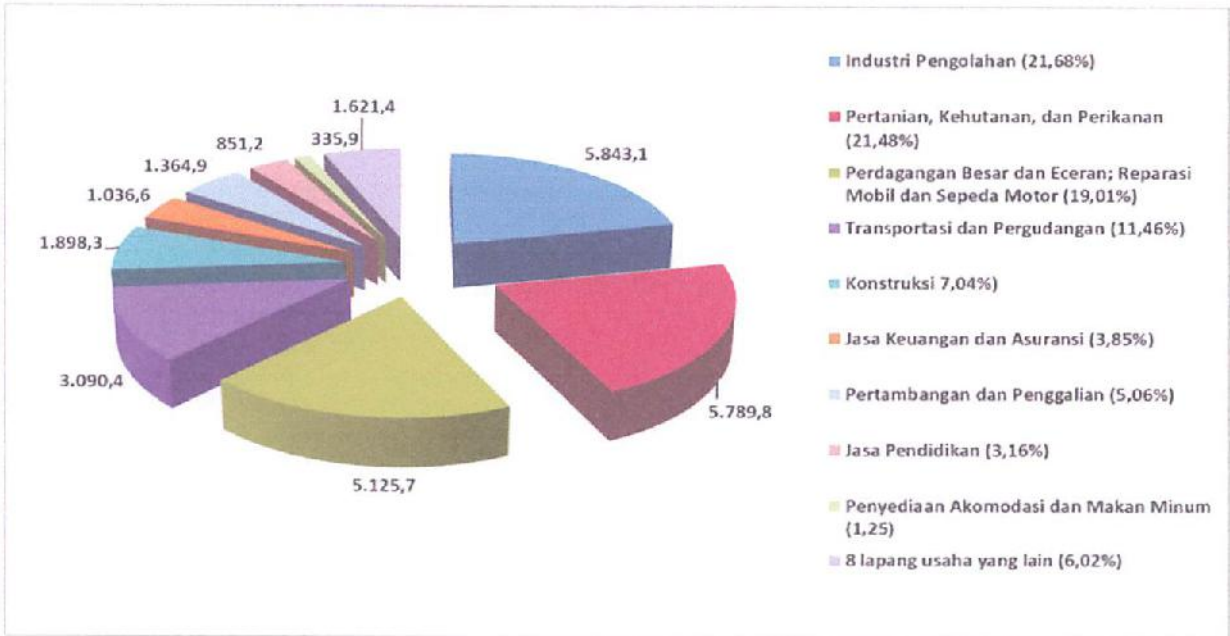
LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,30	21,32	20,78	19,70	21,48
2. Pertambangan dan Penggalian	3,08	3,09	3,13	4,03	5,06
3. Industri Pengolahan	22,20	23,63	22,97	21,54	21,68
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,12	0,12	0,15
6. Konstruksi	9,65	9,46	9,63	9,72	7,04
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,40	17,93	18,89	20,19	19,01
8. Transportasi dan Pergudangan	10,92	10,84	10,85	11,08	11,46
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,40	1,34	1,31	1,29	1,25
10. Informasi dan Komunikasi	0,68	0,62	0,60	0,59	0,64
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,68	3,60	3,53	3,62	3,85
12. Real Estate	1,56	1,52	1,57	1,53	1,57
13. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,16	1,92	1,93	1,87	1,85
15. Jasa Pendidikan	3,08	2,86	2,88	2,90	3,16
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,03	1,02	1,06	1,03	1,07
17. Jasa Lainnya	0,66	0,65	0,67	0,70	0,65
Produk Domestik Regional Bruto ADHB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.18 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,5	22,1	22,1	21,4	21,4
2. Pertambangan dan Penggalian	5,3	5,5	5,5	6,9	6,9
3. Industri Pengolahan	22,8	23,5	23,6	23,2	23,2
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Konstruksi	9,6	9,3	9,1	8,9	8,9
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,8	16,9	17,2	17,6	17,6
8. Transportasi dan Pergudangan	9,6	9,7	9,6	9,5	9,5
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
10. Informasi dan Komunikasi	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5
12. Real Estate	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
13. Jasa Perusahaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,0	1,8	1,8	1,7	1,7
15. Jasa Pendidikan	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
17. Jasa Lainnya	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Produk Domestik Regional Bruto ADHK	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020



Gambar 2.11 Distribusi Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

2. PDRB per Kapita
PDRB per kapita adalah hasil bagi antara nilai PDRB per tahun dengan jumlah penduduk per tahun. PDRB per kapita mengindikasikan distribusi dan kontribusi PDRB riil terhadap kesejahteraan masyarakat. Perkembangan PDRB

per kapita dapat dilihat pada Gambar 2.12. PDRB per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan.



Gambar 2.12 Perkembangan PDRB dan PDRB per Kapita 2015-2020

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

3. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Berdasarkan data statistik, Sampit merupakan 1 dari 89 kota/kabupaten di Indonesia yang menjadi kota inflasi. Setiap minggu nya secara rutin dilakukan pencacahan lapangan untuk memantau pergerakan harga di Sampit dengan melakukan Survei Harga Konsumen/SHK. Pada tahun 2020, tercatat inflasi

Kota Sampit berada pada angka 1,62. Angka ini menunjukkan terdapat kenaikan harga sebesar 1,62 persen secara umum untuk berbagai komoditas barang dan jasa selama satu tahun. Inflasi bulanan atau month to month inflation tertinggi selama 2020 terjadi pada bulan Juni, sedangkan deflasi terbesar terjadi pada bulan Agustus. Salah satu indikator dalam menilai inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak Januari 2014 IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225-462 komoditas. Data inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan sampel amatan Kota Sampit dapat dilihat pada Tabel 2.19, Tabel 2.20, serta Gambar 2.13.

Tabel 2.19 Indeks Harga Konsumen, Laju Inflasi, dan Inflasi Kota Sampit Tahun 2020

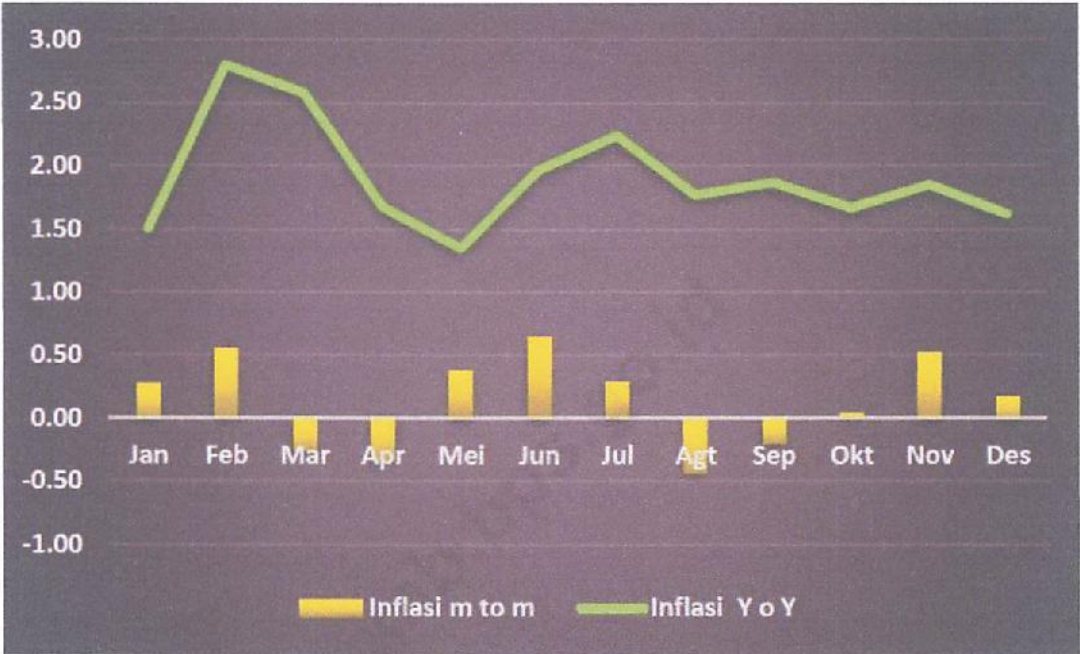
Bulan	IHK	Laju Inflasi (Month to Month / MoM)	Inflasi (Year to Year / YoY)
Januari	104.10	0.27	1.51
Februari	104.67	0.55	2.80
Maret	104.40	-0.26	2.58
April	104.06	-0.33	1.68
Mei	104.44	0.37	1.35
Juni	105.11	0.64	1.97
Juli	105.40	0.28	2.24
Agustus	104.95	-0.43	1.77
September	104.74	-0.20	1.87
Oktober	104.78	0.04	1.67
November	105.32	0.52	1.85
Desember	105.50	0.17	1.60

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.20 Laju Inflasi Kota Sampit menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020

Bulan	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi
Januari	1,14	-	0.13	0.04	0.02	-1,58
Februari	1,23	-0,17	0.14	-0.07	-	0.32
Maret	-0,34	-	-0.01	0.10	-	-1,48
April	-0,37	-0,01	-	-0,02	0,07	-1,16
Mei	0.54	0.01	-0.04	-0.22	0.09	1,53
Juni	1,74	-	0.01	0.33	-	-0,46
Juli	-0,61	0.48	-0.53	0.74	0.01	3,84
Agustus	-1,41	-0,09	-0.33	-0,32	0.04	-0,03
September	-0,56	0,10	-0,07	0.05	0.05	-0,56
Oktober	0.31	-0,05	-0.02	0.15	-	-0.73
November	0.89	-	0.35	-0.24	0.12	1,12
Desember	0.30	-0,03	0.02	0.04	0.03	0.50

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021



Gambar 2.13 IHK, Laju Inflasi MoM dan Inflasi YoY tahun 2020
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin terbanyak Provinsi Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat tahun 2020 sebanyak 26,64 ribu jiwa atau 5,62 persen dari total keseluruhan penduduk miskin di Kalimantan Tengah sebanyak 132,94 ribu jiwa. Angka penduduk miskin Kalimantan Tengah ini menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 139,93 ribu jiwa. Adapun garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sebesar 485.635 rupiah. Hal ini menggambarkan terjadi penurunan secara kuantitas dan distribusi persentase (Tabel 21).

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten-Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Kabupaten-Kota	Penduduk Miskin (Ribuk Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	14.11	13.27	12.90	12.76	11.46
2	Kotawaringin Timur	27.39	27.70	28.2	27.38	26.64
3	Kapuas	19.96	18.80	18.52	18.23	18.17
4	Barito Selatan	6.09	5.95	6.16	5.99	6.12
5	Barito Utara	6.90	6.72	6.50	6.46	6.78
6	Sukamara	2.12	1.99	1.96	2.01	2.13
7	Lamandau	2.88	2.74	2.52	2.47	2.61
8	Seruyan	14.57	14.04	14.56	14.66	14.53
9	Katingan	10.10	9.51	8.73	8.51	8.23
10	Pulang Pisau	6.88	6.54	5.71	5.39	5.21
11	Gunung Mas	6.55	6.67	5.96	5.86	5.78
12	Barito Timur	8.88	8.56	8.05	7.97	7.88
13	Murung Raya	7.10	6.75	7.39	7.21	7.18
14	Palangka Raya	9.96	9.91	9.78	9.69	10.23
Kalimantan Tengah		143.49	139.16	136.93	134.59	132.94

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

BPS menghitung kemiskinan dengan melakukan pendekatan berbeda untuk mengetahui kualitas kehidupan masyarakat Kotawaringin Timur yang dihimpun dalam Indeks Pembangunan Manusia/IPM. IPM Kotawaringin Timur mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,31. Angka ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Kotawaringin Timur telah memasuki kategori IPM tinggi. Sedangkan untuk indikator kemiskinan lain seperti Garis Kemiskinan dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 angka nya sebesar Rp. 446.039 rupiah dan 5,62 persen. Indikator-indikator kemiskinan berupa garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2011-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Jumlah BBLR di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK)	Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK)
			Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)		
1	2011	261.807	28.38	7.43	0.74	0.12
2	2012	281.887	27.49	6.9	0.55	0.07
3	2013	300.929	27.96	6.85	0.71	0.12
4	2014	312.262	27.94	6.67	0.58	0.11
5	2015	325.234	27.26	6.42	0.61	0.10
6	2016	353.640	27.39	6.32	0.8	0.18
7	2017	381.776	27.70	6.24	0.76	0.17
8	2018	393.474	28.20	6.21	0.75	0.15
9	2019	416.777	27,38	5,90	0,92	0,24
10	2020	446.039	26,64	5,62	0,87	0,16

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Status kesejahteraan keluarga dan individu berdasarkan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Status Kesejahteraan Keluarga Dan Individu

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
	D1	D2	D3	D4	Total	D1	D2	D3	D4	Total
Mentaya Hilir Selatan	130	819	1.207	760	2.916	680	3.192	3.935	1.590	9.397
Teluk Sampit	81	567	638	210	1.496	451	2.454	1.962	429	5.296
Pulau Hanaut	201	848	962	495	2.506	1.132	3.579	3.092	1.031	8.834
Mentawa Baru/Ketapang	59	427	1.004	1.151	2.641	353	2.101	4.163	3.353	9.970
Seranau	213	703	679	339	1.934	1.078	2.686	2.242	822	6.828
Mentaya Hilir Utara	58	393	581	401	1.433	339	1.787	2.132	1.073	5.331
Kota Besi	206	659	682	397	1.944	1.136	2.692	2.420	1.150	7.398
Telawang	8	71	136	152	367	48	374	567	327	1.316
Baamang	28	342	909	1.198	2.477	165	1.780	3.901	3.699	9.545
Cempaga	118	567	669	393	1.747	685	2.555	2.344	869	6.453
Cempaga Hulu	46	301	628	450	1.425	288	1.538	2.471	1.173	5.470
Parenggean	19	153	423	709	1.304	111	663	1.669	2.137	4.580
Tualan Hulu	5	84	310	447	846	36	385	1.130	1.397	2.948

Mentaya Hulu	90	371	405	268	1.134	563	1.783	1.564	778	4.688
Bukit Santuai	148	373	169	67	757	947	1.418	389	224	2.978
Antang Kalang	81	451	447	467	1.446	487	1.932	1.429	1.358	5.206
Telaga Antang	36	280	565	807	1.688	224	1.389	2.354	2.470	6.437
Total	1.527	7.409	10.414	8.711	28.061	8.723	32.308	37.764	23.880	102.675

Sumber: TNP2K, 2020

Catatan

- Desil 1: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
- Desil 2: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11%-20% terendah di Indonesia)
- Desil 3: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21%-30% terendah di Indonesia)
- Desil 4: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31%-40% terendah di Indonesia)

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan sosial sehingga warganya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

1. Aspek Pembangunan Manusia

Indikator kesejahteraan manusia salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia/IPM. IPM merupakan indikator makro yang mencerminkan capaian pembangunan manusia di bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. IPM Kotawaringin Timur mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,31. Angka ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Kotawaringin Timur telah memasuki kategori IPM tinggi. Sedangkan untuk indikator kemiskinan lain seperti Garis Kemiskinan dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 angka nya sebesar Rp. 446.039 rupiah dan 5,62 persen. Sedangkan Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 1-0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah. IPM dan Koefisien Gini Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 24-26

Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 -2020

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	71,13	72,11	72,46	72,85	72.87
2	Kotawaringin Timur	69,42	70,17	70,56	71,16	71.31
3	Kapuas	66.98	68.04	68.68	69.38	69.48
4	Barito Selatan	69.00	69.73	69.73	70.10	70.22
5	Barito Utara	68.28	69.72	69.72	70.52	70.59
6	Sukamara	66.40	66.98	67.52	67.95	68.03
7	Lamandau	68.54	69.17	69.70	70.51	70.51
8	Seruyan	65.40	66.14	67.04	67.57	67.58
9	Katingan	67.41	69.56	67.97	68.55	68.68
10	Pulang Pisau	66.49	67.00	67.54	68.32	68.45
11	Gunung Mas	69.73	69.95	70.23	70.65	70.81
12	Barito Timur	70.33	70.57	70.82	71.34	71.39
13	Murung Raya	66.96	67.16	67.56	67.89	67.98
14	Palangkaraya	79.21	79.69	80.34	80.77	80.77
Kalimantan Tengah		69.79	67.41	70.52	70.91	71.05

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur 2011-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peringkat se-Kalimantan Tengah
2011	65,60	6
2012	66,61	5
2013	67,95	4
2014	68,45	4
2015	68,61	5
2016	69,42	5
2017	70,17	4
2018	70,56	4
2019	71,16	4
2020	71,31	4

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.26 Koefisien Gini Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2021

Tahun	Koefisien Gini (IPM)	Klasifikasi	Keterangan
2015	0.28	Ketimpangan pendapatan rendah	Kondisi awal/nilai dasar
2016	0.32	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian
2017	0.35	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian
2018	≤ 0.35	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian
2019	≤ 0.35	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian
2020	≤ 0.35	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian
2021	≤ 0.35	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian

Sumber : RPJMD Kab. Kotim, 2016-2021

a. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

IPM dari aspek pendidikan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam rangka memberikan pendidikan kepada semua penduduk adalah memberantas buta aksara. Adapun data series tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif Tercatat Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebesar 98,83 atau menurun 0,52 dari tahun sebelumnya sebesar 99,35. Angka ini menunjukkan bahwa hanya kurang dari 1 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf. Data indikator melek huruf dapat dilihat pada Gambar 2.6. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan Indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia yang merepresentasikan kemajuan perkembangan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.27.



Gambar 2.14 Dinamika Melek Huruf Usia 15+ Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.27 Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah
2011	10,47	7,39
2012	10,89	7,48
2013	11,82	7,59
2014	12,04	7,69
2015	12,05	7,70
2016	12,21	7,88
2017	12,59	7,89
2018	12,68	7,90
2019	12,69	8,12
2020	12,84	8,13

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

b. Umur Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Data harapan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur ditunjukkan dalam umur harapan hidup yang berkisar pada rata-rata 69 tahun. Hingga tahun 2020 umur harapan hidup terus meningkat (Gambar 2.15).



Gambar 2.15 Dinamika Umur Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

c. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2020 sebesar 49.97 persen diantaranya

adalah kelompok barang makanan dan 50.03 persen lainnya adalah kelompok bukan makanan. Dari kelompok barang makanan, komponen paling besar dalam pengeluaran per kapita adalah makanan minuman jadi yaitu sebesar 12,75 persen diikuti oleh Tembakau dan siri 6,25 persen dan padi-padian 5,85 persen. Masuknya tembakau/sirih kedalam 3 pengeluaran makanan teratas menjadi indikasi bahwa banyaknya penduduk yang mengkonsumsi rokok dalam kesehariannya, bahkan pengeluarannya mengalahkan padi-padian seperti beras yang diketahui sebagai makanan pokok mayoritas penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara untuk kelompok bukan makanan, komponen pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan, bahan bakar, penerangan dan air yaitu sebesar 27,76 persen. Angka ini turun 2,66 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 30,42 persen (Tabel 2.28-2.30 dan Gambar 2.16).

Tabel 2.28 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020

Golongan Pengeluaran	Kelompok Barang (Rupiah)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
300.000–499.999	217.747	186.096	403.844
500.000—749.999	366.447	287.053	653.500
750.000—999.999	489.884	368.446	858.330
1.000.000—1.499.999	643.663	560.826	1.204.489
1.500.000+	1.074.678	1.379.309	2.453.987
Kotawaringin Timur	619.957	620.683	1.240.640

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.29 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020

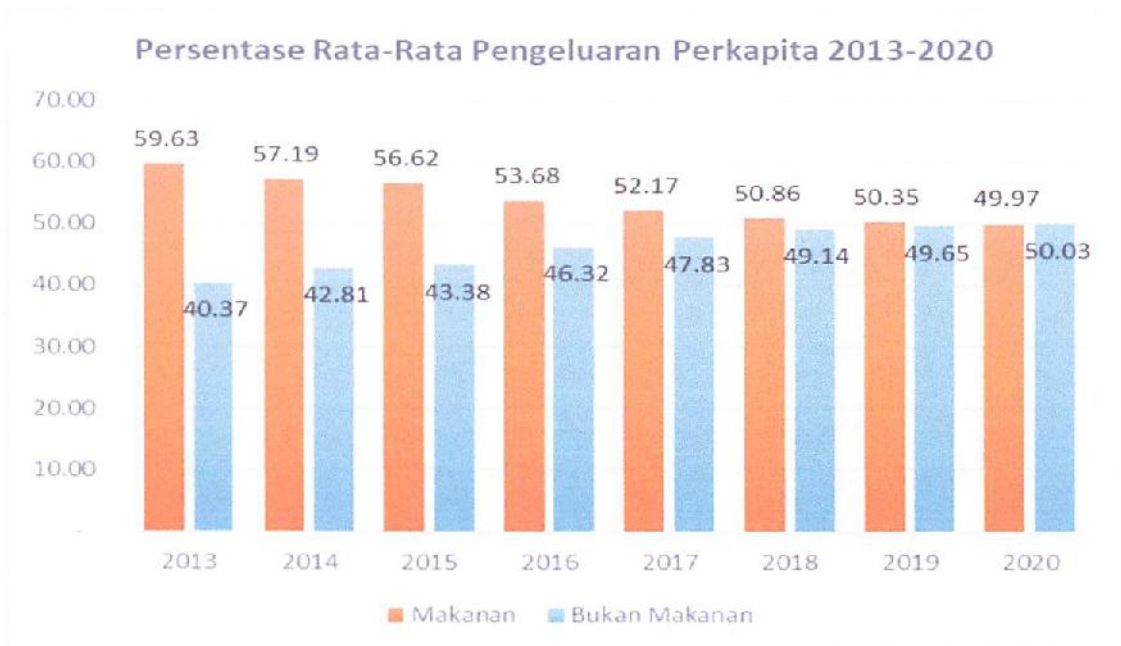
Golongan Pengeluaran	Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan		
	2018	2019	2020
Padi-padian	6.54	6.08	5.85
Umbi-umbian	0.31	0.37	0.35
Ikan	6.11	5.75	5.36
Daging	2.55	2.62	2.51
Telur dan Susu	3.71	3.12	3.47
Sayur-sayuran	3.89	3.59	4.10
Kacang-kacangan	1.01	0.89	1,06
Buah-buahan	2.24	2.13	2.59
Minyak dan lemak	1.32	1.19	1.19
Bahan minuman	1.90	1.61	1.97
Bumbu-bumbuan	1.37	1.21	1.31
Konsumsi lainnya	1.38	1.08	1.19
Makanan dan minuman jadi	11.64	13.70	12.75
Tembakau dan sirih	6.89	7.02	6.25
Kotawaringain Timur	52.17	50.35	49.97

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.30 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020

Golongan Pengeluaran	Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan		
	2018	2019	2020
Perumahan, bahan bakar, penerangan air	25.41	30.42	27.76
Aneka barang dan jasa	11.12	10.04	11.89
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2.25	2.59	2.32
Barang yang tahan lama	4.77	3.05	3.20
Pajak pemakaian dan premi asuransi	2.92	2.46	3.35
Keperluan pesta dan upacara	2.68	1.09	1.51
Kotawaringin Timur	47.83	49.65	50.03

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021



Gambar 2.16 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013-2020

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Nominal pengeluaran rata-rata konsumsi penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 sebesar 1.240.640 rupiah dengan pengeluaran makanan sebesar 619.957 rupiah dan bukan makanan 620.683 rupiah. Jika diperhatikan dari data tahun ke tahun, terlihat bahwa ada pergeseran komponen pengeluaran per kapita dari bahan makanan menjadi bahan bukan makanan. Secara teori kultur penduduk dengan komposisi pengeluaran non makanan yang semakin besar menandakan bahwa kemampuan ekonominya semakin membaik. Hal ini dikarenakan bahan makanan bukan lagi menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam rumah tangga nya.

2. Aspek Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase pengangguran jika dibandingkan dengan tahun 2019. Besar peningkatannya adalah 0,78 persen atau dari 4,47 persen di tahun 2019 menjadi 5,25 persen di tahun 2020. Namun hal ini sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK yang justru menurun dari 67,45 menjadi 67,41. TPAK menunjukan nilai rasio antara penduduk yang bekerja dengan penduduk usia 15 tahun keatas secara keseluruhan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja menurun dari tahun sebelumnya. Adapun menurut jenis kelaminnya, angka TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Nilainya hampir dua kali lipat yaitu 85,04 sedangkan TPAK perempuan hanya 46,02. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Kotawaringin Timur banyak yang tidak bekerja jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki yang tidak bekerja. Apabila dikaji lebih dalam, hal ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 terjadi lonjakan TPT Perempuan, hal ini merupakan indikasi yang jelas bahwa daya saing angkatan kerja perempuan sangat rentan terhadap terjadinya COVID-19. Statistik aspek ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.31 dan Tabel 2.32.

Tabel 2.31 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
Jiwa	Angkatan Kerja			
	Bekerja	149.074	68.855	217.929
	Pengangguran Terbuka	6.293	5.783	12.076
	Sub Total	155.367	74.638	230.005
	Bukan Angkatan Kerja			
	Sekolah	12.007	11.148	23.155
	Mengurus Rumah Tangga	4.263	71.180	75.443
	Lainnya	8.938	3.660	12.598
	Sub Total	25.208	85.988	111.196
	Total	180.575	160.626	341.201

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
Persen	TPAK	85.04	47.02	67.41
	TPT	4,05	7,75	5,25

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.32 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020

Kegiatan Utama		Tahun		
		2018	2019	2020
Jiwa	Angkatan Kerja			
	Bekerja	217.556	220.036	217.929
	Pengangguran Terbuka	10.362	10.287	12.076
	Sub Total	227.918	230.323	230.005
	Bukan Angkatan Kerja			
	Sekolah	22.698	32.325	23.155
	Mengurus Rumah Tangga	71.580	69.882	75.443
	Lainnya	10.490	8.961	12.598
	Sub Total	104.768	111.168	111.196
	Total	332.686	341.491	341.201
Persen	TPAK	68.51	67.45	67.41
	TPT	4.55	4.47	5,25

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Berdasarkan data-data tersebut, dapat dilihat angkatan kerja Kabupaten Kotawaringin Timur terus meningkat seiring dengan peningkatan TPAK dan penurunan TPT. Hal ini mengindikasikan aspek ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur terus menunjukkan tren positif selama kurun waktu 2018-2020. Ketenagakerjaan dibahas secara mendalam berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33 Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja				Bukan Angkatan Kerja	Pencari Kerja Terdaftar	Persentase Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Persentase Bekerja			
≤ Sekolah Dasar (SD)	92.495	2.471	94.966	97,40	48.526	143.492	66,18
Sekolah Menengah Pertama	45.533	1.785	47.318	96,23	31.639	78.957	59,93
Sekolah Menengah Atas	59.050	5.673	64.723	91,23	28.529	93.252	69,41
Perguruan Tinggi	20.851	2.147	22.998	90,66	2.502	25.500	90,19
Kotawaringin Timur	217.929	12.076	230.005	94,75	111.196	341.201	67,41

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Berdasarkan lapangan pekerjaan utamanya, penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Kotawaringin Timur masih didominasi oleh lapangan pekerjaan utama Jasa. Jumlahnya cukup jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lain yaitu sebesar 99.972 jiwa disusul oleh lapangan pekerjaan utama Pertanian yang berjumlah 84.658 jiwa serta terakhir lapangan pekerjaan utama Industri yang berjumlah 33.299 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih signifikannya jasa dalam menopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menurut status pekerjaannya, penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Kotawaringin Timur 2020 mayoritas adalah buruh/karyawan/pegawai. Sebesar 93.387 penduduk 15 tahun keatas yang bekerja adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai. Adapun jumlah yang berusaha sendiri ada pada urutan kedua dengan 47.337 dan ketiga berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar dengan 28.137. Hal ini menunjukkan mulai tertariknya masyarakat untuk mengembangkan usaha sendiri/berwirausaha sendiri. Jika trend ini bisa terus dikembangkan akan memberikan dampak perekonomian yang lebih kuat dan pembukaan lapangan usaha yang lebih luas untuk penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.34 Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin (jiwa)			Upah Pekerja Formal (Rp)	Upah Pekerja Informal (Rp)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
Pertanian	65.205	19.453	2.278.328	2.278.328	1.500.226
Industri	28.856	4.443	2.652.308	2.652.308	2.225.552
Jasa	55.013	44.959	2.554.568	2.554.568	2.262.775
Kotawaringin Timur	149.074	68.855	2.493.878	2.493.878	1.878.880

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

2.2.3. Fokus Kebudayaan

Pembangunan urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan agar setiap komponen masyarakat tetap memegang teguh kearifan lokal dalam setiap aspek aktivitas kehidupannya. Indikator capaian pembangunan urusan kebudayaan adalah melalui jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Tabel 2.35).

Tabel 2.35 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kebudayaan 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Event yang diikuti dan diselenggarakan)	18	14	18	14	1
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan	3	3	4	4	4

	Budaya					
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	33	33	33	33

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2020

Pada tahun 2020 event yang diselenggarakan hanya 1 (satu) karena pada bulan Maret mulai kasus Covid-19 masuk ke Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai dari itu dilakukan kebijakan pembatalan terkait event-event yang rencana akan dilaksanakan, adapun sarana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa sanggar seni sampai tahun 2020 ada 4 (empat) buah yang rata-rata berada di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, sedangkan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sampai tahun 2020 yang dilestarikan tetap 33 (tiga puluh tiga) yang tersebar di beberapa kecamatan.

2.2.4 Fokus Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Ketersediaan fasilitas olahraga menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Menurut data Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur jumlah fasilitas olahraga tahun 2020 sebanyak 292 unit. Jumlah ini terdiri dari bangunan fisik berupa lapangan, gedung serbaguna, kolam renang, sangar senam sampai dengan taman bermain. Terhitung sejak 2020, beberapa fasilitas olahraga yang berskala kecil seperti lapangan tenis meja tidak lagi masuk dalam kategori aset fasilitas olahraga dengan alasan mudah mengalami kerusakan dan tidak bertahan lama. Data fasilitas olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.36. Indikator capaian pembangunan urusan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.36 Fasilitas Olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Fasilitas Olahraga	Jumlah
1	Gedung Serba Guna	1
2	Lapangan Voli	103
3	Lapangan Basket	5
4	Lapangan Sepak Bola	96
5	Lapangan Bulu Tangkis	42
6	Taman Bermain	4
7	Tenis Meja	8
8	Sanggar Senam	5

9	Lapangan Golf	1
10	Kolam Renang	4
12	Lapangan Futsal	12
13	Lapangan Tenis	7
14	Lapangan Takraw	4
Kotawaringin Timur		292

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga. 202 dan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021.

Tabel 2.37 Indikator Capaian Urusan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Olahraga	23	23	24	24	24
2	Jumlah Kegiatan/Even Olahraga	3	4	2	2	2
3	Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1
5	Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
6	Jumlah Gedung Olahraga Milik Swasta	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga. 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pendidikan

Indikator pembangunan pendidikan kabupaten didasarkan pada Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APK Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

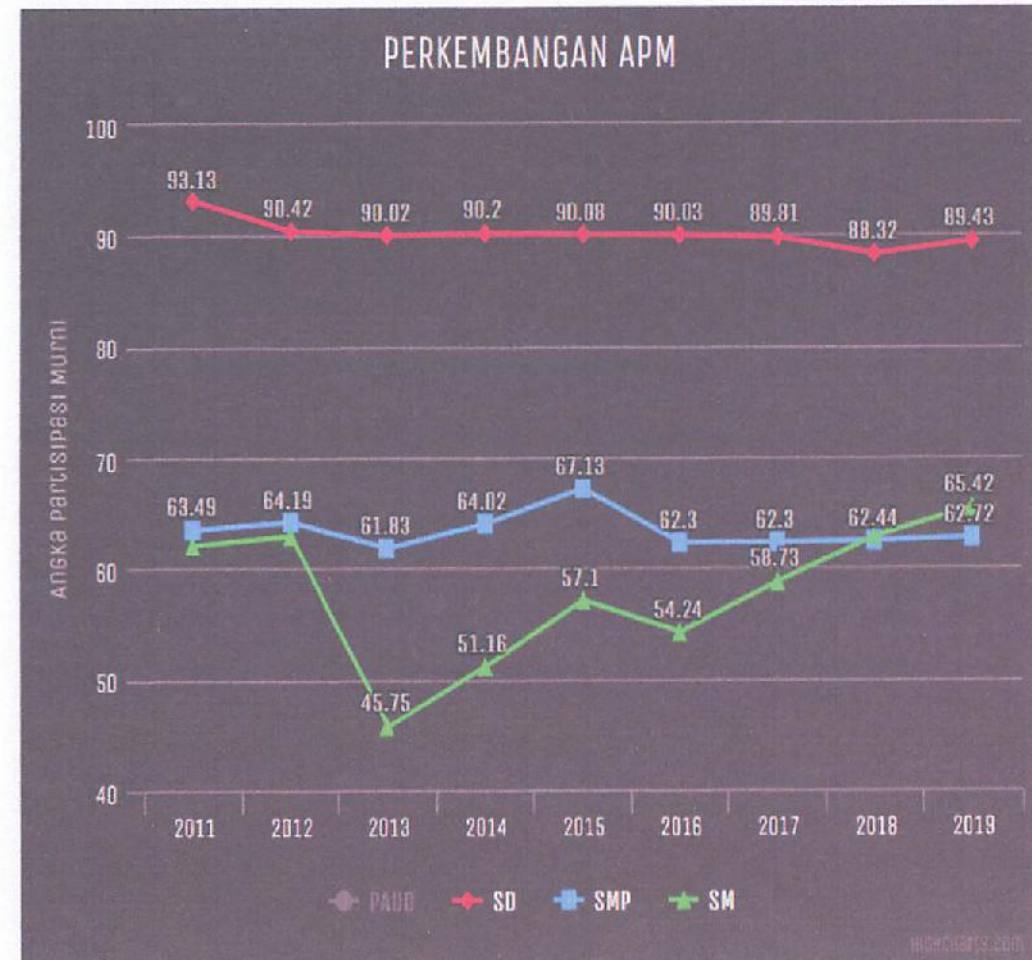
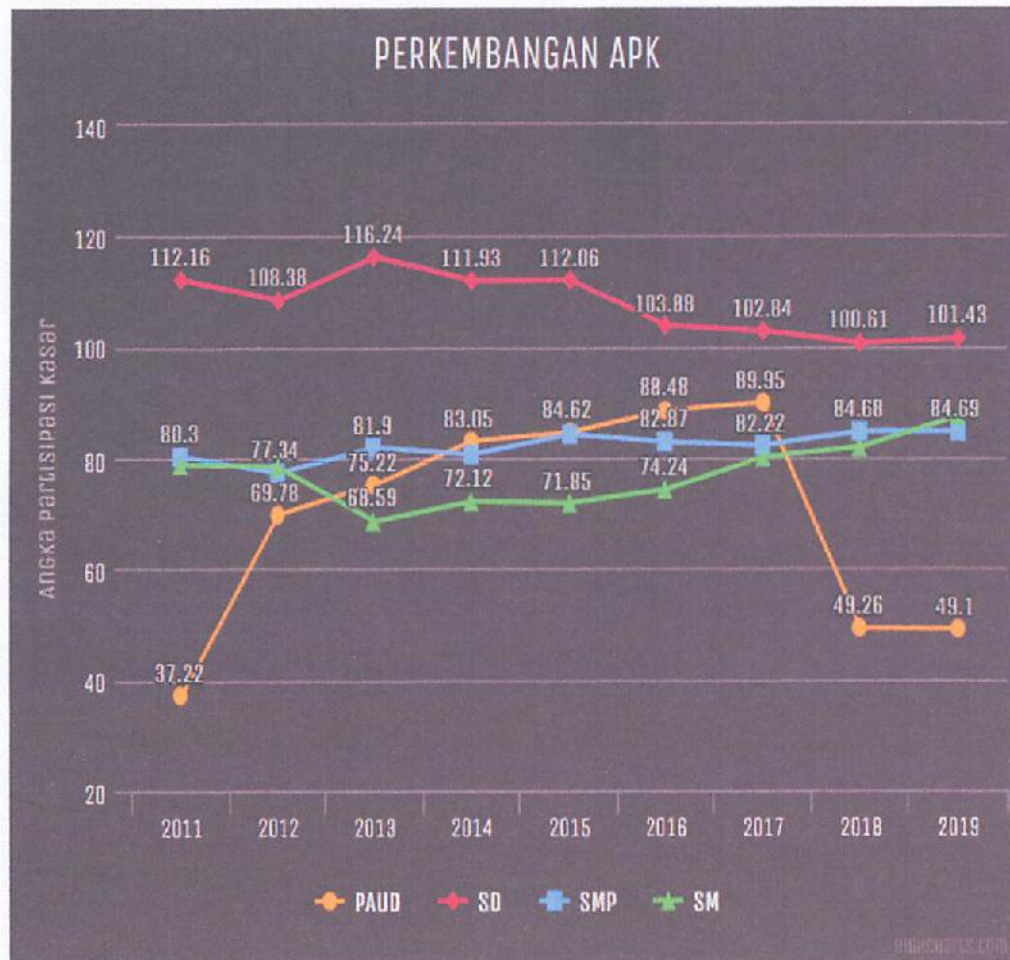
APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. - Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. - Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia

sekolah yang seharusnya. APM dan APK Kabupaten Kotawaringin Timur untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat Tabel 2.38.

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

Tabel 2.36 Angka Partisipasi Istimewa (API I) dan Angka Partisipasi Kasar (API K) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020											
Jenjang Pendidikan		APM Net Enrollment Rate					APK Gross Enrollment Rate				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
PAUD		19.84	27.77	29.80	29.80	29.80	88.48	89.95	49.26	49.10	49.10
SD/MI		90.03	89.81	88.32	89.43	97.92	103.88	102.84	100.61	101.43	104.66
SMP/MTs		62.30	62.30	62.44	62.72	77.95	82.87	82.22	84.68	84.69	92.83
SMA/SMK/MA		54.24	58.73	62.82	65.42	47.28	74.24	80.14	81.9	87.38	75.04
No	Aspek	2016		2017		2018	2019		2020		
PENDIDIKAN DASAR											
a.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)										
	SD/MI (%)	97.10		97.50		97.60	98.00		98.90		
	SMP/MTS (%)	91.67		92.52		92.70	93.00		98.99		
b.	Usia 7 -12 Tahun (Jumlah)	43.289		43.291		43.294	43.297		43.297		
c.	Usia 13 - 15 Tahun (Jumlah)	14.430		14.431		14.433	14.435		14.435		
d.	Anak Putus Sekolah SD (%)	0.38		0.33		0.28	0.23		0.23		
e.	Anak Putus Sekolah SMP (%)	0.41		0.36		0.31	0.26		0.26		
f.	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata-rata	1:30		1:30		1:25	1:23		1:23		
g.	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata-rata Pendidikan Dasar	1:20		1:20		1:20	1:20		1:20		
No	Aspek	2016		2017		2018	2019		2020		
PENDIDIKAN MENENGAH											
a.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)										
	APS SMA/MA (Usia 16 – 18 Tahun) (%)	60.28		63.68		85,00	99.20		57.03		
b.	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata - rata	1:16		1:16		1:16	1:16		1:16		
c.	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata – rata Pendidikan Menengah	1:20		1:20		1:20	1:20		1:20		

Sumber: <http://apkpm.data.kemdikbud.go.id>, 2021, Dinas Pendidikan Kab. Kotim. 2021



Gambar 2.17 Perkembangan APM dan APK Kabupaten Kotawaringin Timur
 Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id> . 2020

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD terdiri atas Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), serta Satuan PAUD Sejenis (SPS). Data jumlah satuan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Timur per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39 Jumlah Satuan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	TK/RA			KB			TPA			SPS			Total
	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	
Mentaya Hilir Selatan	0	17	17	0	3	3	0	0	0	0	0	0	20
Teluk Sampit	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Pulau Hanaut	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Mentawa Baru/Ketapang	1	53	54	0	12	12	0	1	1	0	1	1	68
Seranau	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Mentaya Hilir Utara	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12
Kota Besi	1	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Telawang	1	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Baamang	0	30	30	0	11	11	0	1	1	0	0	0	42
Cempaga	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14
Cempaga Hulu	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Parenggean	1	29	30	0	4	4	0	0	0	0	3	3	37
Tualan Hulu	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13
Mentaya Hulu	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21
Bukit Santuai	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Antang Kalang	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Telaga Antang	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021

b. Sekolah Dasar

Sekolah dasar terdiri atas sekolah dasar reguler (SD) dan satuan pendidikan kerjasama sekolah dasar (SPK SD) baik negeri maupun swasta, serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta. Data jumlah satuan sekolah dasar di Kabupaten Kotawaringin Timur per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40 Jumlah Satuan SD di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	SD + SPK SD			MI			Total
	N	S	Jml	N	S	Jml	
Mentaya Hilir Selatan	22	1	23	0	5	5	28
Teluk Sampit	10	0	10	0	1	1	11
Pulau Hanaut	19	0	19	0	5	5	24

Kecamatan	SD + SPK SD			MI			Total
	N	S	Jml	N	S	Jml	
Mentaya Hilir Selatan	22	1	23	0	5	5	28
Mentawa Baru/Ketapang	34	9	43	1	3	4	47
Seranau	12	1	13	0	1	1	14
Mentaya Hilir Utara	13	2	15	0	2	2	17
Kota Besi	20	0	20	0	0	0	20
Telawang	15	4	19	0	0	0	19
Baamang	21	2	23	0	2	2	25
Cempaga	21	2	23	1	2	3	26
Cempaga Hulu	20	4	24	0	2	2	26
Parenggean	21	2	23	0	1	1	24
Tualan Hulu	11	6	17	0	0	0	17
Mentaya Hulu	22	12	34	0	2	2	36
Bukit Santuai	12	5	17	0	0	0	17
Antang Kalang	16	4	20	0	2	2	22
Telaga Antang	18	3	21	0	0	0	21
Kotawaringin Timur	307	57	364	2	28	30	394

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021 Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Pengukuran kualitas pendidikan didasarkan pada 2 (dua) metode yaitu Rasio ketersediaan sekolah dasar dengan jumlah murid, dan Rasio guru-murid. Rasio ketersediaan sekolah dasar dengan jumlah murid sebagai indikator kemampuan unit sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dengan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sekolah / Jumlah Murid	Jumlah Murid	54.814	54.745	53.879	53.470	51.890
	Jumlah Sekolah	368	369	369	397	394
	Rasio (%)	149.0	148.4	146.0	134.7	131,7

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Rasio guru-murid sebagai indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar, semakin rendah rasionya maka semakin baik karena menggambarkan intensifitas kegiatan belajar mengajar. Rasio guru-murid pada Tabel 2.42

Tabel 2.42 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dengan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Guru-Murid	Jumlah Guru	3.448	3.108	3.188	3.142	3.170
	Jumlah Murid	54.814	54.745	53.879	53.470	51.890
	Rasio	15	17	16	17	17

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

c. Sekolah Menengah Pertama

Sekolah menengah pertama terdiri atas sekolah menengah pertama reguler (SMP) dan satuan pendidikan kerjasama sekolah menengah pertama (SPK SMP) baik negeri maupun swasta, serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta. Data jumlah satuan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43 Jumlah Satuan SMP di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	SMP + SPK SMP			MTs			Total
	N	S	Jml	N	S	Jml	
Mentaya Hilir Selatan	3	1	4	1	2	3	7
Teluk Sampit	4	0	4	0	1	1	5
Pulau Hanaut	6	0	6	0	1	1	7
Mentawa Baru/Ketapang	6	8	14	1	3	4	18
Seranau	4	1	5	0	0	0	5
Mentaya Hilir Utara	3	2	5	0	0	0	5
Kota Besi	5	1	6	0	1	1	7
Telawang	4	3	7	0	1	1	8
Baamang	5	3	8	0	3	3	11
Cempaga	4	0	4	0	1	1	5
Cempaga Hulu	5	2	7	0	1	1	8
Parenggean	8	1	9	0	2	2	11
Tualan Hulu	2	1	3	0	0	0	3
Mentaya Hulu	5	4	9	0	1	1	10
Bukit Santuai	2	2	4	0	0	0	4
Antang Kalang	7	0	7	0	0	0	7
Telaga Antang	4	1	5	0	1	1	6
Kotawaringin Timur	77	30	107	2	18	20	127

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021 Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Pengukuran kualitas pendidikan didasarkan pada 2 (dua) metode yaitu Rasio ketersediaan sekolah dasar dengan jumlah murid, dan Rasio guru-murid. Rasio ketersediaan sekolah menengah pertama dengan jumlah murid sebagai indikator kemampuan unit sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan menengah pertama dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sekolah / Jumlah Murid	Jumlah Murid	18.124	18.504	18.597	18.888	23.682
	Jumlah Sekolah	108	109	108	127	128
	Rasio (%)	167.8	169.8	172.2	148.7	185,0

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Rasio guru-murid sebagai indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar, semakin rendah rasionya maka semakin baik karena menggambarkan intensifitas kegiatan belajar mengajar. Rasio guru-murid pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Guru-Murid	Jumlah Guru	1.219	1.132	1.115	1.121	1.405
	Jumlah Murid	18.124	18.504	18.597	18.888	23.682
	Rasio	14.9	16.3	16.7	16.8	16,0

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

- d. Sekolah Menengah Atas
- Sekolah menengah atas terdiri atas sekolah menengah pertama reguler (SMA) dan satuan pendidikan kerjasama sekolah menengah pertama (SPK SMA) baik negeri maupun swasta, serta Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta. Data jumlah satuan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46 Jumlah Satuan SMA di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	SMA + SPK SMA			MA			Total
	N	S	Jml	N	S	Jml	
Mentaya Hilir Selatan	2	1	3	0	2	2	5
Teluk Sampit	1	0	1	0	0	0	1
Pulau Hanaut	1	1	2	0	0	0	2
Mentawa Baru/Ketapang	5	6	11	1	1	2	13
Seranau	0	2	2	0	0	0	2
Mentaya Hilir Utara	1	0	1	0	0	0	1
Kota Besi	2	0	2	0	0	0	2
Telawang	1	0	1	0	0	0	1
Baamang	3	4	7	0	1	1	8
Cempaga	2	0	2	0	0	0	2
Cempaga Hulu	2	0	2	0	0	0	2
Parenggean	1	2	3	0	1	1	4
Tualan Hulu	0	0	0	0	0	0	0
Mentaya Hulu	3	2	5	0	0	0	5
Bukit Santuai	1	0	1	0	0	0	1
Antang Kalang	2	1	3	0	0	0	3
Telaga Antang	0	1	1	0	0	0	1
Kotawaringin Timur	27	20	47	1	5	6	53

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021 Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Pengukuran kualitas pendidikan didasarkan pada 2 (dua) metode yaitu Rasio ketersediaan sekolah dasar dengan jumlah murid, dan Rasio guru-murid. Rasio ketersediaan sekolah menengah atas dengan jumlah murid sebagai indikator kemampuan unit sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan menengah atas dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Atas dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sekolah / Jumlah	Jumlah Murid	7.131	7.596	7.712	7.669	9.547
	Jumlah Sekolah	21	22	22	29	29

Murid	Rasio (%)	339.6	345.3	350.5	264.4	329,2
-------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Rasio guru-murid sebagai indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar, semakin rendah rasionya maka semakin baik karena menggambarkan intensifitas kegiatan belajar mengajar. Rasio guru-murid pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Atas dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Guru-Murid	Jumlah Guru	465	468	465	475	583
	Jumlah Murid	7.131	7.596	7.712	7.669	9.547
	Rasio	15.3	16.2	16.6	16.1	16,3

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

- e. Angka Melanjutkan (AM)
- Angka Melanjutkan (AM) ini adalah seberapa besar persentase siswa yang melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Indikator AM adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase (Tabel 2.49).

Tabel 2.49 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan (AM)	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	97.91	98.91	98.95	98.96	98.98

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

- f. Fasilitas Pendidikan
- Kondisi sekolah khususnya ruang kelas menjadi indikator kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai tingkatan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Data kondisi fasilitas pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50 Perkembangan Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Kondisi Ruang Kelas Bangunan Baik	Sekolah PAUD (%)	87	88	80	90	91
	Sekolah Pendidikan SD/MI (%)	73	74	75	76	77
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs (%)	64,50	66,00	67,50	69,00	69,50
	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA (%)	70	78	80	86	88

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

g. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Kualifikasi tenaga pendidik dengan pendidikan S1/D-IV/S2/S3 menggambarkan perkembangan kualitas tenaga pendidik sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar. Data kondisi fasilitas pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51 Perkembangan Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Kualifikasi Tenaga Pendidik	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/S2/S3 (%)	40,39	45,50	60,00	65,00	69,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

2. Urusan Wajib Kesehatan

Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat pada tahun 2020 jumlah fasilitas kesehatan cenderung meningkat. Jumlah rumah sakit sebanyak 3 unit, puskesmas 21 unit, puskesmas pembantu 145 unit, apotek 11 unit. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, jumlahnya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tercatat 165 dokter, sedangkan tahun 2019 tercatat 124 dokter, perawat dari 593 menjadi 806, tenaga farmasi dari 53 menjadi 83, tenaga kebidanan meningkat dari 314 menjadi 387, dan tenaga ahli gizi sebanyak 101 personel.

Pada tahun 2020 tercatat jumlah dokter yang bekerja di unit kerja rumah sakit yakni sebanyak 76 dokter, sedangkan sisanya bekerja di puskesmas dan klinik atau balai kesehatan. Menurut spesialisasi bidang kedokterannya, sebanyak 34 dokter spesialis dan 99 dokter umum, sisanya adalah dokter gigi sebanyak 22 dokter. Jika dilihat dari persebaran wilayah kerja menurut kecamatannya, maka terlihat bahwa mayoritas tenaga kesehatan masih terpusat di wilayah perkotaan seperti Mentawa Baru Ketapang. Bahkan ada kecamatan yang tidak memiliki dokter yakni Kecamatan Tualan Hulu. Penduduk di kecamatan ini harus menuju ke kecamatan lain untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, data tentang sepuluh penyakit terbanyak selama tahun 2019 diposisi teratas adalah infeksi pernafasan atas akut, tidak terspesifikasi. Penyakit ini menjadi penyakit dengan penderita terbanyak sepanjang tahun beruntun sejak tahun 2016. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kebakaran lahan setiap tahunnya sehingga mengakibatkan asap yang membuat pernafasan terganggu. Sedangkan untuk jumlah kasus lainnya yang paling banyak diderita adalah penyakit hipertensi esensial, sebanyak 11.008 dan pengakit disepsia 5.750 kasus (Tabel 2.53). Adapun

temuan lain dari data Dinas Kesehatan adalah meningkatnya jumlah bayi lahir dengan berat kurang/BBLR dari 149 di tahun 2019 menjadi 171 di tahun 2020, dirujuk 5 orang dan ditemukannya bayi dengan gizi buruk sebanyak 6 orang (Tabel 2.54).

Tabel 2.52 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Pustu	Polindes	Klinik/Balai Kesehatan
1	Mentaya Hilir Selatan	1	-	1	16	7	7	1
2	Teluk Sampit	-	-	1	9	4	2	-
3	Pulau Hanaut	-	-	1	27	11	10	-
4	Mentawa Baru Ketapang	1	1	3	36	9	-	8
5	Seranau	-	-	1	8	5	5	-
6	Mentaya Hilir Utara	-	-	1	14	7	9	4
7	Kota Besi	-	-	1	12	9	6	-
8	Telawang	-	-	1	18	5	7	3
9	Baamang	-	-	2	19	6	-	-
10	Cempaga	-	-	1	20	7	7	-
11	Cempaga Hulu	-	-	1	23	8	9	1
12	Parenggean	1	-	2	20	8	6	2
13	Tualan Hulu	-	-	1	12	9	4	4
14	Mentaya Hulu	-	-	1	24	13	5	4
15	Bukit Santuai	-	-	1	15	11	7	3
16	Antang Kalang	-	-	1	17	12	5	1
17	Telaga Antang	-	-	1	18	14	10	-
Kotawaringin Timur		3	1	21	308	145	99	31

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.53 Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Infeksi pernafasan akut, tidak terspesifikasi	19.973
2	Hipertensi esensial (primer)	11.008
3	Dispepsia	5.750
4	Mialgia	4.006
5	Diare dan gastroenteritis yang diduga disebabkan oleh infeksi	3.712
6	Nasofangitis akut (common cold)	3.180
7	Gastritis akut	2.702
8	Demam tanpa diketahui penyebab	2.660
9	Sakit kepala (pusing)	2.361
10	Dermatitis kontak alergi	2.297

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2020

Tabel 2.54 Jumlah BBLR di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
			Jumlah	Dirujuk	
1	Mentaya Hilir Selatan	544	17	-	-
2	Teluk Sampit	247	3	-	-
3	Pulau Hanaut	421	17	1	-
4	Mentawa Baru Ketapang	2.276	24	2	-
5	Seranau	266	2	-	-
6	Mentaya Hilir Utara	411	5	-	-
7	Kota Besi	417	7	-	-
8	Telawang	412	12	1	3
9	Baamang	1.626	17	-	-
10	Cempaga	574	4	-	1
11	Cempaga Hulu	452	12	1	-
12	Parenggean	625	16	-	-
13	Tualan Hulu	115	1	-	-
14	Mentaya Hulu	412	3	-	2
15	Bukit Santuai	213	15	-	-
16	Antang Kalang	298	5	-	-
17	Telaga Antang	388	11	-	-
Kotawaringin Timur 2020		9.697	171	5	6
2019		9.051	149	3	11
2018		8.580	122	-	5
2017		7.781	89	-	6
2016		9.254	133	-	11

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Indikator capaian urusan kesehatan terdiri atas : 1) rasio posyandu per satuan balita; 2) rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk; 3) rasio rumah sakit per satuan penduduk; 4) rasio dokter per satuan penduduk; 5) rasio tenaga medis per satuan penduduk; 6) cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 7) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 8) Cakupan Desa/keurahan *Universal Child Immunization* (UCI); 9) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam (TBC BTA); 11) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD); 12) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 13) Cakupan kunjungan bayi; 14) cakupan puskesmas; 15) cakupan puskesmas pembantu. Indikator capaian urusan kesehata tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55 Indikator Capaian Urusan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

N o	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu Per Satuan	6.96	7.20	9.46	7.49	8.00

	Balita (per 1000 balita)					
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Dan Pustu Per Satuan Penduduk (per 100.000)	44.81	44.01	44.16	43.16	43.16
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (per 100.000)	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44
4	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	27.68	24.07	23.54	29.14	29.14
5	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	204.56	206.75	197.94	202.67	202.67
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	1.387/2.036	813/2.042	1.333/2.050	1.199/2.053	1.578/2.024
7	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	7.152/9.717	7.276/9.743	8.066/9.819	8.645/9.827	6.513/6.513
8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	111/185	102/185	147/185	121/185	121/185
9	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	11	6	5	11	6
10	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam (TBC BTA)	420/420	473/473	472/472	545/545	545/545
11	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	172/172	129/129	252/252	176/176	176/176

12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	-	-	-	-	-
13	Cakupan Kunjungan Bayi	6.388/9.254	7.005/9.282	7.046/9.598	6.634/9.021	6.634/9.021
14	Cakupan Puskesmas	20/17	21/17	21/17	21/17	21/17
15	Cakupan Puskesmas Pembantu	142/185	142/185	142/185	142/185	142/185
16	Jumlah Penanganan ODGJ	219	334	229	586	586

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Sisi sektor transportasi, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki peranan yang penting khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudahan akses transportasi menjadi sendi sendi utama penggerak perekonomian suatu wilayah. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki semua jalur akses transportasi mulai dari laut, darat dan udara. Pada transportasi darat, tahun 2019 tercatat bahwa panjang jalan yang dikelola pemerintah kabupaten sepanjang 2.024,26 km yang menghubungkan semua kecamatan. Kecamatan dengan panjang jalan terpendek adalah Kecamatan Tualan Hulu yaitu hanya 7,2 kilometer atau hanya 0,3 persen dari keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat hanya 17,51 persen jalan yang telah teraspal. Meskipun persentasenya meningkat dari 2 tahun sebelumnya namun masih sangat kecil dibanding yang belum teraspal. Kondisi kontur tanah gambut menjadi salah satu penghambat pengaspalan jalan. Sedangkan untuk kondisi jalan, masih menurut Dinas PU sebanyak 18,72 persen dalam kondisi baik, sedangkan jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat secara total sebesar 61,64 persen (Tabel 2.56).

Tabel 2.56 Data Jaringan Jalan (Kilometer) di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Panjang Jalan Kabupaten	Perkerasan			Kondisi Jalan			
			Aspal	Tidak di Aspal	Lainnya	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Mentaya Hilir Selatan	185.73	23.54	23.66	140.67	21.34	70.55	89.36	4.20
2	Teluk Sampit	12.75	-	1.65	11.10	30.10	5.95	1.70	2.00
3	Pulau Hanaut	107.92	-	14.50	93.42	-	14.5	33.70	59.72
4	Mentawa Baru Ketapang	247.5	164.93	22.58	64.98	161.77	50.23	23.75	11.75
5	Serantau	82.76	-	9.60	73.16	5.60	32.60	1.40	43.16
6	Mentaya Hilir Utara	152.25	19.75	3.50	129.00	19.25	39.14	85.36	8.50
7	Kota Besi	79.75	5.50	15.10	59.15	14.50	39.10	13.15	13.00
8	Telawang	113.5	20.80	15.59	77.11	46.71	21.00	33.09	12.70
9	Baamang	234.07	80.80	41.34	117.87	89.51	61.83	73.29	9.44
10	Cempaga	65.01	5.45	3.5	42.99	3.75	7.50	9.65	44.11
11	Cempaga Hulu	50.39	5.15	3	42.24	29.92	3.00	13.97	3.50
12	Parenggean	118.11	17.81	12.10	88.20	20.71	33.00	26.30	38.10
13	Tualan Hulu	7.2	-	1	6.20	2.00	4.00	1.20	-
14	Mentaya Hulu	316.55	0.50	39.23	276.82	15.27	58.40	104.37	138.51
15	Bukit Santuai	87.3	-	11.50	75.80	10.70	7.80	32.30	36.50
16	Antang Kalang	145.4	-	36.41	108.99	4.29	37.70	70.69	32.72
17	Telaga Antang	17.87	6.57	1	10.3	-	1.00	15.30	1.57
Kotawaringin Timur		2.024.06	2.024.06	350.79	255.27	1.418.00	448.43	487.30	628.85

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka, 2021

Tabel 2.57 Indikator Capaian Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi baik	242,64	259,13	364,48	371,08	363,34
2	Panjang Jalan dilalui roda 4	1.792.594	1.882.223	1.976,33	2.075,14	2.015,14
3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	647,50	679,87	713,86	749,55	749,55
4	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	669,53	710,93	721,143	726,56	667,53
5	Rumah tinggal bersanitasi	-	51,07	51,16	51,66	71,44
6	Lingkungan Pemukiman	-	-	-	-	-
7	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	1.495	1.458	279	9.800	9.800
8	Jenis Jembatan (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	153	153	153	153	153
	b. Jumlah Jembatan Beton	36	38	38	66	67
	c. Jumlah Jembatan Baja	10	12	12	12	12
9	Panjang Jembatan (meter)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	3.566,5	3.592,5	3.612,5	3.612,5	3.612,5
	b. Jumlah Jembatan Beton	358	365	365	431,5	471,5
	c. Jumlah Jembatan Baja	750	870	750	750	750
10	Jembatan dalam kondisi baik (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	38	40	40	12	153
	b. Jumlah Jembatan Beton	36	38	38	66	67
	c. Jumlah Jembatan Baja	10	12	12	12	12
11	Jembatan dalam kondisi rusak (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	56	54	54	54	54
	b. Jumlah Jembatan Beton	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Jembatan Baja	-	-	-	-	-
12	Rasio jaringan irigasi	0,91	1,66	1,49	1,35	1,32
13	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	17,91	19,69	23,70	24,03	24,03
14	Rumah tangga yang menggunakan air bersih (%)	72,64	76,62	80,11	85,39	85,39
15	Cakupan pelayanan air minum/bersih (Org)	475/469	441/079	436/276	456/409	466/366
16	Penduduk berakses air minum	295/271	320/421	334/264	350/489	389/246
17	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM (KK)	26.050	25.739	26.930	27.941	30.330
18	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	34,97	35,15%	34,95%	35,43%	35,42%
19	Penduduk berakses/terlayani air bersih	145.546	147.274	152.464	157.312	161.646

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021, PDAM Kab. Kotim 2021,

Pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pada umumnya proporsi panjang

jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan pembangunan disegala sektor. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator capaian urusan pekerjaan umum pemerintah daerah Kabupaten Kotawringin Timur yaitu: 1) panjang jalan dalam kondisi baik; 2) Panjang Jalan dilalui roda 4; 3) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4); 4) Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam); 5) Rumah tinggal bersanitasi; 6) Lingkungan Pemukiman; 7) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat; 8) jumlah jembatan kayu, beton, dan baja; 9) panjang jembatan kayu, beton, baja; 10) Jembatan kayu, beton, baja dalam kondisi baik (buah); 11) Jembatan kayu, beton, baja dalam kondisi rusak (buah); 12) rasio jaringan irigasi; 13) luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Kinerja capaian untuk masing-masing indikator hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.57.

4. Urusan Wajib Perumahan

Pemenuhan kebutuhan air bersih, kualitas rumah, dan menjadi indikator dalam melihat perkembangan pembangunan perumahan. Secara umum terjadi peningkatan positif untuk semua indikator di Kabupaten Kotawaringin Timur. Data-data pendukung urusan wajib perumahan dapat dilihat pada Tabel 2.58 dan Tabel 2.59.

Tabel 2.58 Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Rata-Rata Rasio Anggota Keluarga Kab. Kotim	Jumlah Penduduk Kab. Kotim	Standar Kebutuhan Air Bersih per Orang per Hari	Jumlah Kebutuhan Air Bersih Penduduk (Liter/Hari)	Liter/Defik
2015	3.81	426.176	60 Liter/Hari (Permen PU No.14 Tahun 2010)	25.570.560	296
2016		436.276		26.176.560	303
2017		446.094		26.765.640	310
2018		456.409		27.384.540	317
2019		414.463		24.867.780	288

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka tahun 2020; Update Data BPKAD dan BAPPEDA. 2020

Tabel 2.59 Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Kapasitas Terpasang PDAM (L/det)	Debit Produksi PDAM (L/det)
2016	430	315
2017	516	360
2018	595	386

2019	595	466
2020	895	524

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka tahun 2021; Update Data BKAD dan BAPPELITBANGDA. 2021

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Indikator capaian untuk urusan wajib perumahan mencakup: 1) Rumah tangga yang menggunakan air bersih; 2) Cakupan pelayanan air minum/bersih; 3) Penduduk berakses air minum; 4) Rumah Tidak Layak Huni; 5) Kawasan kumuh. Kinerja capaian masing-masing indikator hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60 Indikator Capaian Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tidak Layak Huni	27.601	6.991	25.078	24.497	24.101
2	Kawasan kumuh (Ha)	49,42	41,16	33,60	21,08	12,52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Urusan wajib penataan ruang bertujuan untuk memastikan ruang publik perkotaan dan rencana pembangunan perkotaan berjalan dengan baik dan seimbang dan berkualitas. Indikator capaian urusan penataa ruang yaitu: 1) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; 2) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan; 3) Ruang publik yang berubah peruntukannya. Kinerja capaian indikator urusan wajib penataan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Indikator Capaian Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	-
2	Jumlah IMB yang diterbitkan	459	326	391	742	759
3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	-	-	--	--

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

6. Unsur Penunjang Perencanaan

Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan pentahapan rencana jangka panjang yang berlaku selama 20 tahun melalui Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJP), rencana jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta rencana kerja 1 tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiga dokumen tersebut merupakan indikator kinerja bidang perencanaan pembangunan (Tabel 2.62). Ketiganya dijalankan secara berkesinambungan, dalam arti RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode selanjutnya yaitu periode 2021-2026 merupakan rencana pembangunan yang merefleksikan dan mengakomodir tahapan keempat dari RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan RKPD bertindak sebagai *guidance* tahunan bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai urusan yang didasarkan pada RPJMD yang berlaku.

Tabel 2.62 Indikator Capaian Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

7. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perhubungan

Perhubungan terkait dengan transportasi darat, laut, dan udara yang diselenggarakan urusannya oleh pemerintah. Indikator capaian urusan wajib perhubungan meliputi: 1) Jumlah Arus penumpang angkutan umum; 2) Rasio ijin trayek; 3) Jumlah uji KIR angkutan umum; 4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis; 5) Angkutan darat; 6) Kepemilikan KIR angkutan umum; 7) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR); 8) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum; 9) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (jumlah rambu). Kinerja capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63 Indikator Capaian Urusan Perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)					
	Angkutan sungai	25.356	22.834	160.805	-	-
	Angkutan jalan	26.968	26.968	32.346	35.004	22.976
	Angkutan laut	142.119	104.575	104.512	-	-
	Angkutan udara	257.512	313.622	417.540	-	-
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	424	477	711	1.114	1.059

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Terminal	1	1	1	1	1
	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
	Jumlah Pelabuhan	2	2	2	2	2
5	Angkutan darat					
	Angkutan sungai (unit kapal)	-	5.784	14.007	-	-
	Angkutan jalan (unit)	10.242	10.242	10.878	-	-
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (menit)	30	30	25	25	25
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
9	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (jumlah rambu)	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

8. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Indikator capaian urusan wajib lingkungan hidup meliputi persentase penanganan sampah, persentase penduduk dengan akses air minum, pencemaran status mutu air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, dan penegakkan hukum lingkungan. Kinerja capaian urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penanganan Sampah	*0	58,85	58,68	57,33	57,33
3	Pencemaran status mutu air	**TR	**TR	**TR	**TR	**TR
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan
5	Penegakan hukum lingkungan	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotim

Catatan :

*)Tahun 2016 Penanganan Sampah masih dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Tata Kota dan Kebersihan Sampai dengan Juli 2020

**)TR = Tercemar Ringan

9. Urusan Wajib Pertanahan

Indikator capaian urusan wajib pertanahan meliputi: 1) Persentas luas tanah bersertifikat; 2) Penyelesaian kasus tanah negara; 3) Penyelesaian izin lokasi. Kinerja capaian urusan pertanahan dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65 Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020

1	Persentase luas lahan bersertifikat	1.6	0.17	0.9	0.4	0.4
2	Penyelesaian kasus tanah negara (jumlah kasus)	-	-	16	15	15
3	Penyelesaian izin lokasi (jumlah izin)	4	2	4	11	11

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang Undang No. 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Indikator capaian urusan wajib kependudukan dan catatan sipil meliputi: 1) Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk; 2) Rasio anak berakte kelahiran; 3) Rasio pasangan berakte nikah; 4) Kepemilikan KTP; 5) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; 6) Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten Kotawaringin Timur; 7) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Kinerja capaian urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	108.174	108.025	107.551	106.874	107.060
2	Rasio anak berakte kelahiran	1.026	94.776	107.610	121.356	698
3	Rasio pasangan berakte nikah	128	468	91.000	288.00	1.271
4	Kepemilikan KTP	222.239	283.275	262.879	265.983	265.983
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	8.934	19.907	13.770	14.350	6.800
6	Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten Kotawaringin Timur	406.429	409.502	411.852	214.117	214.938
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	283.806	283.725	280.123	280.162	284.117

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri atas indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Capaiannya hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,14	2,80	2,72	3,03	2,94
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	8,52	8,58	17,90	17,80	20,30
3	Rasio KDRT	0.032	0.038	0.038	0.028	0.022
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	-	-
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	35,00	43,10	43,50	71,12
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100

Sumber : Badan P3AP2KB Kab. Kotim

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja keluarga berencana dan keluarga sejahtera terdiri atas indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga, Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif, Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK.R), Jumlah PKKBD, Jumlah Sub. PKKBD, serta Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68 Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.60	2.50	2.29	2.24	2.24
2.	Rasio akseptor KB	78.1	77.1	74.1	78.3	78.3
3.	Cakupan peserta KB aktif	19.2	21.4	24.6	43.2	43.2
4.	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	16	17	17
5.	Bina Keluarga Balita (BKB)	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	25	27	31
6.	Bina Keluarga Remaja (BKR)	60	70	87	111	424
7.	Bina Keluarga Lansia (BKL)	28	37	50	70	212
8.	UPPKS	11	12	11	14	14
9.	PIK.R	7	10	12	12	12
10.	PKKBD	150	165	166	168	185
11.	Sub. PKKBD	120	120	120	125	118
12.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2	3	4	4	3

Sumber : Badan P3AP2KB Kab. Kotim

13. Sosial

Kinerja bidang sosial terdiri atas indikator ketersediaan panti asuhan, jumlah penerima bansos, serta jumlah kegiatan Penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69 Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sarana sosial :					
	- Panti Asuhan	9	8	8	8	8
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	42	11	7	4	4
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	5	2	2	4	4

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kotim

14. Ketenagakerjaan

Kinerja bidang ketenagakerjaan didasarkan pada indikator Angkatan kerja (orang), Tingkat partisipasi angkatan kerja (Persen), Pencari kerja yang ditempatkan (orang), Tingkat pengangguran terbuka (Persen), Keselamatan dan perlindungan pekerja oleh perusahaan (Persen), Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Kasus). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70 Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angkatan kerja (orang)	206.026	204.286	227.252	230.323	230.005
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (Persen)	NA	63,21	68.51	67.45	67,41
3.	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	-	95	96	95	207
4.	Tingkat pengangguran terbuka (Persen)	NA	4,92	4.55	4.47	5,25
5.	Keselamatan dan perlindungan pekerja oleh perusahaan (Persen)	70,11	72,11	-	-	-
6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Kasus)	20 kasus	20 kasus	30 kasus	30 kasus	30 kasus

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah didasarkan pada indikator jumlah koperasi dan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
----	-------	------	------	------	------	------

1	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
	1. Jumlah Induk Koperasi/Koperasi Sekunder	-	-	-	-	
	2. Jumlah Koperasi Primer	366	308	320	325	339
	3. Koperasi Aktif	264	239	250	255	269
	4. Koperasi Tidak Aktif	102	69	70	70	70
	5. Koperasi KUD	30	28	28	28	20
	6. Koperasi Non KUD	336	280	292	297	
2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:					
	Mikro	12.759	17.859	22.962	26.183	
	Kecil	1.759	2.197	2.736	3.033	
	Menengah	31	31	31	31	31

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotim

16. Penanaman Modal

Kinerja bidang penanaman modal didasarkan pada indikator Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMDN (dalam Rp.Miliar), dan Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam US\$. Ribu dan dalam Rp.Miliar). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72 Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMDN (dalam Rp.Miliar)	10.420,57	8.746,54	15.021,38	5.530,51	759.226,18
2	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam US\$. Ribu dan dalam Rp.Miliar)	6.372.151	2.072.151	1.034.300	2.489.919	407.006
		11.758,95	17.315,59	25.645,01	34.298,63	573.167,41

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

17. Kebudayaan

Kinerja bidang kebudayaan dan pariwisata didasarkan pada indikator Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Benda/Situs/Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, serta Kunjungan Wisata. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73 Kinerja Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	18	14	18	14	14
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	4	4	4
3	Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	33	33	33	33

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

18. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja bidang kepemudaan dan olahraga didasarkan pada indikator Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Kegiatan/Even Olahraga, Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemerintah, Lapangan Olahraga, Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemerintah, serta Jumlah Gedung Olahraga Milik Swasta. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74 Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Olahraga	23	23	24	24	24
2	Jumlah Kegiatan/Even Olahraga	3	4	2	2	2
3	Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1
5	Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
6	Jumlah Gedung Olahraga Milik Swasta	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri didasarkan pada indikator Kegiatan pembinaan terhadap LSM/Ormas/OKP, Kegiatan pembinaan politik daerah, Jumlah LSM (aktif). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	2	2	2	2	2
3	Jumlah LSM (aktif)	65	61	65	71	71

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotim

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian didasarkan pada indikator Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten, Penegakan PERDA, Cakupan patroli petugas Satpol PP, Rasio Petugas Perlindungan, serta Masyarakat (Linmas) di Kabupaten per 10.000 Penduduk. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76 Kinerja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1.99	2.21	2.74	2.64	2.64
2	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	3.148	3.148	3.595	3.595	3.595
3	Penegakan PERDA	453 kasus	464 kasus	563 kasus	525 kasus	525 kasus
4	Cakupan patroli petugas Satpol PP	756 kali	756 kali	720 kali	720 kali	720 kali
5	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten per 10.000 Penduduk	72.16	70.57	78.77	86.74	86.74

Sumber : Satpol PP Kab. Kotim, BPBD Kab. Kotim, dan BPS Kab. Kotim

21. Ketahanan Pangan

Kinerja bidang ketahanan pangan didasarkan pada indikator ketersediaan regulasi ketahanan pangan, serta ketersediaan pangan utama (Ton). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77 Kinerja Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama (Ton)	92.43	97.81	104.05	109.53	91.22

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotim

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa didasarkan pada indikator PKK aktif, dan BUMDes aktif. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78 Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PKK aktif	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa
2	Posyandu aktif	305	315	327	331	308
3	BUMDes Aktif	25	40	56	70	70

Sumber : BPS Kab. Kotim

23. Statistik

Kinerja bidang statistik didasarkan pada indikator ketersediaan Buku "Kabupaten dalam angka", dan Buku "PDRB Kabupaten". Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79 Kinerja Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Kotim

24. Komunikasi dan Informatika

Kinerja bidang komunikasi dan informatika didasarkan pada indikator Jumlah Tower Telokomunikasi, Jumlah surat kabar nasional/lokal, Jumlah penyiaran radio/TV lokal, Website milik pemerintah daerah Pameran/expo. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80 Kinerja Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tower Telokomunikasi	108	117	118	134	134
2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	4/5	4/5	5/5	5/5	5/5
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6/3	7/4	7/3	4/1	4/1
4	Website milik pemerintah daerah	13	18	24	27	27
5	Pameran/expo	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika (diolah)

25. Perpustakaan

Kinerja bidang perpustakaan didasarkan pada indikator Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81 Kinerja Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	15.955	12.424	12.796	12.061	954
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	35.188 Judul	35.829 Judul	37.318 Judul	39.519 Judul	39.519 Judul

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotim

2.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Kinerja bidang pertanian (pertanian pangan dan perkebunan) didasarkan pada indikator produksi dan kontribusi sektor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.82 dan Tabel 2.83.

Tabel 2.82 Kinerja Pertanian Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah PERTANIAN	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Padi atau bahan utama lokal lainnya per Hektar					
	a. Padi	84.529 Ton	78.430 Ton	89.445 Ton	66.636 Ton	57.726 Ton
	b. Jagung	0 Ton	176 Ton	247 Ton	3.261 Ton	2.453 Ton
	c. Kedelai	20 Ton	12 Ton	26 Ton	9 Ton	11 Ton
	d. Kacang Tanah	66 Ton	60 Ton	80 Ton	40 Ton	-
	e. Ubi Kayu	5.225 Ton	24.653 Ton	32.897 Ton	24.409 Ton	10.225 Ton
	f. Ubi Jalar	456 Ton	570 Ton	751 Ton	981 Ton	1.267 Ton
2.	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	1.25	1.09	1.07	0.69	0.69

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Tabel 2.83 Kinerja Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode
2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah PERTANIAN	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Perkebunan Rakyat per Hektar					
	a. Karet	22.192,59	22.461,90	22.452,13	22.452,09	22.497,94
	b. Kelapa	4.345,28	4.556,76	5.202,72	5.242,42	5.247,62
	c. Kopi	92,80	92,96	92,96	92,96	92,96
	d. Lada	0.40	0.25	0.25	0.25	0.25
	e. Kakao	-	0.51	0.51	0.51	0.51
	f. Kelapa Sawit	24.373,27	28.579,65	28.739,12	28.737,73	28.995,41
2.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	17,65	17,18	16,66	16,09	16,00

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Tabel 2.84 Kinerja Pertanian Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah PERTANIAN	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Sayur dan Buah-buahan (Kuintal)					
	a. Cabai Besar	Na	1.041	5.654	1.836	3.034
	b. Bawang Merah	Na	213	417	298	228
	c. Cabai Rawit	Na	3.604	4.171	4.056	6.284
	d. Kacang Panjang	Na	4.165	4.801	4.593	7.288
	e. Ketimun	Na	4.471	4.844	4.660	7.475
	f. Tomat	Na	2.543	2.314	2.314	7.055
	g. Jahe	Na	262,68	532,94	633,81	1.619,37
	h. Laos/Lengkuas	Na	266,22	404,07	1.097,89	3.926,89
	i. Mangga	Na	472	3.924	2.289	707
	j. Durian	Na	728	14.656	11.076	2.946
	k. Jeruk	Na	7.416	13.939	7.853	9.863
	l. Pisang	Na	36.842	51.555	16.563	11.979
	m. Rambutan	Na	1.115	21.416	8.954	2.190
	n. Nenas	Na	8.253	8.168	3.093	2.293
2.	Kontribusi sektor tanaman Hortikultura terhadap PDRB	0,25	0,17	0,16	0,13	0,10

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Tabel 2.85 Kinerja Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah PERTANIAN	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Daging dan Telur (Kg)					
	a. Sapi Potong	751.746	Na	577.356	784.212	971.028
	b. Kerbau	57.586	Na	15.573	14.320	9.540
	c. Kambing	88.834	Na	111.473	99.123	96.273
	d. Babi	155.584	Na	448.065	413.865	400.050
	e. Ayam Buras	709.301	Na	271.199	273.987	273.987
	f. Itik	30.454	Na	50.361	44.876	44.876
	g. Ayam Petelur	383.859	Na	4.900	6.062	257.250
	h. Telur Ayam Buras	203.478	Na	232.988	242.996	240.803
	i. Telur Itik/Itik Manila	166.859	Na	224.818	202.556	210.543
2.	Kontribusi sektor Peternakan terhadap PDRB	0,96	0,91	0,90	0,90	0,94

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

2. Kehutanan

Kinerja bidang kehutanan didasarkan pada indikator kontribusi sektor.

Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86 Kinerja Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.56	0.46	0.46	0.30	-3,10

Sumber: BPS Kab. Kotim

3. Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Kinerja bidang Energi dan Sumber Daya Mineral didasarkan pada indikator kontribusi sektor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87 Kinerja ESDM Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	3.08	3.09	3.13	4.03	5.06

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng dan BPS Kab. Kotim

4. Pariwisata

Kinerja bidang pariwisata didasarkan pada indikator kunjungan wisata.

Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88 Kinerja Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

Aspek/Fokus/Bidang	Capaian Kinerja
--------------------	-----------------

No.	Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Wisata	91.300	126.574	87.972	240.392	58.610

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan terhadap kunjungan wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur diakibatkan dampak Pandemi Covid-19 yang mulai melanda pada awal tahun, hal ini mengalami penurunan pertumbuhan yang sebelumnya meningkat terus dari tahun 2016 sampai 2019, penurunan pertumbuhan sebesar 75,62 Persen.

5. Kelautan dan Perikanan

Kinerja bidang kelautan dan perikanan didasarkan pada indikator produksi perikanan, tingkat konsumsi ikan, dan kontribusi sektor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89 Kinerja Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Perikanan Tangkap					
	a. Perairan laut (Ton)	8.878,70	8.967,60	9.027,30	9.111,50	9.554,90
	b. Nilai produksi perairan laut (Juta Rupiah)	133.180.500	134.514.000	135.409.500	136.672.500	603.942.554
	c. Perairan umum (ton)	2.959,60	2.989,20	3.019,30	3.049,30	3.769,56
	d. Nilai produksi PUD (Juta Rupiah)	76.949.600	77.719.200	78.496.600	79.281.800	42.076.055
2.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun)	41,80	42,50	44,21	45,01	45,00
3.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	5,27	5,39	6,11	6,75	5,36

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

6. Perdagangan

Kinerja bidang perdagangan didasarkan pada indikator indikator sektor, dan ekspor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Kinerja Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor perdagangan (sub sektor perdagangan besar dan eceran) terhadap PDRB	17,40	17,93	18,89	20,19	19,01
2	Ekspor bersih perdagangan (USD)	54.509.028,30	88.888.591,60	45.535.719,20	67.814.038,10	219.390.906,10

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

7. Perindustrian

Kinerja bidang perindustrian didasarkan pada kontribusi sektor dan pertumbuhan sektor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91 Kinerja Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	22.20%	23.56%	22.98%	21.52%	21,68%
2	Pertumbuhan industri	5.15	9.24	-0.66	-2.71	-2.71

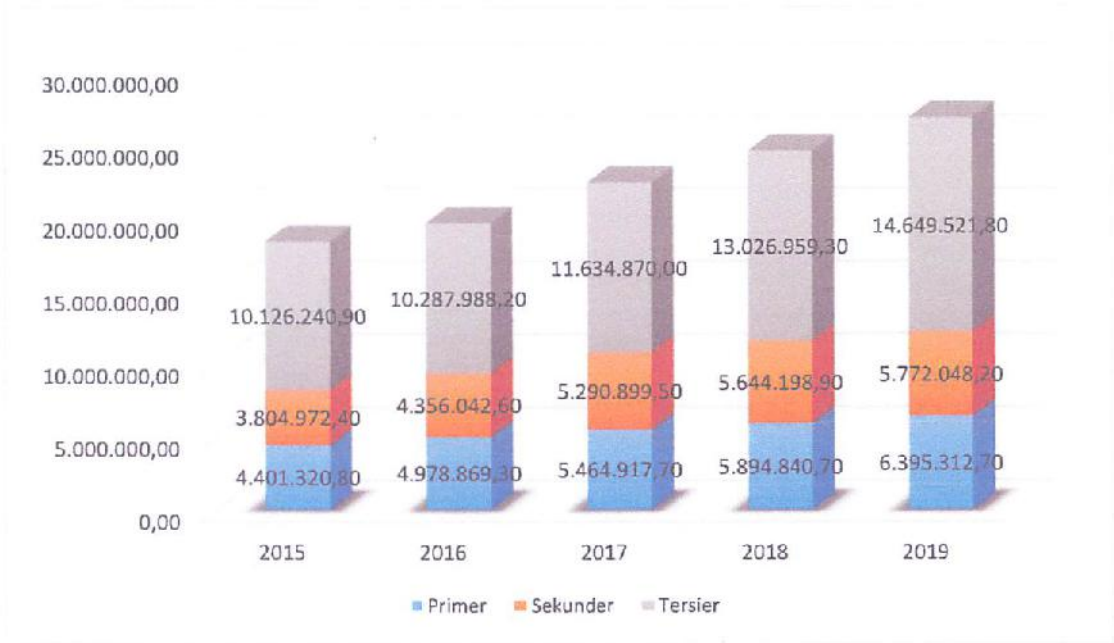
Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi daerah terdiri atas perbandingan kontribusi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam membentuk perekonomian daerah. Struktur perekonomian menunjukan potensi perekonomian daerah sekaligus fokus utama pembangunan ekonomi secara empiris. Sektor primer diwakili oleh pendapatan daerah dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder diwakili oleh pendapatan daerah dari lapangan usaha industri pengolahan. Sedangkan sektor tersier diwakili oleh pendapatan daerah dari lapangan usaha lainnya. Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Gambar 2.18 Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019
Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa sektor tersier merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2020, Kabupaten Kotawaringin Timur masih menjadi kabupaten dengan kontribusi terbesar pembentuk PDRB Provinsi Kalteng (Gambar 2.19), kedua hal tersebut secara umum menggambarkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur (bersama dengan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pusat ekonomi terbesar kedua) merupakan pusat bagi perdagangan dan jasa serta fungsi pelayanan umum khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bagian tengah-barat.



Gambar 2.19 Kontribusi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam PDRB Provinsi Kalteng Atas Dasar Harga Berlaku 2016-2019

Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi daerah mengindikasikan perkembangan agregat pendapatan daerah dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya, yang dihitung menggunakan angka PDRB harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.20. Karena tidak ada sumber cadangan migas maka laju pertumbuhan ekonomi hanya berdasarkan pada kompilasi dari kontribusi lapangan usaha kepad PDRB kabupaten. Data memperlihatkan kecenderungan penurunan dalam rata-rata laju pertumbuhan.



Gambar 2.20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020

Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

1. Tinjauan PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan, serta persentasenya masing-masing menurut pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.92. dan 2.93.

Tabel 2.92 PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Pengeluaran (Miliar Rupiah) Periode 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	2015		2016		2017		2018*		2019**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Konsumsi Rumah Tangga	6.913,5	5.072,50	7.699,5	5.320,50	8.584,3	5.528,10	9.339,3	5.864,50	9.956,4	6.100,00
2	Konsumsi LNPRT	169,80	123,60	184,00	127,00	197,50	132,60	224,10	144,20	258,20	159,10
3	Konsumsi Pemerintah	1.367,50	1.080,10	1.402,10	1.006,90	1.478,70	1.008,20	1.550,40	1.050,20	1.662,70	1.120,10
4	PMTB	7.979,70	6.018,90	8.776,10	6.241,70	9.447,40	6.453,60	10.157,00	6.834,10	10.990,00	7.074,10
5	Perubahan Inventori	228,70	138,70	189,00	113,30	128,70	43,70	116,80	45,00	111,70	43,40
6	Ekspor	633,30	1.402,20	1.372,10	2.123,40	2.554,10	2.952,00	3.178,40	3.296,80	3.837,90	3.971,50
7	Impor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total PDRB		17.292,50	13.836,00	19.622,90	14.932,80	22.390,60	16.118,20	24.566,00	17.234,90	26.816,80	18.468,10

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)
Keterangan:
) : angka sementara
) : angka sangat sementara Tahun dasar

Tabel 2.93 PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Pengeluaran (Persentase)
Periode 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	2015		2016		2017		2018*		2019**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Konsumsi Rumah Tangga	39,98	36,66	39,24	35,63	38,34	34,30	38,02	34,03	37,13	33,03
2	Konsumsi LNPRT	0,98	0,89	0,94	0,85	0,88	0,82	0,91	0,84	0,96	0,86
3	Konsumsi Pemerintah	7,91	7,81	7,15	6,74	6,60	6,26	6,31	6,09	6,20	6,07
4	PMTB	46,15	43,50	44,72	41,80	42,19	40,04	41,35	39,65	40,98	38,30
5	Perubahan Inventori	1,32	1,00	0,96	0,76	0,57	0,27	0,48	0,26	0,42	0,24
6	Ekspor	3,66	10,13	6,99	14,22	11,41	18,32	12,94	19,13	14,31	21,50
7	Impor	39,98	36,66	39,24	35,63	38,34	34,30	38,02	34,03	37,13	33,03
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)
Keterangan:
) : angka sementara
) : angka sangat sementara Tahun dasar

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94 PDRB Persentase laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Komponen Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2019

No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,83	4,89	3,90	6,08	4,02
2	Konsumsi LNPRT	3,49	2,80	4,39	8,79	10,30
3	Konsumsi Pemerintah	12,51	-6,78	0,13	4,16	6,66
4	PMTB	5,56	3,70	3,39	5,90	3,51
5	Perubahan Inventori	228,70	189,00	128,70	116,80	111,70
6	Ekspor	15.239,40	17.656,10	20.567,20	23.142,20	25.316,50
7	Impor	14.606,10	16.284,00	18.013,00	19.963,70	21.478,60
Rata-Rata		7,66	7,93	7,94	6,93	7,16

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)
Keterangan:
) : angka sementara
) : angka sangat sementara

2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Tabel 2.95 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga					
	ADHB (Miliar Rp)	17292.4	19622.8	22390.6	24566.0	26816.8
	ADHK (Miliar Rp)	13835.8	14932.4	16117.9	17234.9	18468.0
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	39.98	39.24	38.34	38.02	37.13
3	Rata-rata konsumsi per-Kapita penduduk/tahun					
	ADHB (Ribu Rp)	16.222.2	17.648.3	19.243.2	20.462.5	21.348.9

	ADHK (Ribu Rp)	11.902.4	12.195.2	12.392	12.849.2	13.079.8
4	Pertumbuhan (%)					
	Total Konsumsi Akhir RumahTangga	4.83	4.89	3.90	6.08	4.02
	Total Konsumsi Perkapita penduduk	2.36	2.46	1.62	3.69	1.79
5	Jumlah penduduk	426176	436276	446094	456409	414463

Sumber: PDRB (BPS, 2020; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Tabel 2.96 Perkembangan Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB)

No	Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	43,52	43,23	43,49	44,05	43,78
2	Pakaian dan Alas Kaki	4,03	3,89	3,63	3,48	3,55
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	16,88	16,54	16,38	15,80	15,83
4	Kesehatan & Pendidikan	4,84	4,76	4,65	4,59	4,67
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	23,49	24,54	25,13	25,59	25,65
6	Hotel & Restoran	2,47	2,43	2,42	2,46	2,45
7	Lainnya	4,77	4,61	4,30	4,04	4,07
	Makanan	43,52	43,23	43,49	44,05	43,78
	Non Makanan	56,48	56,77	56,51	55,95	56,22
	Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Tabel 2.97 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB)

No	Kelompok Konsumsi	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	1,38	-0,67	0,60	1,29	-0,61
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,23	-3,47	-6,68	-4,13	2,01
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,44	-2,01	-0,97	-3,54	0,19
4	Kesehatan & Pendidikan	2,64	-1,65	-2,31	-1,29	1,74
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	12,52	4,47	2,40	1,83	0,23
6	Hotel & Restoran	9,12	-1,62	-0,41	1,65	-0,41
7	Lainnya	3,20	-3,35	-6,72	-6,05	0,74

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

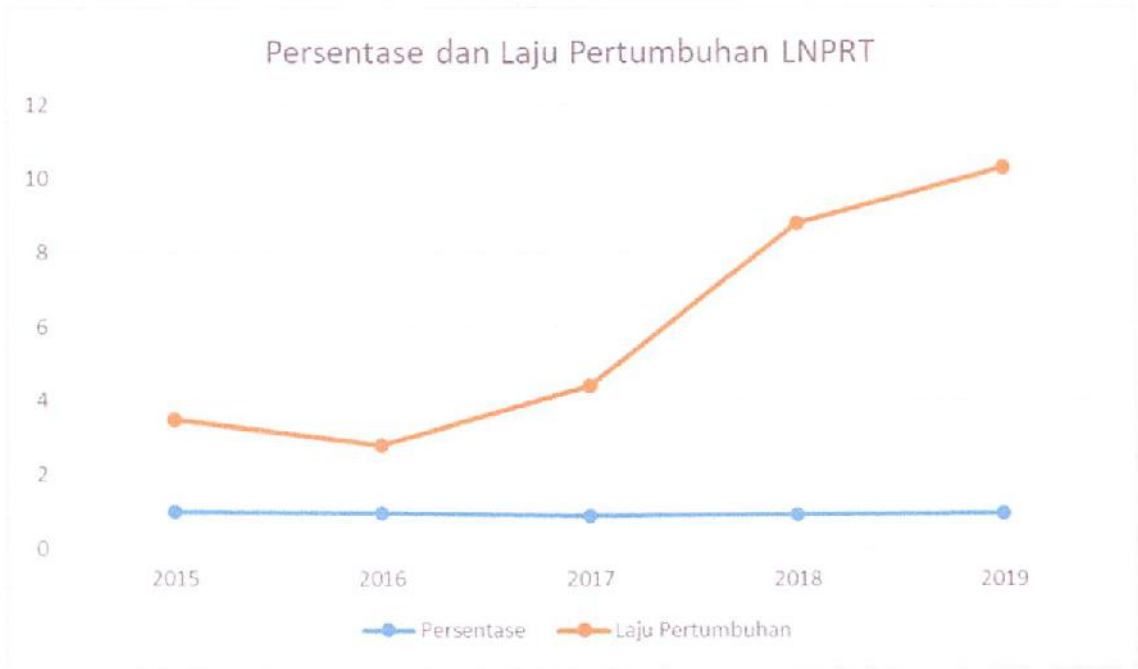
*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara

ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku). Distribusi persentase dan laju pertumbuhan LNPRT dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Gambar 2.21 Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan LNPRT Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2019

Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tidak signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (social transfer in kind-purchased market production). Pertumbuhan dan persentase konsumsi akhir pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98 Pertumbuhan dan Persentase Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Konsumsi Akhir Pemerintah					
a	ADHB (Miliar Rp)	1.367,50	1.402,10	1.478,70	1.550,40	1.662,70
b	ADHK (Miliar Rp)	1.080,10	1.006,90	1.008,20	1.050,20	1.120,10
2	Persentase terhadap PDRB (%ADHB)	7,91	7,15	6,60	6,31	6,20
3	Konsumsi Pemerintah per-Kapita penduduk					
a	ADHB (Ribu Rp)	3.208,80	3.213,90	3.314,80	3.396,90	3.565,20
b	ADHK 2010 (Ribu Rp)	2.534,50	2.307,90	2.260,10	2.301,00	2.401,70
4	Pertumbuhan (%)					
a	Total konsumsi pemerintah	12,51	-6,78	0,13	4,16	6,66

b	Konsumsi perkapita penduduk	9,87	-8,94	-2,07	1,81	4,38
5	Jumlah penduduk (000 org)	426.176	436.276	446.094	456.409	414.463

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

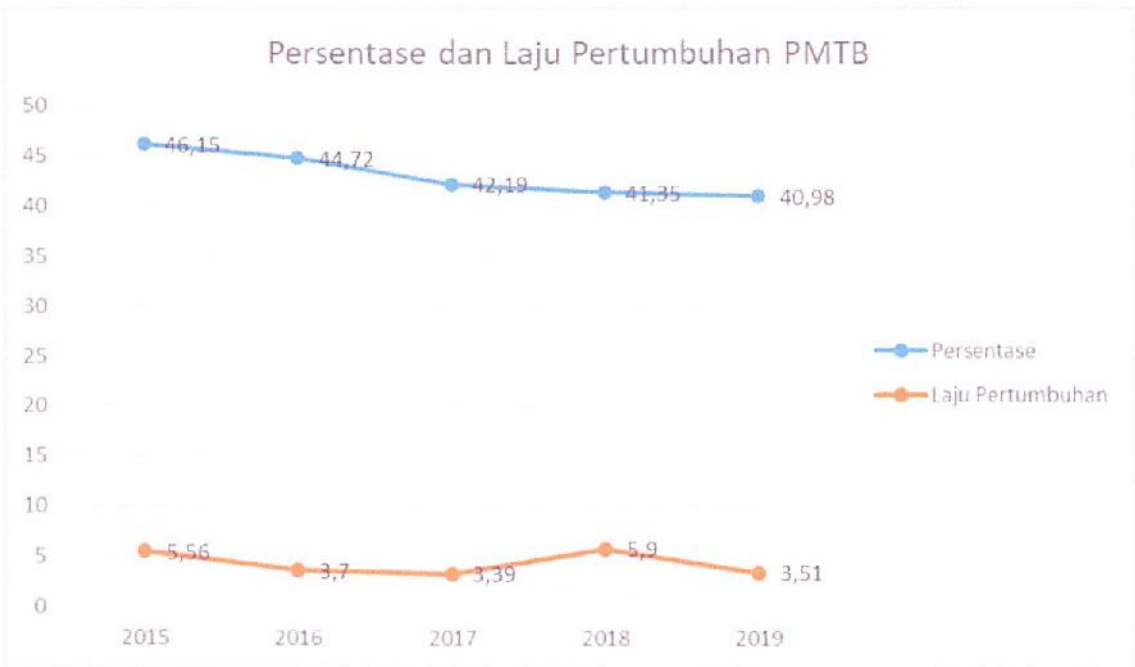
Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barangbarang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Persentase dan laju pertumbuhan PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.22



Gambar 2.22 Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2019

Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021
PMTB bangunan dan PMTB non bangunan.

6. Perkembangan Perubahan Inventori

Perubahan Inventori adalah perubahan kuantum inventori pada satu periode. Penyebab terbentuknya perubahan inventori adalah pembelian, penjualan, digunakan dalam proses produksi, transfer, hilang, rusak, penambahan berat pada ternak dan lain-lain.

Tabel 2.99 Pertumbuhan dan Persentase Perubahan Inventori Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Total PMTB					
a	ADHB (Miliar Rp)	228,60	189,00	128,60	116,80	111,70
b	ADHK (Miliar Rp)	138,80	113,30	43,70	45,00	43,40
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	1,32	0,96	0,57	0,48	0,42

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

7. Perkembangan Ekspor Netto

Ekspor netto didefinisikan sebagai ekspor dikurangi impor. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor dan impor. Sama halnya dengan perubahan inventori, ekspor netto juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor lebih besar daripada impor, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.100 Pertumbuhan dan Persentase Ekspor Netto Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
1	Total Net Ekspor					
a	ADHB (Miliar Rp)	633,30	1.372,10	2.554,10	3.178,40	3.837,90
b	ADHK (Miliar Rp)	1.402,20	2.123,40	2.952,00	3.296,80	3.971,50
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	3,66	6,99	11,41	12,94	14,31
3	Pertumbuhan Riil (%ADHK)	10,13	14,22	18,31	19,13	21,50

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

8. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio atau “ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output. Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter “Nilai Tambah”.

Tabel 2.101 Pertumbuhan dan Persentase ICOR Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
PDRB ADHK (Miliar Rp)	13.836,00	14.932,80	16.118,20	17.234,90	18.468,10
Perubahan PDRB ADHK (Miliar Rp)	985,00	1.096,80	1.185,40	1.116,70	1.233,20
PMTB ADHK (Miliar Rp)	6.018,90	6.241,70	6.453,60	6.834,10	7.074,10
ICOR	6,11	5,69	5,44	6,12	5,74

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Menurut POLRES Kabupaten Kotawaringin Timur, tindak pidana yang terjadi pada periode 2019-2020 mengalami penurunan. Jumlah tindak pidana pada tahun 2020 sebanyak 131 kejadian dibandingkan kejadian tindak pidana tahun sebelumnya 168 kasus. Jumlah kasus tindak pidana yang telah diselesaikan ada sebanyak 75 kasus. Angka Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana relative sama. Sedangkan selang waktu terjadinya tindak pidana tahun 2020 adalah 66 Jam 52 menit 35 detik. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan resiko seseorang terkena tindak kejahatan di Kabupaten Kotawaringin Timur jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.102 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018-2020

No	Kepolisian Resort	2018	2019	2020
1	Polres Kotim	-	72	-
2	Mentaya Hilir Selatan & Teluk Sampit	10	2	8
3	Pulau Hanaut	-	1	1
4	Mentawa Baru Ketapang & Seranau	32	20	20
5	Mentaya Hilir Utara	1	4	3
6	Kota Besi & Telawang	12	12	12
7	Baamang	29	21	22
8	Cempaga	11	1	3
9	Cempaga Hulu	27	5	11
10	Parenggean & Tualan Hulu	22	8	3
11	Mentaya Hulu & Bukit Santuai	9	10	10
12	Antang Kalang & Telaga Antang	7	9	8
Kotawaringin Timur		160	165	101

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

2. Lama Proses Perijinan

Pengurusan proses perizinan yang cukup lama telah menjadi salah satu kendala utama dalam iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Satu Atap melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) standar waktu pelayanan perizinan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.103 Waktu Proses Perijinan, di DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Jenis Izin	Standar Waktu (dalam hari kerja)
1	Izin Gangguan (IG/HO)	Baru: 7, Perpanjangan: 3
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3
3	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	5
5	Izin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP)	5
6	Izin Usaha Industri (IUI)	5
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5
8	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14
9	Izin Reklame	7
10	IzinUsaha Angkutan (IUA)	7

Sumber: DPMPTSP Kab. Kotim

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3)Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Walet; (10) PBB Perdesaan dan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB); dan (12) Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.511.053.231,14. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pendapatan Pajak Daerah	53.246.842.390	73.380.787.337	71.504.270.674,50	72.419.846.672,00	66.511.053.231,14
1	Pajak Hotel	1.320.681.119,00	2.009.351.039,00	2.375.348.850,00	2.717.695.868,00	1.879.313.602,00
2	Pajak Restoran	4.631.976.760,00	4.913.059.545,00	6.009.338.796,00	6.586.848.334,00	3.874.623.149,00
3	Pajak Hiburan	784.362.756,00	1.232.251.922,00	1.707.871.121,00	1.859.956.639,00	687.389.714,00
4	Pajak Reklame	1.684.296.993,00	1.926.486.208,00	729.265.142,00	980.106.992,00	1.274.869.280,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	14.852.436.692,00	19.468.519.234,00	22.589.640.831,00	24.869.791.999,00	25.696.331.056,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.558.552.895,00	1.410.094.255,00	2.464.524.935,00	3.171.175.325,00	2.488.079.015,00
7	Pajak Parkir	169.211.500,00	215.086.764,00	287.740.770,00	308.861.000,00	283.596.626,00
8	Pajak Air Tanah	29.153.000,00	53.182.600,00	108.830.800,00	158.892.000,00	197.982.420,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	172.486.270,00	379.044.016,00	351.582.180,00	618.469.400,00	517.852.890,00
10	Pajak Bumi & Bangunan	3.603.452.109,00	7.510.813.918,00	6.456.024.456,00	6.872.102.279,00	8.731.856.118,00
11	Bea Prolehan Hak atas tanah & Bangunan	24.440.232.296,00	34.251.897.836,00	28.368.667.623,00	24.158.189.271,00	20.311.943.523,00

Sumber: Bappenda Kab. Kotim

Jenis Retribusi Daerah yang menjadi tiga bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi perizinan tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.11.044.261.155,50. Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.061.679.900	2.482.471.972	1.120.984.600,00	2.630.234.160,00	1.488.092.850,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	254.158.000	243.350.000	225.574.000,00	273.178.000	267.976.000,00
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	-	-	-	-
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	530.584.000	2.353.858.600	1.527.899.050,00	1.398.624.815,00	324.870.460,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2.266.714.508	2.127.126.792	-	-	-
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	630.151.000	639.163.464	717.447.000,00	1.097.745.500,00	862.621.800,00
7	Retribusi Biaya Cetak Peta	160.000	168.898	80.000,00	-	-
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	128.000.000	138.232.836	-	-	-
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.263.069.745	1.319.815.031	-	-	261.122.934,00
10	Retribusi Terminal	22.400.000	24.134.056	30.900.000,00	55.300.000,00	50.000.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	172.275.000	187.390.704	57.380.000,00	59.167.500,00	33.022.500,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.135.491.243	1.341.290.038	1.928.515.691,00	2.169.086.898,50	3.405.374.024,50
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	113.500.000	114.200.484	158.000.000,00	109.000.000,00	115.450.000,00
14	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	2.783.544.033	3.032.966.669	-	-	-
15	Retribusi Izin Trayek	1.810.000	1.951.783	1.875.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00
16	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1.200.000	1.210.338	-	-	-
17	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	413.007.900	424.318.078	346.967.700,00	247.060.008,00	281.132.676,00
18	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	228.581.938	237.400.332	187.968.000,00	188.253.641,00	188.253.641,00
19	Pendapatan Denda Retribusi	117.540.659	121.634.936	50.739.890,00	25.788.550,00	23.073.100,00
20	Retribusi Tempat Pariwisata	59.134.000	60.046.805	56.034.000,00	13.480.000,00	7.252.000,00
21	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.876.000	8.268.209	32.887.300,00	30.095.000,00	15.260.000,00
22	Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	5.617.450	6.144.196	435.379.600,00	409.166.679,00	268.924.248,00

Sumber: Bappenda Kab. Kotim

Analisis pertumbuhan PAD 4 tahun sebelumnya menjadi gambaran pertumbuhan PAD setiap tahunnya, sehingga dapat membantu proyeksi PAD pada tahun selanjutnya. Hasil analisis menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.106.

Tabel 2.106 Analisis Pertumbuhan PAD 4 Tahun Sebelumnya

No	Target PAD	2017	2018	2019	2020
1	RPJMD	200.510.303.775	212.160.453.086	227.571.476.198	247.636.652.909
2	APBD	192.444.121.009	212.034.758.021	245.907.566.075	419.646.803.645
3	Realisasi	196.603.717.114	200.129.417.179	220.447.371.225	232.794.244.395

(% Realisasi thd target) APBD	102.16	94.39	89.65	55.47
--------------------------------	--------	-------	-------	-------

	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	Jumlah	Rata2
Pertumbuhan Realisasi	1,79	10.15	5.60	17.51	5.83

Analisis pertumbuhan Dana perimbangan 4 tahun sebelumnya menjadi gambaran pertumbuhan setiap tahunnya, sehingga dapat membantu proyeksi pada tahun selanjutnya. Hasil analisis menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.107.

Tabel 2.107 Analisis Pertumbuhan Dana Perimbangan 4 Tahun Sebelumnya

No	Target PAD	2017	2018	2019	2020
1	RPJMD	1.258.030.649.750	1.299.015.143.695	1.345.455.140.152	1.394.019.536.574
2	APBD	1.149.656.835.000	1.128.582.157.000	1.284.523.823.000	1.045.078.758.000
3	Realisasi	1.101.878.062.697	1.133.632.012.934	1.224.889.582.116	1.044.742.379.194

(% Realisasi thd target) APBD	95.84	100.45	95.36	99.97
--------------------------------	-------	--------	-------	-------

	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	Jumlah	Rata2
Pertumbuhan Realisasi	2.88	8.05	-14.71	-3.78	-1.26

Analisis pertumbuhan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 4 tahun sebelumnya menjadi gambaran pertumbuhan setiap tahunnya, sehingga dapat membantu proyeksi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun selanjutnya. Hasil analisis menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.108.

Tabel 2.108 Analisis Pertumbuhan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 4 Tahun Sebelumnya

No	Target PAD	2017	2018	2019	2020	
1	RPJMD	200.947.968.500	210.995.367.000	226.545.135.500	243.837.843.700	
2	APBD	222.453.020.700	321.515.752.300	323.570.742.302	395.561.150.300	
3	Realisasi	231.190.420.687	312.989.946.612	340.933.429.655	315.105.470.336	
(% Realisasi thd target) APBD		103.93	97.35	105.37	79.66	
		2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	Jumlah	Rata2
Pertumbuhan Realisasi		35.38	8.93	-7.58	36.73	12.24

Tabel Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020, menunjukan capaian kerja yang dicapai pada setiap bidang, urusan, ataupun indikator-indikator yang ada. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Pertumbuhan Ekonomi	7,93	7,94	6,92	7,13	-3,09
2	PDRB per Kapita	44,81	50,19	53,82	57,49	56,63
3	Laju Inflasi	2,46	3,29	6,02	2,02	1,62
4	Pertumbuhan Penduduk	2,37	2,25	2,31	2,18	1,33
5	Tingkat Kemiskinan	6,32	6,24	6,21	5,90	5,25
1.2	Kesejahteraan Sosial					
1.2.1	Pendidikan					
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,42	70,17	70,56	71,16	71,31
2	Harapan Lama Sekolah	12,21	12,59	12,68	12,69	12,84
3	Rata-Rata Lama Sekolah	7,88	7,89	7,90	8,12	8,13
4	Angka Harapan Hidup	69,60	69,70	69,75	69,80	69,85
5	Pengeluaran per Kapita	-	-	1.146.321	1.184.033	1.240.640
1.2.2	Ketenagakerjaan					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	NA	63,21	68,51	67,45	67,41
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	NA	4,92	4,55	4,47	5,25
1.3	Seni Budaya dan Olahraga					
1.3.1	Kebudayaan					
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	18	14	18	14	1
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	4	4	4
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	33	33	33	33
1.3.2	Olah Raga					
1	Jumlah Organisasi Olahraga	23	23	24	24	24
2	Jumlah Kegiatan Olahraga	3	4	2	2	2
3	Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	4	4	4	4	4
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah Gedung Olahraga (Selain Milik Swasta)	4	4	4	4	4
6	Jumlah Gedung Olahraga (Milik Swasta)	15	15	15	15	15
2)	PELAYANAN UMUM					
2.1	Pelayanan Urusan Wajib					
2.1.1	Pendidikan					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
a	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	19,84	27,77	29,80	29,80	29,80
b	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	88,48	89,95	49,26	49,10	49,10
2	Pendidikan Dasar					
a	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	97,10	97,50	97,60	98,00	98,90
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS	91,67	92,52	92,70	93,00	98,99
b	Usia 7-12 Tahun	43.289	43.291	43.294	43.297	43.297
c	Usia 13-15 Tahun	14.430	14.431	14.433	14.435	14.435
d	Anak Putus Sekolah SD (%)	0,38	0,33	0,28	0,23	0,23
e	Anak Putus Sekolah SMP (%)	0,41	0,36	0,31	0,26	0,26
f	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata-rata	1:30	1:30	1:25	1:23	1:23
g	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata-rata Pendidikan Dasar	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
h	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	APM SD/MI/Paket A	90,03	89,81	88,32	89,43	97,92
	APM SMP/MTs/Paket B	62,30	62,30	62,44	62,72	77,28
i	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK SD/MI/Paket A	103,88	102,84	100,61	101,43	104,66
	APK SMP/MTs/Paket B	82,87	82,22	84,68	84,69	92,83
j	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah					
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar	149.0	148.4	146.0	134.7	131.7
k	Rasio Guru/Murid					
	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar	15	17	16	17	17
l	Rasio Guru/Murid Menurut Perkelas Rata-Rata					
	Rasio guru/murid per kelas rata-	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	rata Pendidikan Dasar					
3	Pendidikan Menengah					
a	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA (Usia 16-18 Tahun)	60,28	63,68	85,00	99,20	57,03
b	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	APM SMA/MA/SMK	54,24	58,73	62,82	65,42	47,28
c	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK SMA/MA/SMK	74,24	80,14	81,90	87,38	75,04
d	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah					
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Pendidikan Menengah Pertama	167,8	169,80	172,20	148,70	185,00
e	Rasio Guru/Murid					
	Rasio guru/murid Pendidikan Menengah Pertama	14,90	16,30	16,70	16,80	16,00
f	Rasio Guru/Murid menurut perkelas rata-rata					
	Rasio guru/murid per kelas rata- rata Pendidikan Menengah Pertama	-	-	-	-	-
g	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah					
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Pendidikan Menengah Atas	339,6	345,3	350,5	264,4	329,2
h	Rasio Guru/Murid					
	Rasio guru/murid Pendidikan Menengah Atas	15,3	16,2	16,6	16,1	16,1
i	Rasio Guru/Murid menurut perkelas rata-rata	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16
	Rasio guru/murid per kelas rata- rata Pendidikan Menengah Atas	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
4	Angka Melanjutkan (AM)					
a	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
b	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	97,91	98,91	98,95	98,96	98,98
5	Fasilitas Pendidikan					
a	Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kondisi ruang kelas bangunan baik	87	88	80	90	91

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
b	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas bangunan baik	73	74	75	76	77
c	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas bangunan baik	64,50	66,00	67,50	69,00	69,50
d	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi ruang kelas bangunan baik	70	78	80	86	86
6	Kualifikasi Tenaga Pendidik					
a	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/S2/S3	40,39	45,50	60,00	65,00	69,00
2.1.2	Kesehatan					
1	Rasio posyandu per satuan balita	6,96	7,20	9,46	7,49	2020
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	44,81	44,01	44,16	43,16	8.00
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,47	0,46	0,45	0,44	43.16
4	Rasio dokter per satuan penduduk	27,68	24,07	23,54	29,14	0.44
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	204,56	206,75	197,94	202,67	29.14
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	1.387/2.036	813/2.042	1.333/2.050	1.199/2.053	202.67
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	7.152/9.717	7.276/9.743	8.066/9.819	8.645/9827	1.578/2.024
8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	111/185	102/185	147/185	121/185	6.513/6.513
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	11	6	5	11	121/185
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	420/420	473/473	472/472	545/545	6
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	172/172	129/129	252/252	176/176	545/545
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	-	-	176/176
13	Cakupan kunjungan bayi	6.388/9.254	7.005/9.282	7.046/9.598	6.634/9.021	-
14	Cakupan puskesmas	20/17	21/17	21/17	21/17	6.634/9.021

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
15	Cakupan pembantu puskesmas	142/185	142/185	142/185	142/185	21/17
16	Jumlah Penanganan ODGJ	219	334	229	586	142/185
2.1.3	Pekerjaan Umum					
1	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi baik	242,64	259,13	364,48	371,08	363,34
2	Panjang Jalan dilalui roda 4	1.792.594	1.882.223	1.976,33	2.075,14	2.015,14
3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	647,50	679,87	713,86	749,55	749,55
4	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	669.530	710.930	721.143	726.560	667,53
5	Rumah tinggal bersanitasi	-	51,07	51,16	51,66	71,44
6	Lingkungan Pemukiman	--	-	-	-	-
7	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	1.495	1.458	279	9.800	9.800
8	Jenis Jembatan (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	153	153	153	153	153
	b. Jumlah Jembatan Beton	36	38	38	66	67
	c. Jumlah Jembatan Baja	10	12	12	12	12
9	Panjang Jembatan (meter)					
	a. Jembatan Kayu	3.566,5	3.592,5	3.612,5	3.612,5	3.612,5
	b. Jembatan Beton	358	365	365	431,50	471,5
	c. Jembatan Baja	750	870	750	750	750
10	Jembatan dalam kondisi baik (buah)					
	a. Jembatan Kayu	38	40	40	12	153
	b. Jembatan Beton	36	38	38	66	67
	c. Jembatan Baja	10	12	12	12	12
11	Jembatan dalam kondisi rusak (buah)					
	a. Jembatan Kayu	56	54	54	54	54
	b. Jembatan Beton	-	-	-	-	-
	c. Jembatan Baja	-	-	-	-	-
12	Rasio jaringan irigasi	0,91	1,66	1,49	1,35	1,32
13	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	17,91	19,69	23,70	24,03	24,03
14	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	459	326	391	742	759

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
15	Rumah tangga yang menggunakan air bersih (%)	72,64	76,62	80,11	85,39	85,39
16	Cakupan pelayanan air minum/bersih (Org)	441/079	436/276	456/409	466/366	466/366
17	Penduduk berakses air minum	320/421	334/264	350/489	389/246	389/246
18	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM (KK)	25.739	26.930	27.941	28.876	30.330
19	Rumah Tangga pengguna air bersih	72,64	76,62	80,11	85,39	85,39
2.1.4	Perumahan					
1	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	72,64	76,62	80,11	85,39	85,39
2	Cakupan pelayanan air minum/bersih	441/079	436/276	456/409	466/366	466/366
3	Penduduk berakses air minum	320/421	334/264	350/489	389/246	389/246
4	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM (KK)	25.739	26.930	27.941	28.876	30.330
5	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	27.601	6.991	25.078	24.497	24.101
6	Rumah Tangga pengguna air bersih	-	-	-	-	-
7	Kawasan kumuh	49,42	41,16	33,60	21,08	12,52
2.1.5	Penataan Ruang					
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	-
2	Jumlah IMB yang diterbitkan	459	326	391	742	759
3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	-	-	-	--
2.1.6.	Perencanaan Pembangunan					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.7	Perhubungan					
1	Jumlah Arus penumpang angkutan umum					
	Angkutan sungai	25.356	22.834	160.805	-	-
	Angkutan jalan	26.968	26.968	32.346	35.004	22.976
	Angkutan laut	142.119	104.575	104.512	-	-
	Angkutan udara	257.512	313.622	417.540	-	-
2	Rasio ijin trayek	3/10	3/10	-	-	-

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	424	477	711	1.114	1.059
4	Jumlah Terminal	1	1	1	1	1
5	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
6	Jumlah Pelabuhan	2	2	2	2	2
7	Jumlah Angkutan darat	-	-	-	-	-
	Angkutan sungai (unit kapal)	-	5.784	14.007	-	-
	Angkutan jalan (unit)	10.242	10.242	10.878	-	-
8	Kepemilikan KIR angkutan umum	424	477	711	1.114	1.059
9	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30	30	25	25	25
10	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
11	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (jumlah rambu)	215	215	215	215	215
2.1.8	Lingkungan Hidup					
1	Persentase Penanganan Sampah	*0	58.85	58.68	57.33	57.33
2	Persentase penduduk berakses air minum	0	0	0	0	0
3	Pencemaran status mutu air	**TR	**TR	**TR	**TR	**TR
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan
5	Penegakan hukum lingkungan	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus
2.1.9	Pertanahan					
1	Persentase luas lahan bersertifikat	1,60	0,17	0,90	0,40	0,40
2	Penyelesaian kasus tanah negara	-	-	16	15	15
3	Penyelesaian izin lokasi	4	2	4	11	11
2.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil					
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	108.349	108.025	107.551	106.874	107.060
2	Rasio anak berakte kelahiran	56.340	94.776	107.610	121.356	698
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,15	0,18	0,23	0,32	1.271
4	Kepemilikan KTP	222.239	283.275	262.879	265.983	265.983
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	62.819	62.906	45.296	40.553	6.800
6	Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten Kotawaringin Timur	406.429	409.502	411.852	214.117	214.938
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	283.806	283.725	280.162	284.117	284.117

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,14	2,80	2,72	3,03	2,94
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	8,52	8,58	17,90	17,80	20,30
3	Rasio KDRT	0.032	0.038	0.038	0.028	0.022
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	NA	NA	NA	NA	NA
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	NA	35,00	43,10	43,50	71,12
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
2.1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,60	2,50	2,29	2,24	2,24
2	Rasio akseptor KB	78,10	77,10	74,10	78,30	78,3
3	Cakupan peserta KB aktif	19,20	21,40	24,60	43,20	43,2
4	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	16	17	17
5	Bina Keluarga Balita (BKB)	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	25	27	31
6	Bina Keluarga Remaja (BKR)	60	70	87	111	424
7	Bina Keluarga Lansia (BKL)	28	37	50	70	212
8	UPPKS	11	12	11	14	14
9	PIK.R	7	10	12	12	12
10	PKKBD	150	165	166	168	185
11	Sub. PKKBD	120	120	120	125	118
12	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-1	-2	-3	-4	3
2.1.13	Sosial					
1	Sarana sosial : Panti Asuhan	9	8	8	8	8
2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	42	11	7	4	4
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	5	2	2	4	4
2.1.14	Ketenagakerjaan					
1	Angkatan kerja	206.026	204.286	227.252	230.323	230.053
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	NA	63,21	68,51	67,45	67,41
3	Pencari kerja yang ditempatkan	-	95	96	95	207
4	Tingkat pengangguran terbuka	NA	4,92	4,55	4,47	5,25

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Keselamatan dan perlindungan	70,11	72,11	-	-	-
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	20 kasus	20 kasus	30 kasus	30 kasus	30 kasus
2.1.15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
	1. Jumlah Induk Koperasi / Koperasi Sekunder	-	-	-	-	-
	2. Jumlah Koperasi Primer	366	308	320	325	339
	3. Koperasi Aktif	264	239	250	255	269
	4. Koperasi Tidak Aktif	102	69	70	70	70
	5. Koperasi KUD	30	28	28	28	20
	6. Koperasi Non KUD	336	280	292	297	-
2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:					
	Mikro	12.759	17.859	22.962	26.183	-
	Kecil	1.759	2.197	2.736	3.033	-
	Menengah	31	31	31	31	31
2.1.16	Penanaman Modal					
1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMDN (dalam Rp. Miliar)	10.420,57	8.746,54	15.021,38	5.530,51	759.226,18
2	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam US\$. Ribu dan dalam Rp. Miliar)	6.372.151	2.072.151	1.034.300	2.489.919	407.006
		11.758,95	17.315,59	25.645,01	34.298,63	573.167,41
2.1.17	Kebudayaan dan Pariwisata					
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	18	14	18	14	14
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	4	4	4
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	33	33	33	33
4	Kunjungan Wisata	90.616	126.574	89.178	241.718	58.610
2.1.18	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Jumlah Organisasi Olahraga	23	23	24	24	24
2	Jumlah Kegiatan/Even Olahraga	3	4	2	2	2
3	Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1
5	Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
6	Jumlah Gedung Olahraga Milik Swasta	15	15	15	15	15
2.1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri					

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	2	2	2	2	2
3	Jumlah LSM (aktif)	65	61	65	71	71
2.1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,99	2,21	2,74	2,64	2,64
2	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	3.148	3.148	3.595	3.595	3.595
3	Penegakan PERDA	453 kasus	464 kasus	563 kasus	525 kasus	525 kasus
4	Cakupan patroli petugas Satpol PP	756 kali	756 kali	720 kali	720 kali	720 kali
5	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten per 10.000 Penduduk	72,16	70,57	78,77	86,74	86,74
2.1.21	Ketahanan Pangan					
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama	92,43	97,81	104,05	109,53	91,22
2.1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	PKK aktif	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa
2	Posyandu aktif	305	315	327	331	308
3	BUMDes aktif	25	40	56	70	70
2.1.23.	Statistik					
1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.1.24	Komunikasi dan Informatika					
1	Jumlah tower telokomunikasi	108	117	118	134	134
2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	4/5	4/5	5/5	5/5	5/5
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6/3	7/4	7/3	4/1	4/1
4	Website milik pemerintah daerah	13	18	24	27	27
5	Pameran/expo	1	1	1	1	1
2.1.25	Perpustakaan					
1	Jumlah perpustakaan					
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	15.955	12.424	12.796	12.061	954
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	35.188	35.829	37.318	39.519	39.519

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
		Judul	Judul	Judul	Judul	Judul
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan					
2.2.1	Pertanian					
1	Produksi Padi atau bahan utama lokal lainnya per Hektar					
	a. Padi	84.529 Ton	78.430 Ton	89.445 Ton	66.636 Ton	57.726 Ton
	b. Jagung	0 Ton	176 Ton	247 Ton	3.261 Ton	2.453 Ton
	c. Kedelai	20 Ton	12 Ton	26 Ton	9 Ton	11 Ton
	d. Kacang Tanah	66 Ton	60 Ton	80 Ton	40 Ton	-
	e. Ubi Kayu	5.225 Ton	24.653 Ton	32.897 Ton	24.409 Ton	10.225 Ton
	f. Ubi Jalar	456 Ton	570 Ton	751 Ton	981 Ton	1.267 Ton
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	22,30	21,32	20,78	19,70	21,48
4	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	1,25	1,09	1,07	0,69	0,69
5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	17,65	17,18	16,66	16,09	16,09
6	Produksi Perkebunan Rakyat per Hektar	22.192,59	22.461,90	22.452,13	22.452,08	22.497,94
	a. Karet	4.345,28	4.55,76	5.202,72	5.242,39	5.247,62
	b. Kelapa	92,80	92,96	92,96	92,96	92,96
	c. Kopi	0,40	0,25	0,25	0,25	0,25
	d. Lada	-	0,51	0,51	0,51	0,51
	e. Kakao	24.373,27	28.579,65	28.739,12	28.737,73	28.995,41
	f. Kelapa Sawit	-	-	-	-	-
7	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	19,74	18,99	18,44	17,45	19,26
8	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0,25	0,17	0,16	0,13	0,10
9	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	17,65	17,18	16,66	16,09	16,00
2.2.2	Kehutanan					
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,56	0,46	0,46	0,30	-3,10
2.2.3	Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	3,08	3,09	3,13	4,03	5,06
2.2.4	Pariwisata					
1	Kunjungan Wisata	91.300	126.574	87.972	240.392	58.610
2.2.5	Kelautan dan Perikanan					

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Tangkap					
	a. Perairan laut (Ton)	8.878,70	8.967,60	9.027,30	9.111,50	9.554,90
	b. Nilai produksi perairan laut (Rp.000)	133.180.500	134.514.000	135.409.500	136.672.500	603.942.554
	c. Perairan umum (ton)	2.959,60	2.989,20	3.019,30	3.049,30	3.769,56
	d. Nilai produksi PUD (Rp.000)	76.949.600	77.719.200	78.496.600	79.281.800	42.076.055
2	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun)	41,80	42,50	44,21	45,01	45,00
3	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	5,27	5,39	6,11	6,75	5,36
2.2.6	Perdagangan					
1	Kontribusi sektor perdagangan (sub sektor perdagangan besar dan eceran) terhadap PDRB	17,40	17,93	18,89	20,19	19,01
2	Ekspor bersih perdagangan	54.509.028,30	88.888.591,60	45.535.719,20	67.814.038,10	219.390.906,10
2.2.7	Perindustrian					
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	22,20%	23,63%	22,98%	21,52%	21,68%
2	Pertumbuhan industri	5,15	9,24	-0,66	-2,71	-2,71
2.2.8	Ketransmigrasian					
1	Transmigran Swakarsa	-	-	-	-	-
3)	DAYA SAING DAERAH					
3.1	Kemampuan Ekonomi Daerah					
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
		ADHB/ADHK	ADHB/ADHK	ADHB/ADHK	ADHB/ADHK	ADHB/ADHK
1	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	7.699,50/5.320,40	8.584,3/5.528,10	9.339,30/5.864,50	9.956,40/6.099,90	-
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	184/127	197,50/132,50	224,10/144,20	258,20/159,10	-
3	Konsumsi Pemerintah	1.402,10/1006,80	1.47,70/1.008,20	1.550,40/1.050,20	1.662,70/1.120,10	-
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.776,10/6241,70	9.447,40/6.453,50	10.157,00/6.834,10	10.989,90/7.074,10	-
5	Perubahan Inventori	189/113,20	128,60/43,60	116,80/45,10	111,70/43,40	-
6	Ekspor	1.372,10/2.123,30	2.554,10/2.952,00	3.178,40/3.296,80	3.837,90/3.971,40	-
7	Impor	-	-	-	-	-
3.1.2	Iklim Berinvestasi					
1	Angka Kriminalitas	91	115	160	165	101
2	Pendapatan Pajak Daerah	53.246.842.390	73.380.787.337	71.504.270.674,50	72.419.846.672,00	66.511.053.231,14

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
a	Pajak Hotel	1.320.681.119,00	2.009.351.039,00	2.375.348.850,00	2.717.695.868,00	1.879.313.602,00
b	Pajak Restoran	4.631.976.760,00	4.913.059.545,00	6.009.338.796,00	6.586.848.334,00	3.874.623.149,00
c	Pajak Hiburan	784.362.756,00	1.232.251.922,00	1.707.871.121,00	1.859.956.639,00	687.389.714,00
d	Pajak Reklame	1.684.296.993,00	1.926.486.208,00	729.265.142,00	980.106.992,00	1.274.869.280,00
e	Pajak Penerangan Jalan Umum	14.852.436.692,00	19.468.519.234,00	22.589.640.831,00	24.869.791.999,00	25.696.331.056,00
f	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.558.552.895,00	1.410.094.255,00	2.464.524.935,00	3.171.175.325,00	2.488.079.015,00
g	Pajak Parkir	169.211.500,00	215.086.764,00	287.740.770,00	308.861.000,00	283.596.626,00
h	Pajak Air Tanah	29.153.000,00	53.182.600,00	108.830.800,00	158.892.000,00	197.982.420,00
i	Pajak Sarang Burung Walet	172.486.270,00	379.044.016,00	351.582.180,00	618.469.400,00	517.852.890,00
j	Pajak Bumi & Bangunan	3.603.452.109,00	7.510.813.918,00	6.456.024.456,00	6.872.102.279,00	8.731.856.118,00
k	Bea Prolehan Hak atas tanah & Bangunan	24.440.232.296,00	34.251.897.836,00	28.368.667.623,00	24.158.189.271,00	20.311.943.523,00
3	Retribusi Daerah					
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.061.679.900	2.482.471.972	1.120.984.600,00	2.630.234.160,00	1.488.092.850,00
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	254.158.000	243.350.000	225.574.000,00	273.178.000	267.976.000,00
c	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	-	-	-	-
d	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	530.584.000	2.353.858.600	1.527.899.050,00	1.398.624.815,00	324.870.460,00
e	Retribusi Pelayanan Pasar	2.266.714.508	2.127.126.792	-	-	-
f	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	630.151.000	639.163.464	717.447.000,00	1.097.745.500,00	862.621.800,00
g	Retribusi Biaya Cetak Peta	160.000	168.898	80.000,00	,	-
h	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	128.000.000	138.232.836	396.438.369,00	,	-
i	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.263.069.745	1.319.815.031	-	-	261.122.934,00
j	Retribusi Terminal	22.400.000	24.134.056	30.900.000,00	55.300.000,00	50.000.000,00
k	Retribusi Rumah Potong Hewan	172.275.000	187.390.704	57.380.000,00	59.167.500,00	33.022.500,00
l	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.135.491.243	1.341.290.038	1.928.515.691,00	2.169.086.898,50	3.405.374.024,50
m	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	113.500.000	114.200.484	158.000.000,00	109.000.000,00	115.450.000,00
n	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	2.783.544.033	3.032.966.669	-	-	-
o	Retribusi Izin Trayek	1.810.000	1.951.783	1.875.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00
p	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1.200.000	1.210.338	,	-	-
q	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	413.007.900	424.318.078	346.967.700,00	247.060.008,00	281.132.676,00

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
r	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	228.581.938	237.400.332	187.968.000,00	188.253.641,00	188.253.641,00
s	Pendapatan Denda Retribusi	117.540.659	121.634.936	50.739.890,00	25.788.550,00	23.073.100,00
t	Retribusi Tempat Pariwisata	59.134.000	60.046.805	56.034.000,00	13.480.000,00	7.252.000,00
u	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.876.000	8.268.209	32.887.300,00	30.095.000,00	15.260.000,00
v	Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	5.617.450	6.144.196	435.379.600,00	409.166.679,00	268.924.248,00

4. Komoditi Unggulan Daerah (*One Village One Produk*)
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memilih dan menetapkan satu desa di setiap kecamatan yang menjadi model satu desa unggulan pada satu kecamatan memiliki produk unggulan yang akan dikembangkan dapat dilihat pada tabel 2.108 dibawah.

Tabel 2.110 Desa Unggulan dan Sektor/ Produk Unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	KECAMATAN	DESA	SEKTOR/PRODUK UNGGULAN
1	Mentawa Baru Ketapang	Eka Bahurui	- Holtikultura (sirsak, lengkeng, jeruk, nenas dan tanaman rempah-rempah) - Peternakan (sapi, ayam, kambing)
2	Baamang	Tinduk	- Produk kerajinan dari rotan
3	Seranau	Seragam Jaya	- Tanaman rempah-rempah (laos dan kencur) - Nenas, Rambutan
4	Mentaya Hilir Utara	Sumber Makmur	- Peternakan Sapi - Tanaman Holtikultura (jeruk keprok, jeruk sankis dan sirsak) - Pengolahan limbah ternak
5	Pulau Hanaut	Babaung	- Tanaman padi - pengolahan kripik pisang - Perkebunan pisang (pisang pulau laut) - Tanaman Holtikultura (jeruk dan durian)
6	Mentaya Hilir Selatan	Sei Ijum Raya	- Perikanan dan hasil olahannya - Pertanian padi (beras kemasan) - Perkebunan Kelapa Dalam dan Hasil Olahannya
7	Teluk Sampit	Lampuyang	- Pertanian padi (beras kemasan) - Perikanan darat (sungai dan tambak) dan hasil olahannya - Perkebunan kelapa dalam dan hasil olahannya
8	Kota Besi	Camba	- Pertanian padi - Perikanan Darat (keramba)
9	Telawang	Sumber Makmur	- Peternakan sapi - Kelapa Sawit - Sayur-sayuran

NO	KECAMATAN	DESA	SEKTOR/PRODUK UNGGULAN
10	Cempaga	Luwuk Ranggan	- Pengembangan Holtikultura (sirsak, cempedak, manggis, durian dan buah lokal lainnya)
11	Cempaga Hulu	Pelantaran	- Perikanan darat (tambak) - Pengolahan tahu/tempe - Kelapa Sawit (kebun masyarakat)
12	Parenggean	Karang Sari	- Perikanan darat (tambak) - Peternakan sapi - Kelapa Sawit (kebun masyarakat)
13	Tualan Hulu	Tanjung Jorong	- Karet - Kelapa Sawit (kebun masyarakat) - Perikanan darat - Peternakan Sapi
14	Mentaya Hulu	Tanjung Jariangau	- Karet - Mebeler
15	Bukit Santuai	Tumbang Batu	- Usaha Mebeler - Pertanian padi
16	Antang Kalang	Gunung Makmur	- Sektor Perikanan (ikan nila dan Patin) - Sektor Pertanian (Sayuran Palawija, Kedelai, Jagung) - Mebeleir atau pertukangan
17	Telaga Antang	Beringin Agung	- Peternakan sapi dan kambing - Perikanan Darat (Tambak Ikan Patin)

Sumber : Pengembangan Desa Unggulan Tahun 2015 dan Rencana Kawasan Perdesaan Tahun 2017

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1 PERKEMBANGAN KONDISI KEMISKINAN DAERAH

3.1.1 Tingkat Kemiskinan (P0) dan Jumlah Penduduk Miskin

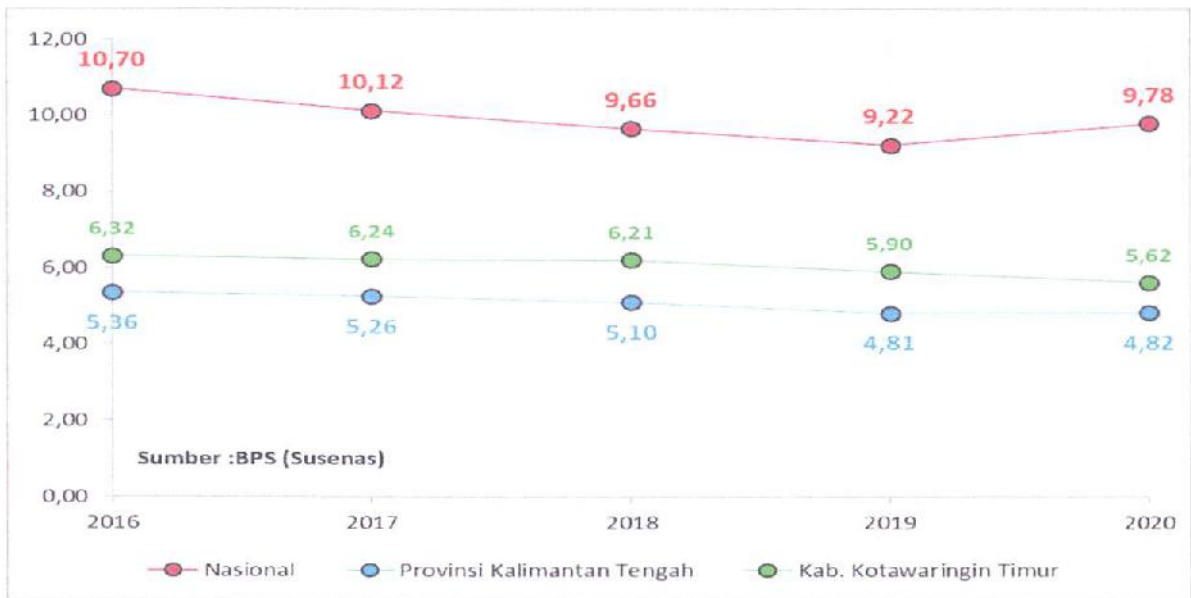
Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, papan dan pangan. Sehingga berdampak buruk terhadap pemenuhan standar kebutuhan hidup lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian miskin adalah kondisi yang secara umum menggambarkan suatu rumah tangga, komunitas, atau seseorang yang berada dalam serba kekurangan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang paling dasar. Akibatnya tersebut, yang bersangkutan mengalami berbagai keterbatasan baik terhadap peran-peran secara sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang harus dilakukan. Keterbatasan-keterbatasan seperti itu dapat terjadi karena akibat dari internal individu atau rumah tangga yang gagal beradaptasi terhadap lingkungan, atau dalam merespon perubahan. Pada saat yang sama, dapat juga terjadi sebaliknya, yaitu lingkunganlah yang melahirkan seseorang menjadi miskin.

Secara konstruksi sosial, kemiskinan adalah ketidaksetaraan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu meliputi:

1. Modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan dan kesehatan
2. Sumber keuangan seperti *income* dan kredit yang memadai
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi
4. *Network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai
5. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan

Berbagai kondisi yang dijabarkan di atas memiliki dinamika yang terkait erat dengan berbagai faktor-faktor eksternal di daerah. Adapun faktor eksternal yang sangat berdampak secara regional, nasional, hingga global adalah pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada berbagai sektor utama, strategis, hingga sektor pendukung.

Tidak terkecuali di Kabupaten Kotawaringin Timur yang juga mengalami dinamika tingkat kemiskinan antarwaktu. Tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai angka 5,62 persen atau turun sebesar 0,28 persen dari tahun 2019 yang mencapai 5,90 persen. Secara keseluruhan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2021, tren tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tren positif seperti yang terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini

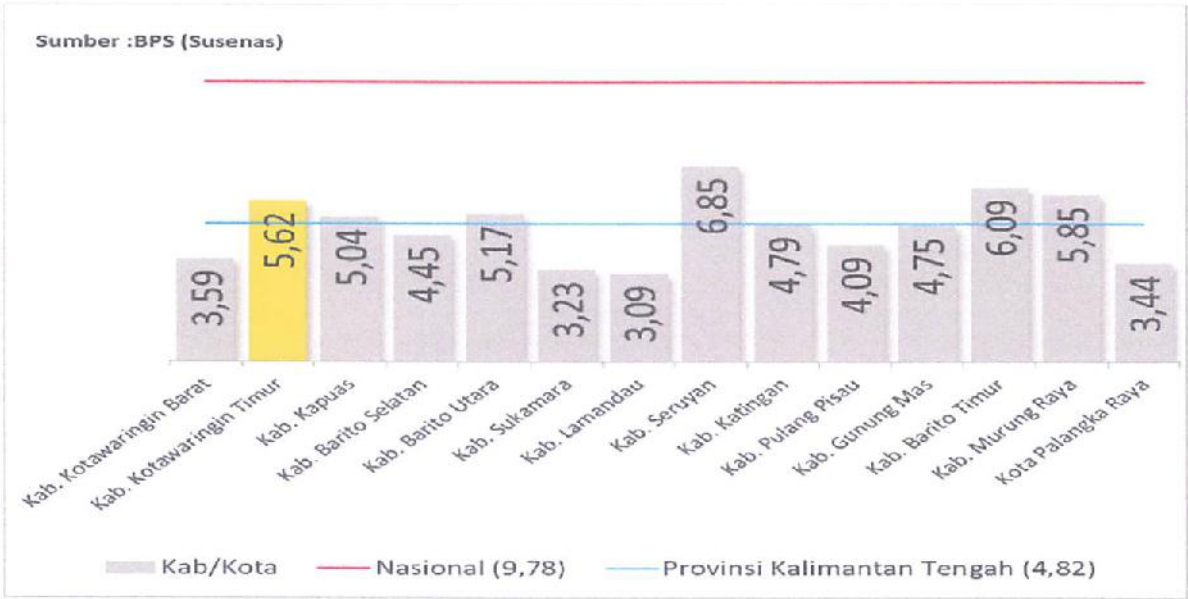


Gambar 3.1 Relevansi Tren Tingkat Kemiskinan Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Dari satu sisi, tren positif tingkat kemiskinan pada Gambar 3.1 di atas memperlihatkan ada indikasi peningkatan kualitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada periode yang sama, tren positif penurunan tingkat kemiskinan juga terjadi pada di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun tingkat Nasional. Hanya saja di tingkat Nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah terjadi kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020, yakni dari 9,22 persen pada tahun 2019 menjadi 9,78 persen pada tahun 2020 di tingkat Nasional dan dari 4,81 persen pada tahun 2019 menjadi 4,82 persen pada tahun 2020 di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan tren pada periode 2019-2020 tersebut, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan penanggulangan kemiskinan di tingkat Nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada urutan ke-4 tertinggi se-Kalimantan Tengah setelah Kabupaten Seruyan pada angka 6,85 persen, Kabupaetn Barito Timur pada angka 6,09 persen, dan Kabupaten Murung Raya pada angka 5,85 persen. Sedangkan

tingkat kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten Lamandau pada angka 3,09 persen. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini



Gambar 3.2 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kab. Kotim Tahun 2020

Gambar 3.2 memperlihatkan bahwa secara relatif, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih lebih baik dibandingkan dengan 3 kabupaten lain se-Kalimantan Tengah. Masih diperlukan upaya yang lebih kuat agar tingkat kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur berada di bawah tingkat kemiskinan provinsi Kalimantan Tengah. Secara detail perkembangan tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah tersaji pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (dalam persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kotawaringin Barat	4,96	4,52	4,27	4,11	3,59
Kab. Kotawaringin Timur	6,32	6,24	6,21	5,90	5,62
Kab. Kapuas	5,70	5,32	5,20	5,09	5,04
Kab. Barito Selatan	4,58	4,44	4,55	4,39	4,45
Kab. Barito Utara	5,38	5,21	5,00	4,95	5,17
Kab. Sukamara	3,73	3,36	3,19	3,16	3,23
Kab. Lamandau	3,80	3,52	3,15	3,01	3,09
Kab. Seruyan	8,08	7,46	7,43	7,19	6,85
Kab. Katingan	6,23	5,78	5,22	5,02	4,79
Kab. Pulang Pisau	5,49	5,19	4,51	4,24	4,09
Kab. Gunung Mas	5,85	5,83	5,10	4,91	4,75
Kab. Barito Timur	7,64	7,17	6,56	6,32	6,09
Kab. Murung Raya	6,32	5,88	6,28	6,00	5,85
Kota Palangka Raya	3,75	3,62	3,47	3,35	3,44

Sumber: BPS (Susenas)

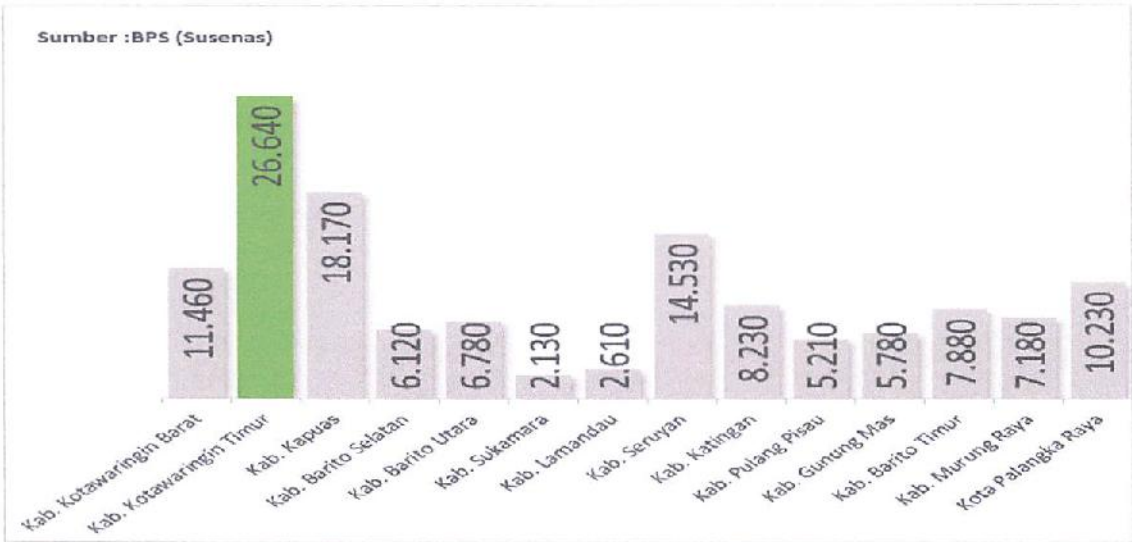
Tren positif juga terjadi pada jumlah penduduk miskin absolut di tahun 2020 yang mencapai 26.640 jiwa atau turun sebesar 741 jiwa dari tahun 2019 yang mencapai 27.381 jiwa seperti yang terlihat pada Gambar 3.3 berikut ini



Gambar 3.3 Relevansi Tren Jumlah Penduduk Miskin (dalam jiwa) Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa selama periode 2016 s.d. 2020 secara keseluruhan terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari 27.390 jiwa pada tahun 2016 menjadi 26.640 jiwa pada tahun 2020 atau turun sebanyak 750 jiwa. Berbeda halnya dengan jumlah penduduk miskin di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 terjadi tren positif jumlah penduduk miskin, namun di periode 2019-2020 terjadi peningkatan dari 131.240 jiwa pada tahun 2019 menjadi 132.940 jiwa pada tahun 2020. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada jalur yang tepat. Beberapa ahli menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin lebih representatif dikarenakan secara riil menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh tiap daerah.

Pada tingkat regional Kalimantan Tengah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 menduduki peringkat tertinggi diantara kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Sukamara yakni sebanyak 2.130 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk miskin tahun 2020 antar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut ini



Gambar 3.4 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (dalam jiwa) Kab. Kotim Tahun 2020

Gambar 3.4 memperlihatkan bahwa secara absolut, pada tahun 2020 beban terbesar terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Walaupun pada tahun tersebut jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk salah satu dari beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yang secara detail dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut

Tabel 3.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (dalam jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kotawaringin Barat	14.110	13.270	12.900	12.755	11.460
Kab. Kotawaringin Timur	27.390	27.700	28.200	27.381	26.640
Kab. Kapuas	19.960	18.800	18.520	18.232	18.170
Kab. Barito Selatan	6.090	5.950	6.160	5.991	6.120
Kab. Barito Utara	6.900	6.720	6.500	6.457	6.780
Kab. Sukamara	2.120	1.990	1.960	2.013	2.130
Kab. Lamandau	2.880	2.740	2.520	2.472	2.610
Kab. Seruyan	14.570	14.040	14.560	14.659	14.530
Kab. Katingan	10.100	9.510	8.730	8.512	8.230
Kab. Pulang Pisau	6.880	6.540	5.710	5.390	5.210
Kab. Gunung Mas	6.550	6.670	5.960	5.857	5.780
Kab. Barito Timur	8.880	8.560	8.050	7.966	7.880
Kab. Murung Raya	7.100	6.750	7.390	7.213	7.180
Kota Palangka Raya	9.960	9.910	9.780	9.692	10.230

Sumber: BPS (Susenas)

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa dari tahun 2019 s.d. tahun 2020, dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah terdapat 9 kabupaten yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, dan 3 kabupaten serta 1 kota mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin. Apabila digabungkan, Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan tidak

serta merta disertai dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Dalam hal ini penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur juga diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini memperkuat indikasi bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada jalur yang tepat.

3.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Selain mengetahui tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, pemerintah daerah juga harus mengetahui tingkat kedalaman maupun tingkat keparahan kemiskinan. Dengan demikian gambaran atau profil kemiskinan di daerah akan lebih komprehensif sehingga penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih relevan dan lebih akurat. Tingkat kedalaman kemiskinan menunjukkan seberapa jauh perbedaan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang memiliki interpretasi bahwa semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Selama periode tahun 2016 s.d. 2020 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,07 poin atau meningkat dari 0,80 di tahun 2016 menjadi 0,87 di tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019, indeks kedalaman kemiskinan justru mengalami penurunan sebesar 0,05 poin. Tren perkembangan indeks kedalaman kemiskinan sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.5 sebagai berikut:

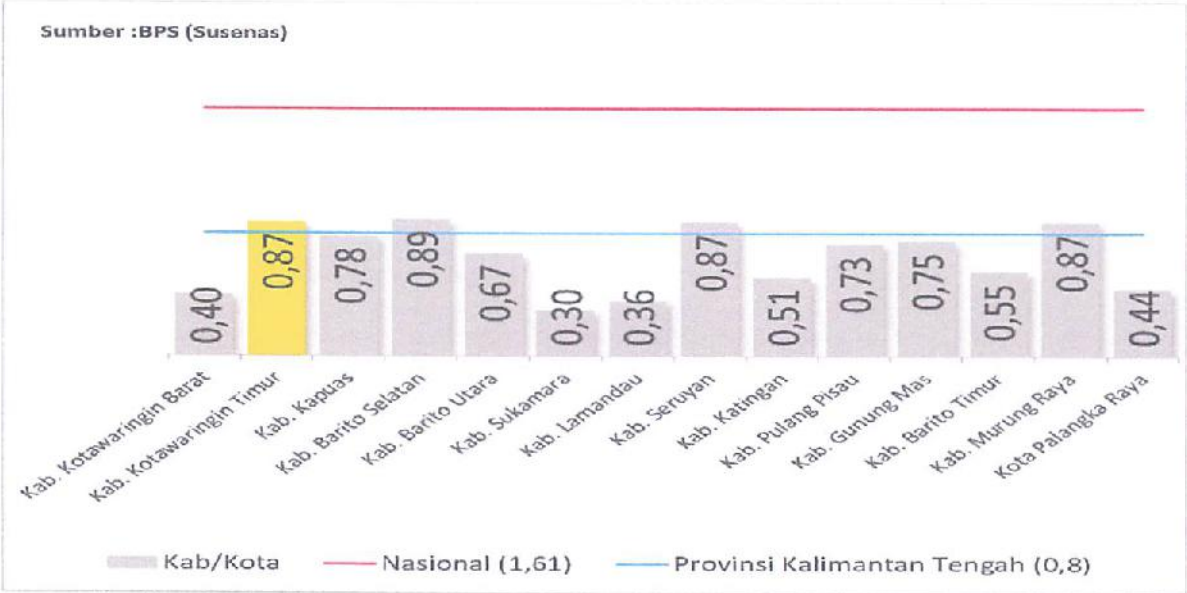


Gambar 3.5 Relevansi Tren Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.5 memperlihatkan bahwa tren perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode

tahun 2016 s.d. tahun 2020 relatif kurang baik jika dibandingkan dengan tren perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di tingkat Nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah yang keduanya memiliki tren positif. Akan tetapi pada periode tahun 2019-2020, tren indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tren indeks kedalaman kemiskinan di tingkat Nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah pada periode yang sama. Di tingkat Nasional terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 1,55 pada tahun 2019 menjadi 1,61 pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,06 poin. Dan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari 0,70 pada tahun 2019 menjadi 0,8 pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,1 poin.

Secara regional, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur masih berada di atas indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan angka tertinggi kedua bersama dengan 2 kabupaten yang lain yaitu Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Murung Raya yang sama-sama berada pada angka 0,87. Indeks kedalaman kemiskinan terendah pada tahun 2020 dicapai oleh Kabupaten Sukamara pada angka 0,30. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Barito Selatan yang mencapai angka 0,89 Perbandingan relatif indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020 tersaji pada Gambar 3.6 berikut ini.



Gambar 3.6 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) Kab. Kotim Tahun 2020 Pada periode tahun 2019-2020, tidak semua kabupaten/kota mengalami tren penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Dari 14 kabupaten/kota,

terdapat 8 kabupaten yang mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan, sedangkan 6 kabupaten/kota sisanya mengalami kenaikan. Perkembangan secara detail indeks kedalaman kemiskinan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini.

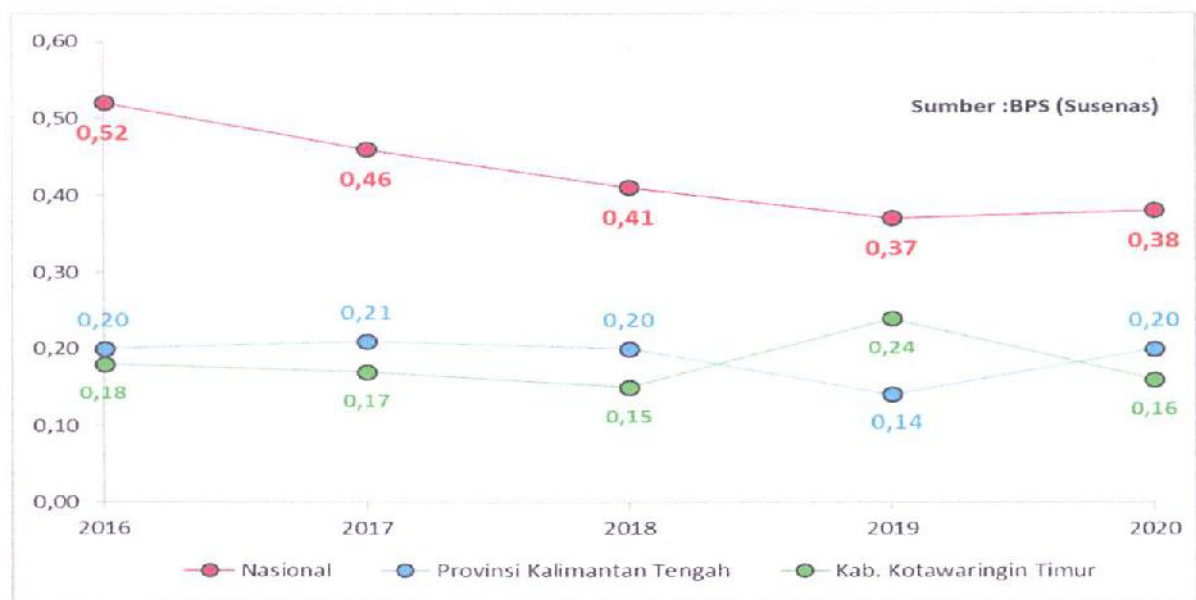
Tabel 3.3 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kotawaringin Barat	0,77	0,57	0,55	0,55	0,40
Kab. Kotawaringin Timur	0,80	0,76	0,75	0,92	0,87
Kab. Kapuas	0,60	0,92	0,79	0,56	0,78
Kab. Barito Selatan	0,50	0,48	0,63	0,39	0,89
Kab. Barito Utara	0,71	0,55	0,59	0,76	0,67
Kab. Sukamara	0,62	0,38	0,43	0,51	0,30
Kab. Lamandau	0,70	0,46	0,34	0,22	0,36
Kab. Seruyan	1,37	0,99	1,09	1,26	0,87
Kab. Katingan	0,85	0,92	0,54	0,94	0,51
Kab. Pulang Pisau	0,74	0,72	0,50	0,54	0,73
Kab. Gunung Mas	0,60	0,72	0,87	0,99	0,75
Kab. Barito Timur	1,29	0,97	1,01	0,72	0,55
Kab. Murung Raya	1,02	0,58	1,20	0,69	0,87
Kota Palangka Raya	0,41	0,51	0,63	0,43	0,44

Sumber: BPS (Susenas)

Sepemahaman dengan tingkat kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan seberapa jauh perbedaan pengeluaran orang termiskin relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok masyarakat miskin pada suatu wilayah tertentu. Artinya tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan digunakan Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) yang memiliki interpretasi bahwa semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

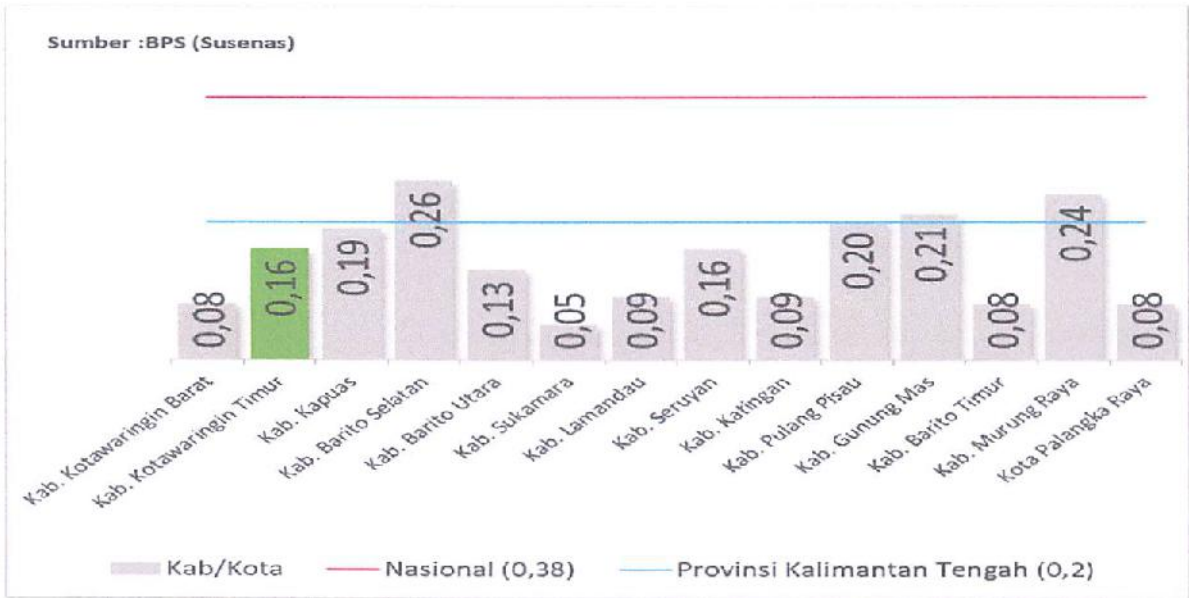
Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 terjadi penurunan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,02 poin atau turun dari 0,18 di tahun 2016 menjadi 0,16 di tahun 2020. Penurunan terbesar indeks keparahan kemiskinan terjadi pada periode tahun 2019 - 2020 yakni sebesar 0,08 poin atau turun dari 0,24 di tahun 2019 menjadi 0,16 di tahun 2020. Tren perkembangan indeks keparahan kemiskinan sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.7 sebagai berikut:



Gambar 3.7 Relevansi Tren Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Seperti halnya indeks kedalaman kemiskinan, Gambar 3.7 memperlihatkan bahwa tren perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 relatif kurang baik jika dibandingkan dengan tren perkembangan indeks keparahan kemiskinan di tingkat Nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah yang keduanya memiliki tren positif. Akan tetapi pada periode tahun 2019-2020, tren indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tren indeks keparahan kemiskinan di tingkat Nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah pada periode yang sama. Di tingkat Nasional terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari 0,37 pada tahun 2019 menjadi 0,38 pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,01 poin. Dan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari 0,14 pada tahun 2019 menjadi 0,20 pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,06 poin.

Secara regional Kalimantan Tengah di tahun 2020, indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Barito Selatan pada angka 0,26. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten Sukamara pada angka 0,05. Perbandingan relatif indeks keparahan kemiskinan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.8 berikut ini



Gambar 3.8 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Kotim Tahun 2020
Seperti halnya indeks kedalaman kemiskinan pada periode yang sama yakni tahun 2019-2020, tidak semua kabupaten/kota mengalami tren penurunan indeks keparahan kemiskinan. Dari 14 kabupaten/kota, terdapat 9 kabupaten/kota yang mengalami penurunan indeks keparahan kemiskinan, sedangkan 5 kabupaten sisanya mengalami kenaikan. Perkembangan secara detail indeks keparahan kemiskinan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/Kota se_Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kotawaringin Barat	0,16	0,11	0,12	0,13	0,08
Kab. Kotawaringin Timur	0,18	0,17	0,15	0,24	0,16
Kab. Kapuas	0,10	0,20	0,22	0,10	0,19
Kab. Barito Selatan	0,09	0,09	0,21	0,05	0,26
Kab. Barito Utara	0,15	0,10	0,10	0,17	0,13
Kab. Sukamara	0,19	0,08	0,11	0,10	0,05
Kab. Lamandau	0,21	0,09	0,06	0,03	0,09
Kab. Seruyan	0,33	0,20	0,27	0,31	0,16
Kab. Katingan	0,19	0,27	0,09	0,30	0,09
Kab. Pulang Pisau	0,14	0,18	0,09	0,11	0,20
Kab. Gunung Mas	0,13	0,12	0,24	0,26	0,21
Kab. Barito Timur	0,34	0,21	0,25	0,12	0,08
Kab. Murung Raya	0,23	0,09	0,34	0,14	0,24
Kota Palangka Raya	0,06	0,14	0,21	0,09	0,08

Sumber: BPS (Susenas)

Secara kumulatif, Gambar 3.5 dan Gambar 3.7 memperlihatkan bahwa pada periode tahun 2019 s.d. 2020 terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Penurunan indeks kedalaman dan indeks keparahan

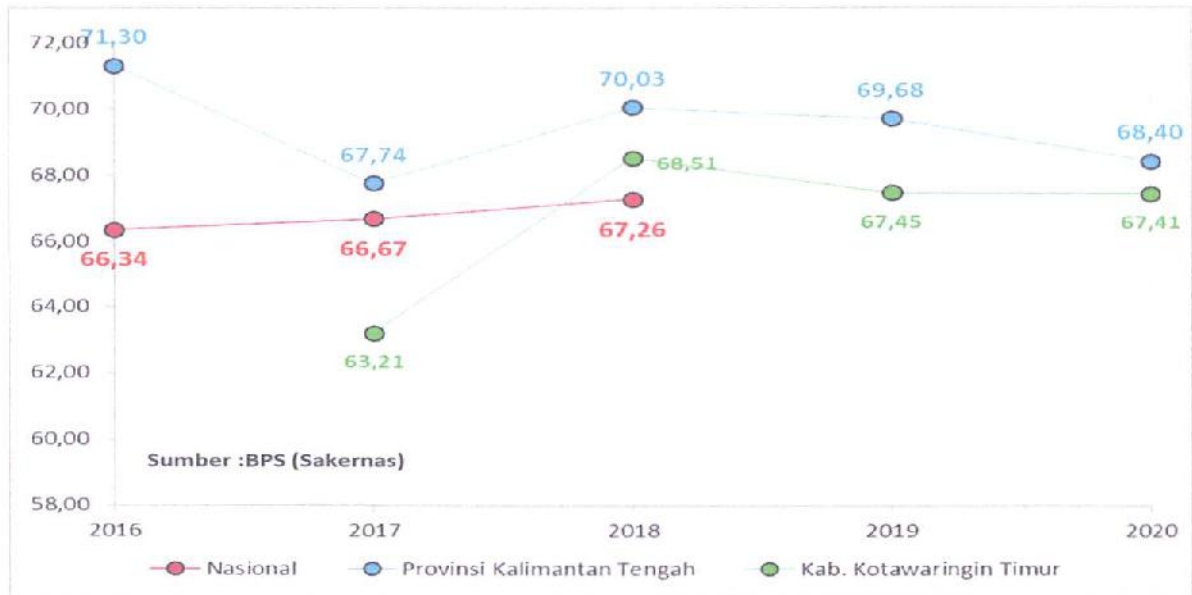
kemiskinan pada periode tersebut mengindikasikan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

3.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tenaga kerja merupakan modal bagi pergerakan roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenagakerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tetap harus didukung dengan ketersediaan tenaga kerja, baik itu pekerja ahli maupun pekerja kasar (buruh). Dengan demikian pembangunan ketenagakerjaan juga perlu ditunjang dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya. Hal ini sejalan dengan peranan sumber daya manusia sebagai aktuator pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung turut menentukan langkah, karakteristik dan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Salah satu indikator yang digunakan dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai untuk melihat fluktuasi dari partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Secara statistik, TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara logis, ketersediaan pasokan tenaga kerja ini juga harus diimbangi dengan permintaan tenaga kerja yang tersedia dalam lapangan kerja.

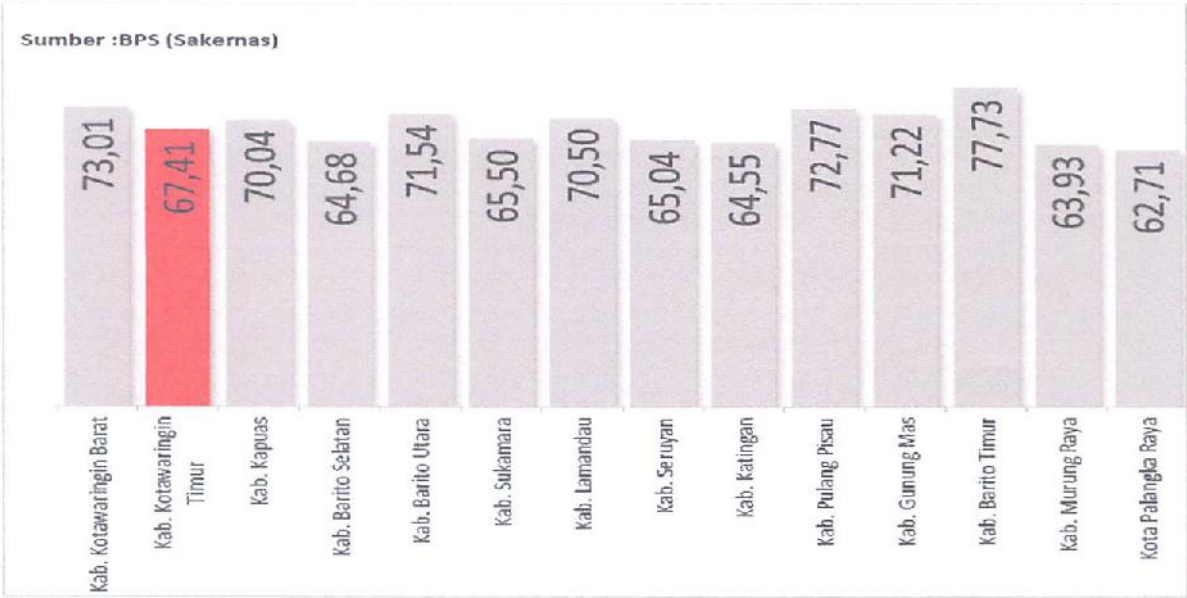
Selama periode tahun 2017 s.s. tahun 2020, TPAK Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan yakni dari 63,21 persen pada tahun 2017 menjadi 67,41 persen pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 4,20 persen. Tren perkembangan TPAK Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut ini



Gambar 3.9 Relevansi Tren TPAK Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.9 memperlihatkan bahwa dari tahun 2017 s.d. tahun 2020 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 25.719 jiwa. Hal ini berarti semakin banyak tersedia tenaga kerja untuk dapat terlibat atau dilibatkan dalam aktivitas produktif secara ekonomi. Pada gambar tersebut juga terlihat bahwa selama periode tahun 2017 s.d. tahun 2020 tren perkembangan TPAK di Kabupaten Kotawaringin Timur sama dengan tren perkembangan TPAK di Provinsi Kalimantan Tengah.

Di tingkat regional Kalimantan Tengah tahun 2020, TPAK Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada posisi tertinggi 7 se-Kalimantan Tengah namun masih di bawah TPAK Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 68,40 persen. TPAK tertinggi terjadi di Kabupaten Barito Timur sebesar 77,73 persen dan terendah terjadi di Kota Palangka Raya pada angka 62,71 persen. Perbandingan relatif TPAK Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.10 berikut ini.



Gambar 3.10 Posisi Relatif TPAK Kab. Korim Tahun 2020

Jika diamati pada periode tahun 2019 s.d. 2020 dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, 10 Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami penurunan angka TPAK, sedangkan 4 Kabupaten mengalami kenaikan angka TPAK. Perkembangan secara detail TPAK Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5 Perkembangan TPAK Kab/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kotawaringin Barat		68,44	72,28	73,43	73,01
Kab. Kotawaringin Timur		63,21	68,51	67,45	67,41
Kab. Kapuas		67,60	69,55	67,37	70,04
Kab. Barito Selatan		61,71	62,28	69,68	64,68
Kab. Barito Utara		69,05	73,97	69,79	71,54
Kab. Sukamara		73,61	74,18	73,37	65,50
Kab. Lamandau		73,00	67,93	68,65	70,50
Kab. Seruyan		72,86	74,90	71,66	65,04
Kab. Katingan		65,97	69,49	70,79	64,55
Kab. Pulang Pisau		74,72	70,98	75,31	72,77
Kab. Gunung Mas		74,87	75,76	73,78	71,22
Kab. Barito Timur		74,11	79,09	74,89	77,73
Kab. Murung Raya		68,83	69,58	66,49	63,93
Kota Palangka Raya		62,40	62,99	64,45	62,71

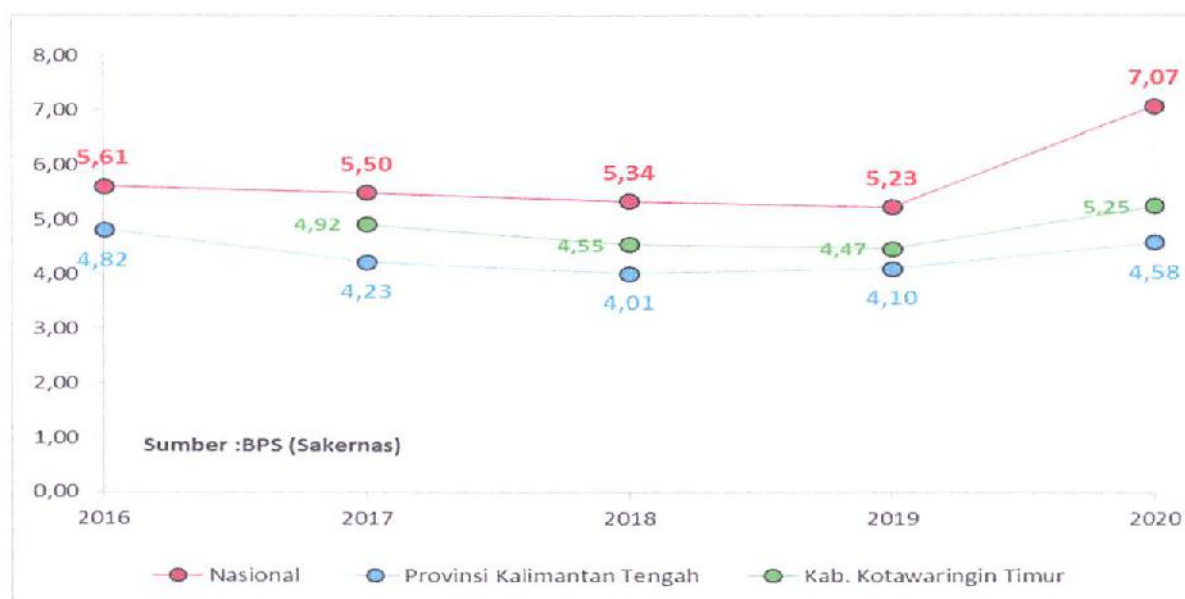
Sumber: BPS (Sakernas)

3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja, yakni mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan; mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha; mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan; serta mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Secara normatif, semakin tinggi TPT di suatu wilayah, maka semakin banyak lapangan pekerjaan yang harus disediakan.

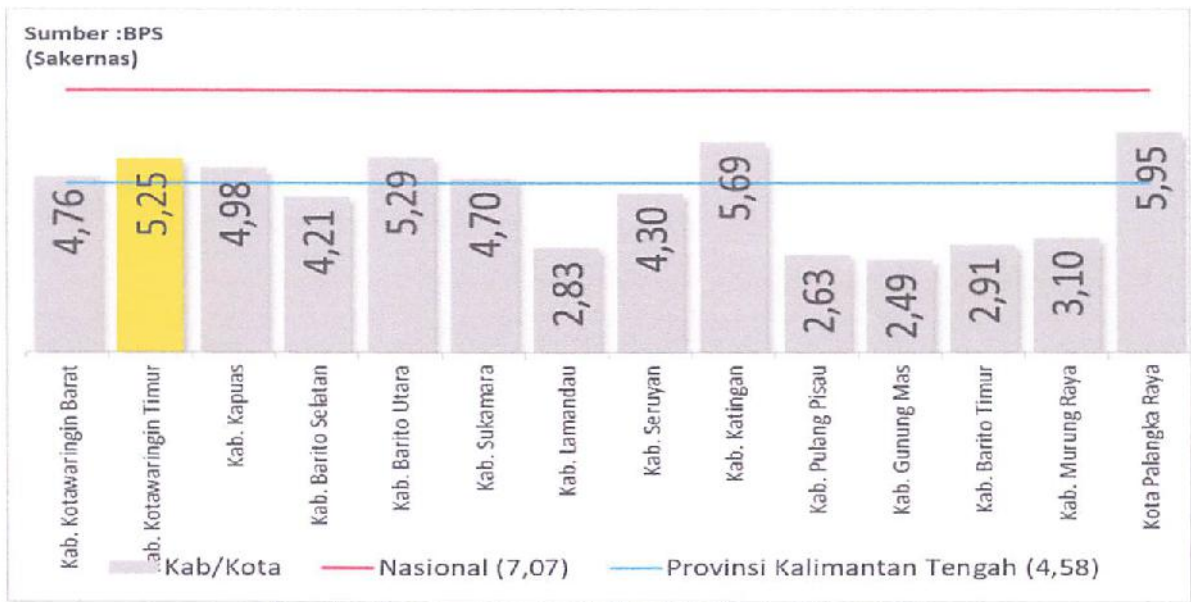
Selama periode tahun 2017 s.d. tahun 2020, terjadi peningkatan drastis pada TPT di Kabupaten Kotawaringin Timur yakni dari 4,92 persen pada tahun 2017 menjadi 5,25 persen pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,33 persen. Tren perkembangan TPT pada periode tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut ini.



Gambar 3.11 Relevansi Tren TPT Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.11 memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2017 s.d. tahun 2020 terjadi tren negatif perkembangan TPT tidak hanya terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur tetapi juga di tingkat Nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah. Perbandingan terbalik antara tren TPAK pada Gambar 3.9 dengan TPT pada Gambar 3.11 memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan yang tinggi antara pasokan tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja dalam pasar kerja. Fenomena ini diperkuat dengan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2020 yang menyebabkan peningkatan pengangguran sebanyak 1.789 jiwa.

Pada tahun 2020, TPT Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 4,58 persen, dan hanya ada 7 Kabupaten yang TPT-nya berada di bawah TPT Provinsi Kalimantan Tengah. TPT tertinggi terjadi di Kota Palangka Raya pada angka 5,95 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Gunung Mas pada angka 2,49 persen. Perbandingan relatif TPT Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 3.12 berikut ini



Gambar 3.12 Posisi Relatif TPT Kab. Kotim Tahun 2020

Gambar 3.12 memperlihatkan bahwa TPT Kabupaten Kotawaringin Timur masih di bawah TPT Nasional yang berada pada angka 7,07 persen, namun masih di atas TPT Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 4,58 persen. Secara keseluruhan Kabupaten/Kota, TPT Kabupaten Kotawaringin Timur menduduki posisi tertinggi ke-4 se-Kalimantan Tengah.

Selama periode tahun 2019 s.d. tahun 2020, peningkatan TPT dialami oleh 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan 4 Kabupaten yang mengalami penurunan TPT yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Gunung Mas. Selama periode tersebut, peningkatan TPT tertinggi terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 2,14 persen, sedangkan penurunan TPT tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 0,39 persen. Perkembangan secara detail TPT Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6 Perkembangan TPT Kab/Kota se Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kotawaringin Barat		2,17	3,01	2,62	4,76
Kab. Kotawaringin Timur		4,92	4,55	4,47	5,25
Kab. Kapuas		5,42	4,08	5,37	4,98
Kab. Barito Selatan		4,09	4,33	4,18	4,21
Kab. Barito Utara		5,19	4,34	3,92	5,29
Kab. Sukamara		4,83	4,39	4,90	4,70
Kab. Lamandau		1,35	2,42	2,34	2,83
Kab. Seruyan		4,79	4,40	4,49	4,30
Kab. Katingan		3,81	4,78	5,45	5,69
Kab. Pulang Pisau		1,62	2,15	1,74	2,63
Kab. Gunung Mas		1,17	2,19	2,64	2,49
Kab. Barito Timur		4,68	3,50	2,89	2,91

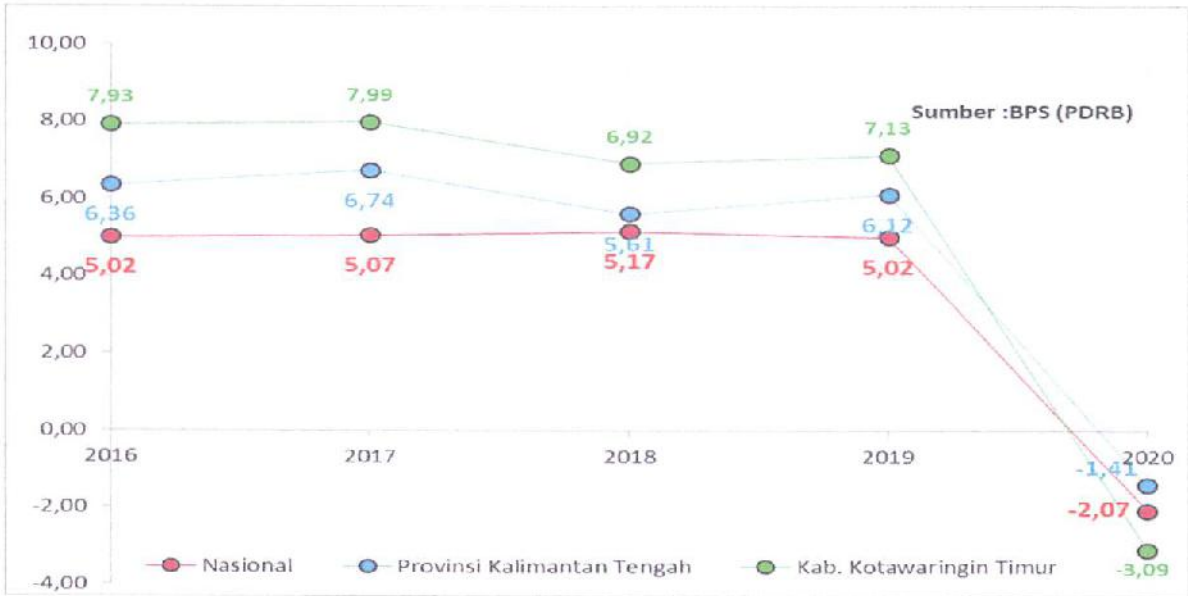
Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Murung Raya		2,78	3,37	3,07	3,10
Kota Palangka Raya		7,26	5,81	5,78	5,95

Sumber: BPS (Sakernas)

3.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Secara statistik, pertumbuhan ekonomi ini dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (PDRB ADHK 2010). Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

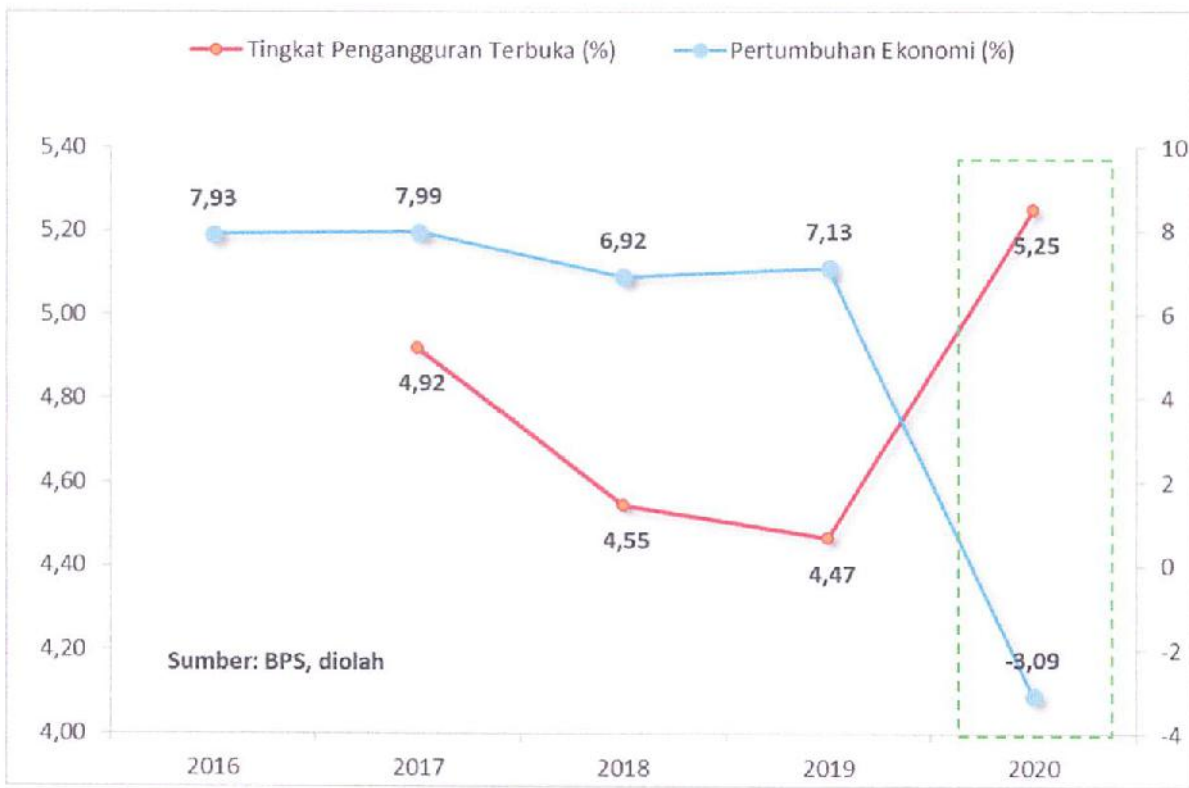
Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 terjadi tren negatif pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni dari 7,93 persen pada tahun 2016 menjadi -3,09 persen pada tahun 2020. Tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.13 berikut ini.



Gambar 3.13 Relevansi Tren Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kotim Tahun 2016-2020

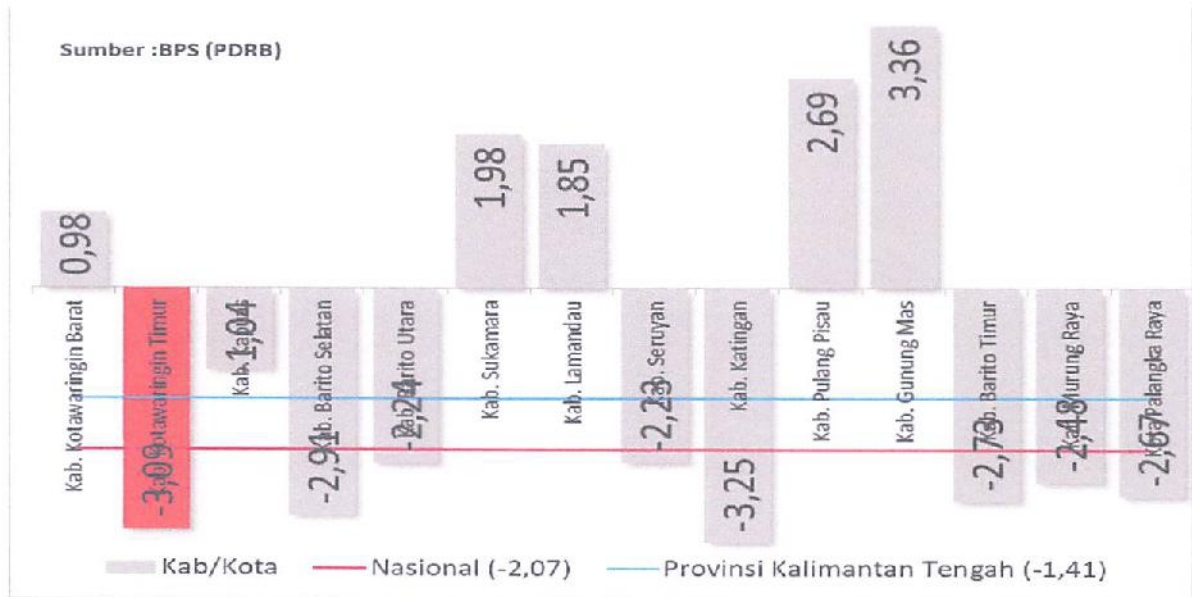
Gambar 3.13 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi baik di tingkat Kabuapten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga tingkat Nasional. Kontraksi tertinggi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar -3,09 persen.

Jika Gambar 3.14 disandingkan dengan Gambar 3.11 akan memperlihatkan indikasi bahwa penurunan produksi barang dan jasa disebabkan salah satunya oleh TPT yang semakin tinggi di masa pandemi COVID-19, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.14 berikut ini



Gambar 3.14 Relevansi TPT dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kotim Tahun 2016-2020
Gambar 3.14 memperlihatkan bahwa ada gejala serius yang memerlukan kebijakan yang efektif dan efisien.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 tidak hanya terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Nasional mengalami pertumbuhan sebesar -2,07 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah sebesar -1,41 persen. Perbandingan relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.15 berikut ini



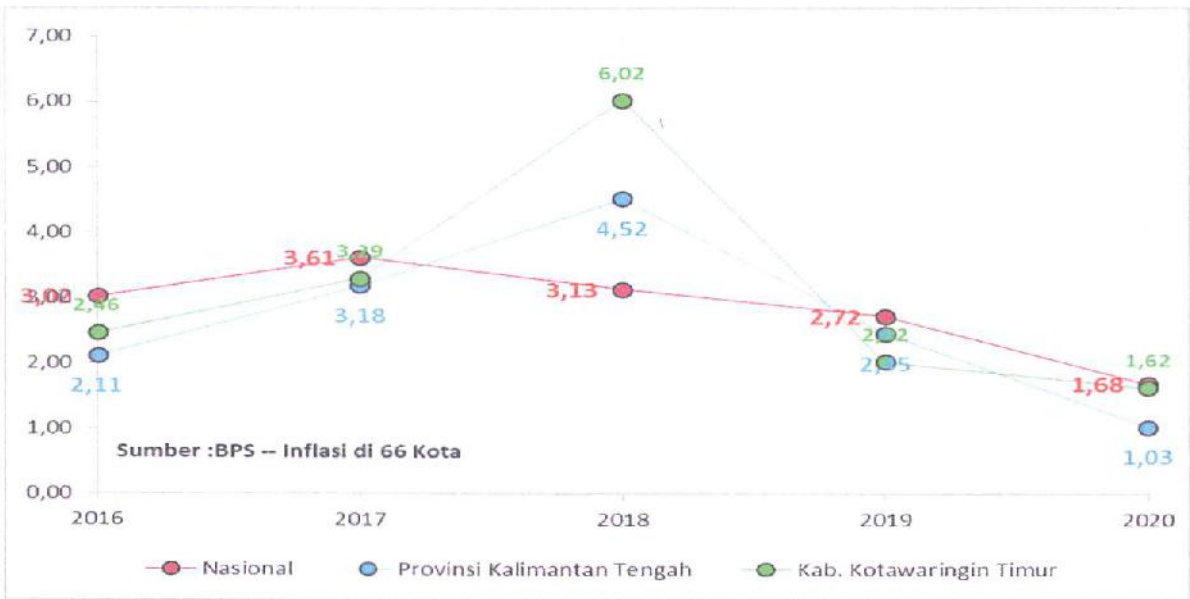
Gambar 3.15 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kotim Tahun 2020

Gambar 3.15 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Gunung Mas pada angka 3,36 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Katingan pada angka -3,25 persen.

3.1.6 Tingkat Inflasi

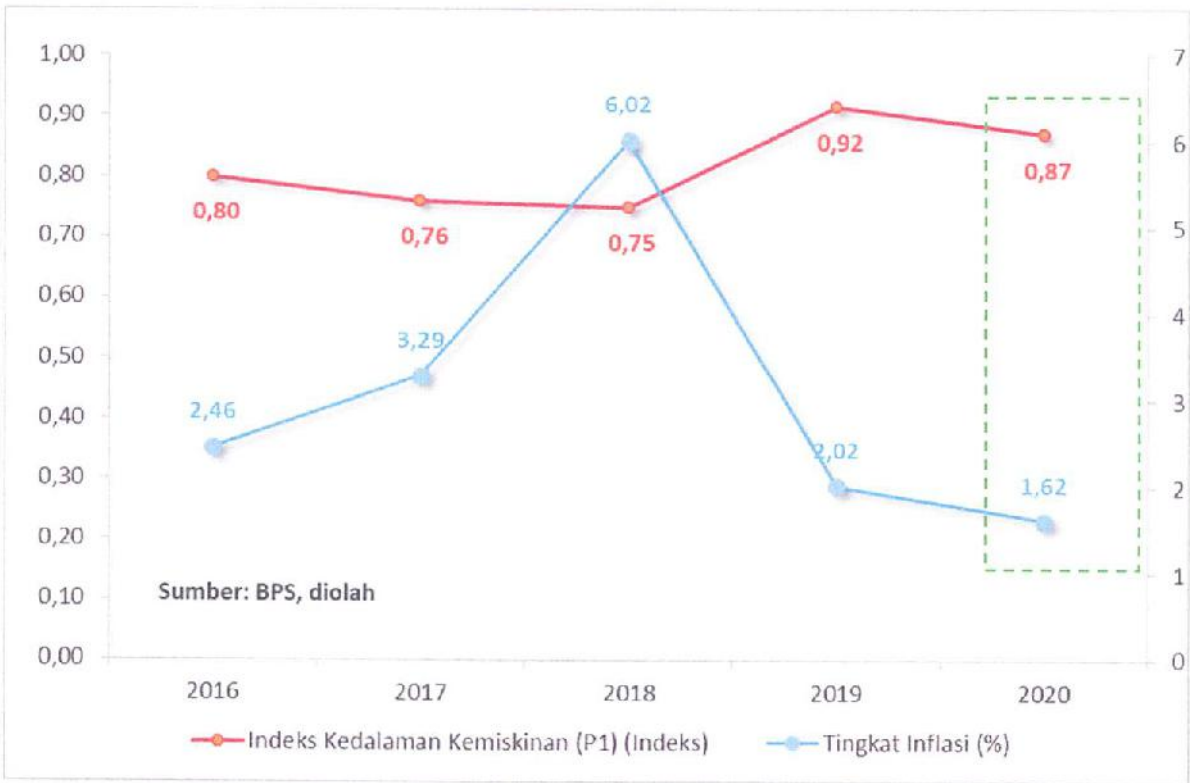
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam daerah meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami tren positif yakni turun dari angka 2,46 persen pada tahun 2016 menjadi 1,62 persen pada tahun 2020. Perkembangan tingkat inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.16 berikut ini.



Gambar 3.16 Relevansi Tren Tingkat Inflasi Kab. Kotim Tahun 2016-2020

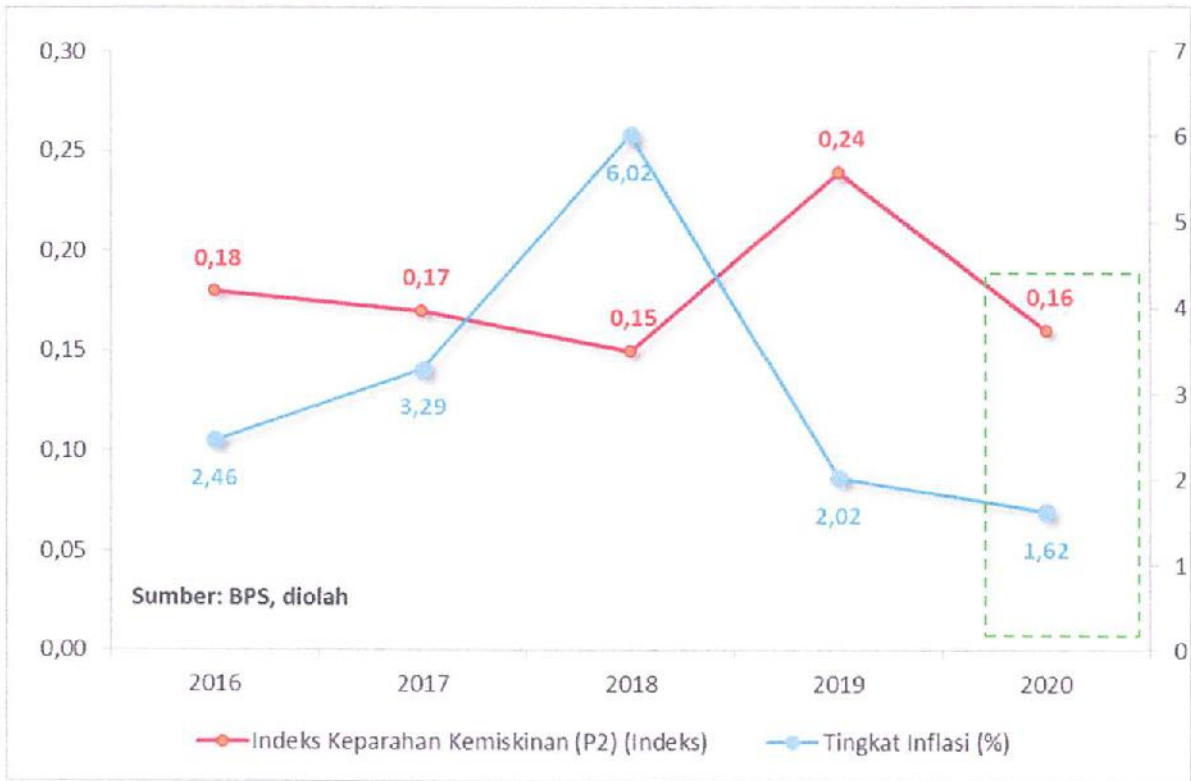
Gambar 3.16 memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 juga terjadi penurunan faktor yang melemahkan daya beli masyarakat di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun tingkat Nasional. Hal ini tentunya menjadi sinyal positif pada proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini dapat dilihat bahwa tren penurunan inflasi sejalan dengan tren penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) seperti yang terlihat pada Gambar 3.17 berikut ini



Gambar 3.17 Relevansi Tingkat Inflasi dan P1 Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Relevansi yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan (P2), yakni penurunan tingkat inflasi pada tahun 2020 diikuti dengan

penurunan indeks keparahan kemiskinan (P2) pada tahun yang sama, seperti yang terlihat pada Gambar 3.18 berikut ini



Gambar 3.18 Relevansi Tingkat Inflasi dan P2 Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.17 dan Gambar 3.18 memperlihatkan bahwa meskipun terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi pada angka minus. Upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin melalui stabilisasi tingkat inflasi dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) maupun indeks keparahan kemiskinan (P2).

3.1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK)

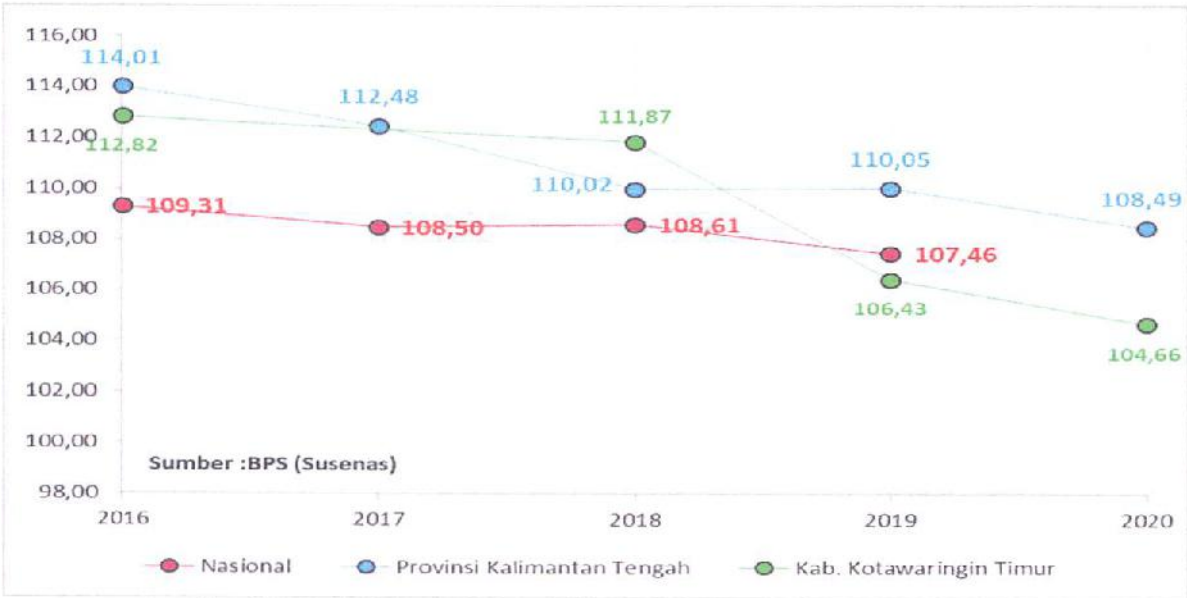
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Secara statistik, APK dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Perhitungan APK secara normatif memberikan manfaat diantaranya:

- Untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan
- Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu

- Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya

Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2021, APK SD Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami penurunan dari 112,82 persen pada tahun 2016 menjadi 104,66 persen pada tahun 2020 atau turun sebesar 8,16 persen. Tren perkembangan APK SD Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 seperti yang disajikan pada Gambar 3.19 berikut ini.



Gambar 3.19 Relevansi Tren APK SD Kab. Kotim Tahun 2016-2020

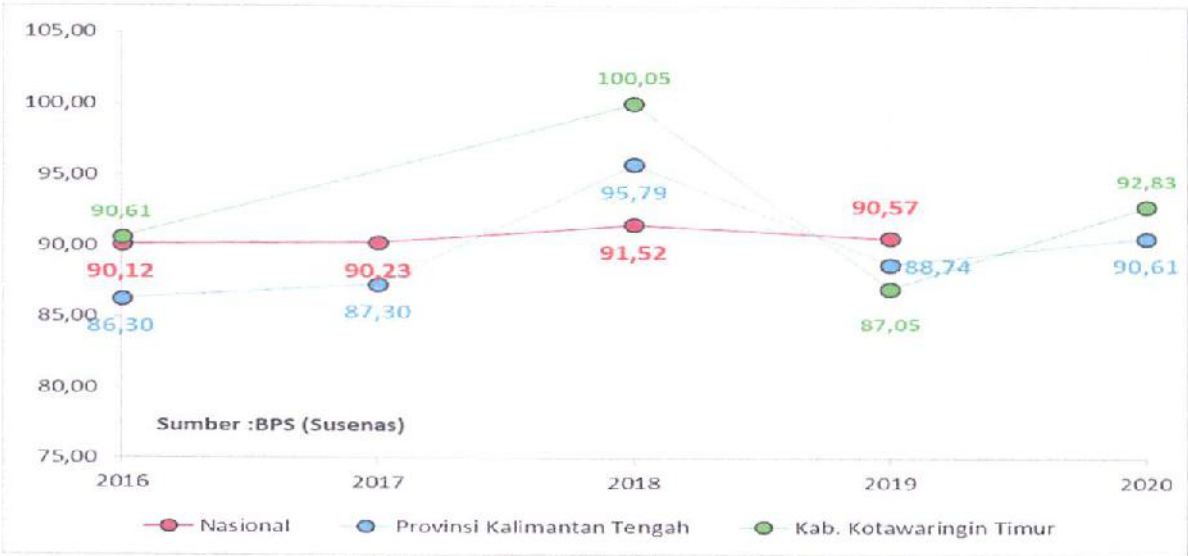
Gambar 3.19 memperlihatkan bahwa tren penurunan APK SD juga terjadi di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Di tingkat Nasional, APK SD turun dari 109,31 persen pada tahun 2016 menjadi 107,46 persen pada tahun 2019. Sedangkan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, APK SD turun dari 114,01 persen pada tahun 2016 menjadi 108,49 persen pada tahun 2020.

Di tingkat regional Kalimantan Tengah pada tahun 2020, APK SD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Katingan pada angka 114,12 persen, sedangkan APK SD terendah dicapai oleh Kabupaten Sukamara pada angka 102,65 persen. Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada peringkat ke-3 terendah untuk APK SD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020, secara rinci tersaji pada Gambar 3.20 berikut ini



Gambar 3.20 Posisi Relatif APK SD Kab. Kotim Tahun 2020

Berkebalikan dengan tren APK SD, tren perkembangan APK SMP selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2021, menunjukkan tren positif. APK SMP Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan dari 90,61 persen pada tahun 2016 menjadi 92,83persen pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 2,22persen. Tren perkembangan APK SMP Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 seperti yang disajikan pada Gambar 3.21 berikut ini



Gambar 3.21 Relevansi Tren APK SMP Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.21 memperlihatkan bahwa tren peningkatan APK SMP juga terjadi di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Di

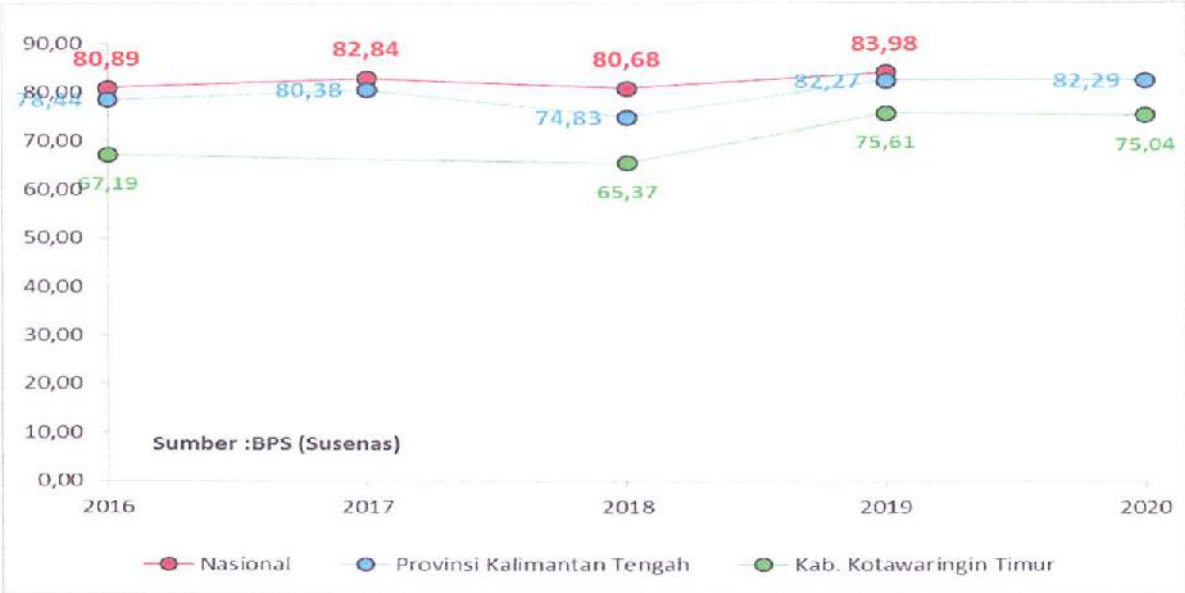
tingkat Nasional, APK SMP naik dari 90,12 persen pada tahun 2016 menjadi 90,57 persen pada tahun 2019. Sedangkan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, APK SMP naik dari 86,30 persen pada tahun 2016 menjadi 90,61 persen pada tahun 2020.

Di tingkat regional Kalimantan Tengah pada tahun 2020, APK SMP tertinggi dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan pada angka 104,10 persen, sedangkan APK SMP terendah dicapai oleh Kabupaten Katingan pada angka 78,27 persen. Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada peringkat ke-5 tertinggi untuk APK SMP Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020, secara rinci tersaji pada Gambar 3.22 berikut ini



Gambar 3.22 Posisi Relatif APK SMP Kab. Kotim Tahun 2020

Sejalan dengan tren APK SMP, tren perkembangan APK SMA selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2021, menunjukkan tren positif. APK SMA Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan dari 67,19 persen pada tahun 2016 menjadi 75,04 persen pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 7,85persen. Tren perkembangan APK SMA Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 seperti yang disajikan pada Gambar 3.23 berikut ini



Gambar 3.23 Relevansi Tren APK SMA Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.23 memperlihatkan bahwa tren peningkatan APK SMA juga terjadi di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Di tingkat Nasional, APK SMA naik dari 80,89 persen pada tahun 2016 menjadi 83,98 persen pada tahun 2019. Sedangkan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, APK SMA naik dari 78,44 persen pada tahun 2016 menjadi 82,29 persen pada tahun 2020.

Di tingkat regional Kalimantan Tengah pada tahun 2020, APK SMA tertinggi dicapai oleh Kabupaten Katingan pada angka 109,25 persen, sedangkan APK SMA terendah dicapai oleh Kabupaten Murung Raya pada angka 65,93 persen. Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada peringkat ke-5 terendah untuk APK SMA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020, secara rinci tersaji pada Gambar 3.24 berikut ini



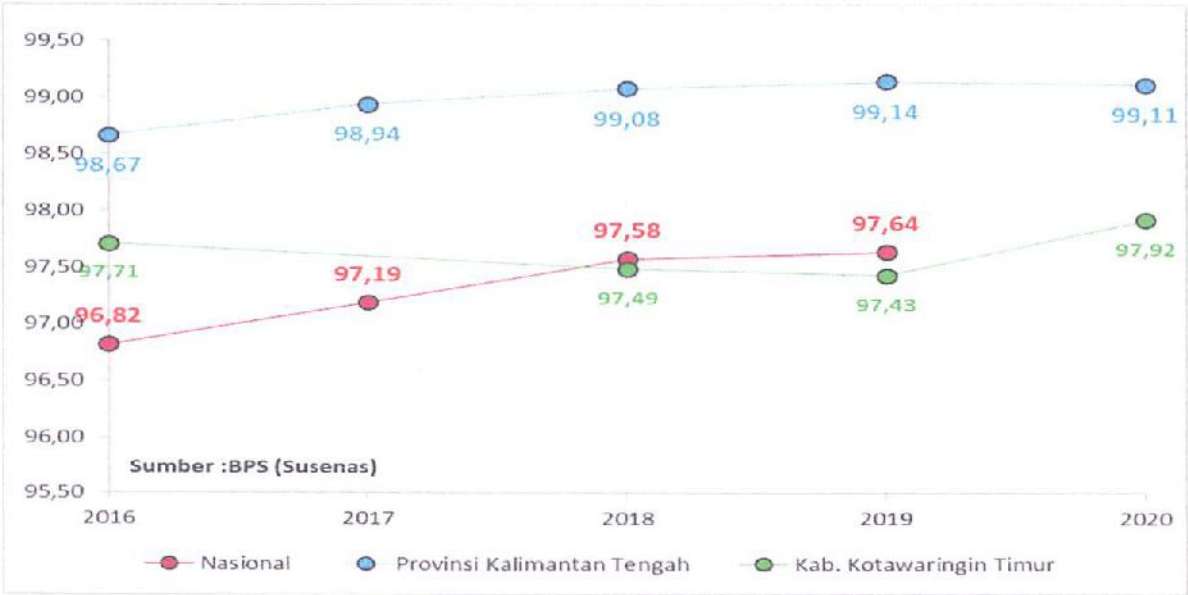
Gambar 3.24 Posisi Relatif APK SMA Kab. Kotim Tahun 2020

3.1.8 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Secara statistik, APM dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2021, APM SD Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan dari 97,71 persen pada tahun 2016 menjadi 97,92persen pada tahun 2020 atau naik sebesar 0,21 persen. Tren perkembangan APM SD Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 seperti yang disajikan pada Gambar 3.25 berikut ini.



Gambar 3.25 Relevansi Tren APM SD Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.25 memperlihatkan bahwa tren peningkatanAPM SD juga terjadi di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Di

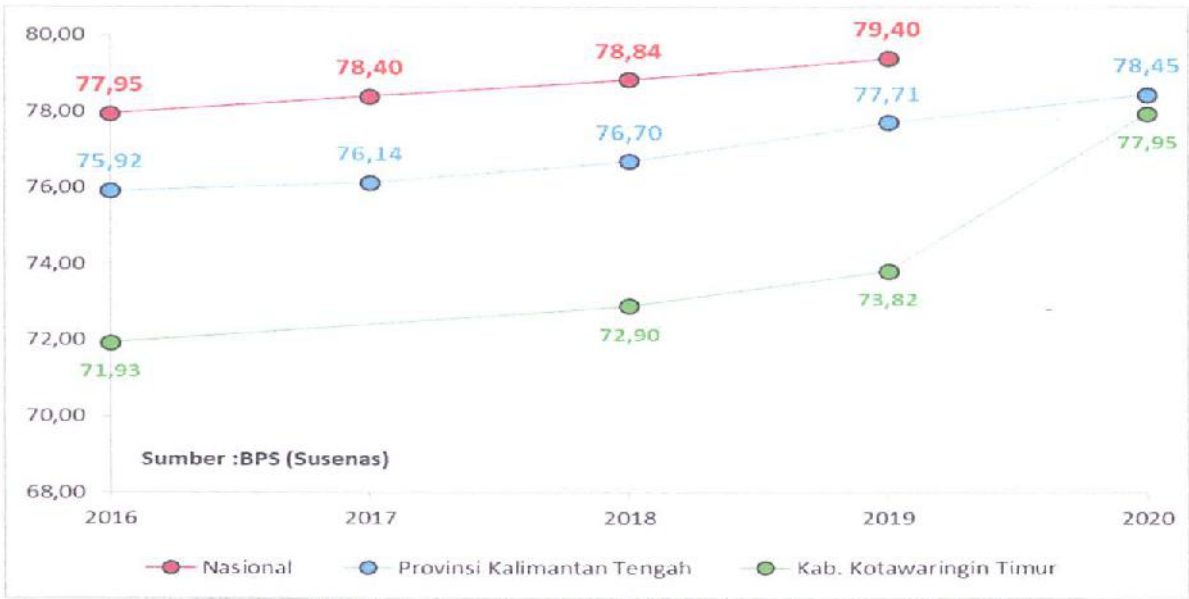
tingkat Nasional, APM SD meningkat dari 96,82 persen pada tahun 2016 menjadi 97,64 persen pada tahun 2019. Sedangkan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, APM SD meningkat dari 98,67 persen pada tahun 2016 menjadi 99,11 persen pada tahun 2020.

Di tingkat regional Kalimantan Tengah pada tahun 2020, APM SD tertinggi dicapai oleh Kabupaten Katingan pada angka 99,85 persen, sedangkan APM SD terendah dicapai oleh Kabupaten Kotawaringin Timur pada angka 97,92 persen, secara rinci tersaji pada Gambar 3.26 berikut ini



Gambar 3.26 Posisi Relatif APM SD Kab. Kotim Tahun 2020

Sejalan dengan tren APM SD, tren perkembangan APM SMP selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2021, menunjukkan tren positif. APM SMP Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan dari 71,93 persen pada tahun 2016 menjadi 77,95persen pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 6,02 persen. Tren perkembangan APM SMP Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 seperti yang disajikan pada Gambar 3.27 berikut ini



Gambar 3.27 Relevansi Tren APM SMP Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.27 memperlihatkan bahwa tren peningkatan APM SMP juga terjadi di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Di tingkat Nasional, APM SMP naik dari 7,95 persen pada tahun 2016 menjadi 79,40 persen pada tahun 2019. Sedangkan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, APM SMP naik dari 75,92 persen pada tahun 2016 menjadi 78,45 persen pada tahun 2020.

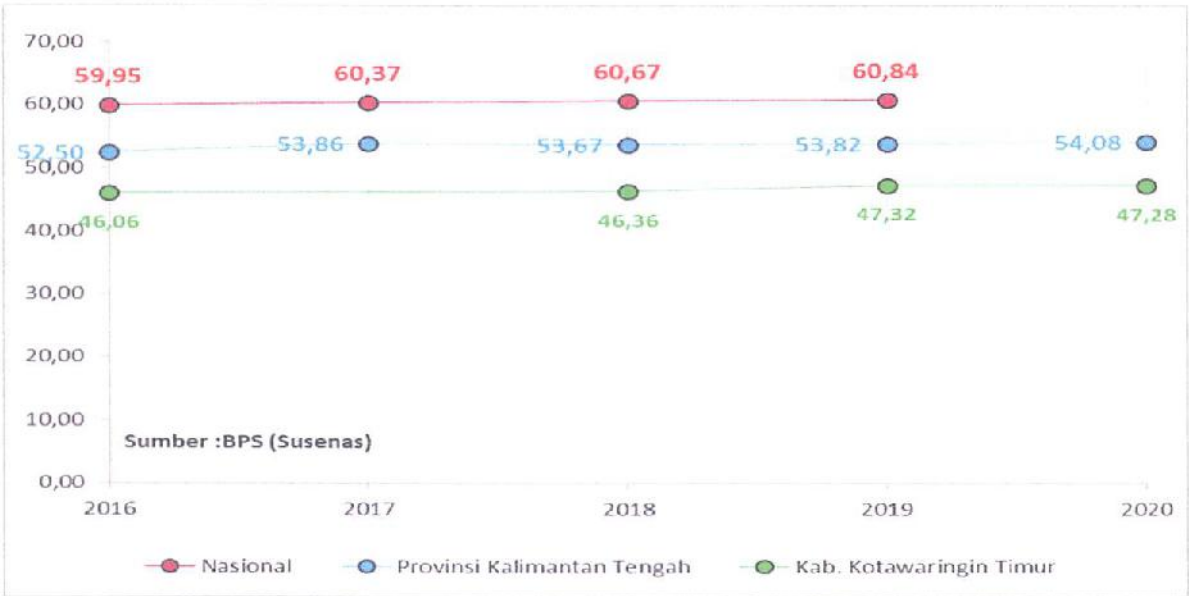
Di tingkat regional Kalimantan Tengah pada tahun 2020, APM SMP tertinggi dicapai oleh Kabupaten Barito Selatan pada angka 92,03 persen, sedangkan APM SMP terendah dicapai oleh Kabupaten Sukamara pada angka 69,34 persen. Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada peringkat ke-7 tertinggi untuk APM SMP Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020, secara rinci tersaji pada Gambar 3.28 berikut ini



Gambar 3.28 Posisi Relatif APM SMP Kab. Kotim Tahun 2020

Tren perkembangan APM SMA selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2021, juga menunjukkan tren positif. APM SMA Kabupaten Kotawaringin

Timur mengalami peningkatan dari 46,06 persen pada tahun 2016 menjadi 47,28 persen pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 1,22 persen. Tren perkembangan APM SMA Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2016 s.d. tahun 2020 seperti yang disajikan pada Gambar 3.29 berikut ini



Gambar 3.29 Relevansi Tren APM SMA Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.29 memperlihatkan bahwa tren peningkatan APM SMA juga terjadi di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Di tingkat Nasional, APM SMA naik dari 59,95 persen pada tahun 2016 menjadi 60,84 persen pada tahun 2019. Sedangkan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, APM SMA naik dari 52,50 persen pada tahun 2016 menjadi 54,08 persen pada tahun 2020.

Di tingkat regional Kalimantan Tengah pada tahun 2020, APM SMA tertinggi dicapai oleh Kabupaten Katingan pada angka 67,62 persen, sedangkan APM SMA terendah dicapai oleh Kabupaten Murung Raya pada angka 42,00 persen. Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada peringkat ke-3 terendah untuk APM SMA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020, secara rinci tersaji pada Gambar 3.30 berikut ini



Gambar 3.30 Posisi Relatif APM SMA Kab. Kotim Tahun 2020

3.1.9 Angka Kematian Bayi (AKB)

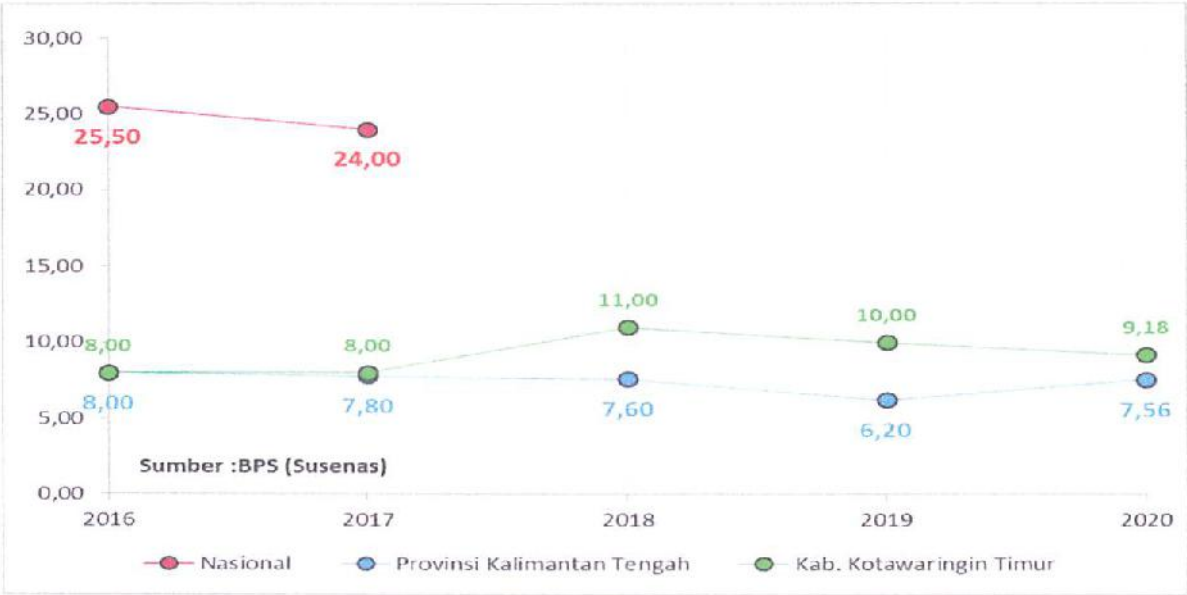
Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi dari pada AKBa. Meskipun target program terkait khusus dengan kematian balita, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:

- > 70 : sangat tinggi
- 40-70 : tinggi
- 20-39 : sedang
- <20 : rendah

Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 perkembangan AKB di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan tren negatif karena terjadi

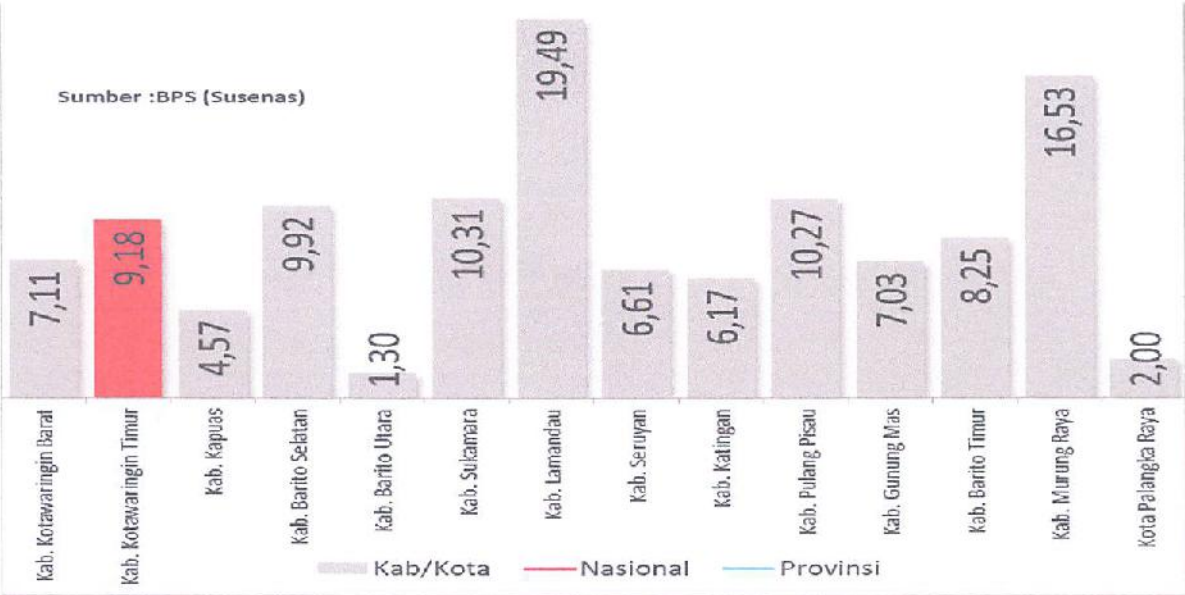
peningkatan dari angka 8 pada tahun 2016 menjadi angka 9,18 pada tahun 2020, atau meningkat hampir 2 kematian untuk tiap 1.000 kelahiran hidup. Namun jika diamati selama periode tahun 2017 s.d. tahun 2020 perkembangan AKB di Kabupaten Kotawaringin Timur justru menunjukkan tren positif yakni terjadi penurunan dari angka 11 pada tahun 2017 menjadi angka 9,18 pada tahun 2020. Secara rinci perkembangan AKB di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.31 berikut ini.



Gambar 3.31 Relevansi Tren AKB Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.31 memperlihatkan bahwa tren AKB selama periode tahun 2017 s.d. tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren yang sama dengan tren perkembangan AKB di Kabupaten Kotawaringin Timur. Di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah AKB mencapai angka 7,6 pada tahun 2017 dan turun menjadi angka 7,56 pada tahun 2020. Namun antara tahun 2019-2020 terjadi peningkatan dari angka 6,20 menjadi angka 7,56. Selama periode tersebut paad Gambar 3.1, AKB di Kabupaten Kotawaringin Timur masih berada pada kategori rendah.

Di tingkat regional Kalimantan Tengah pada tahun 2020, AKB tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lamandau pada angka 19,49, sedangkan AKB terendah dicapai oleh Kabupaten Barito Utara pada angka 1,3. Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada peringkat ke-6 tertinggi untuk AKB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020, secara rinci tersaji pada Gambar 3.32 berikut ini.



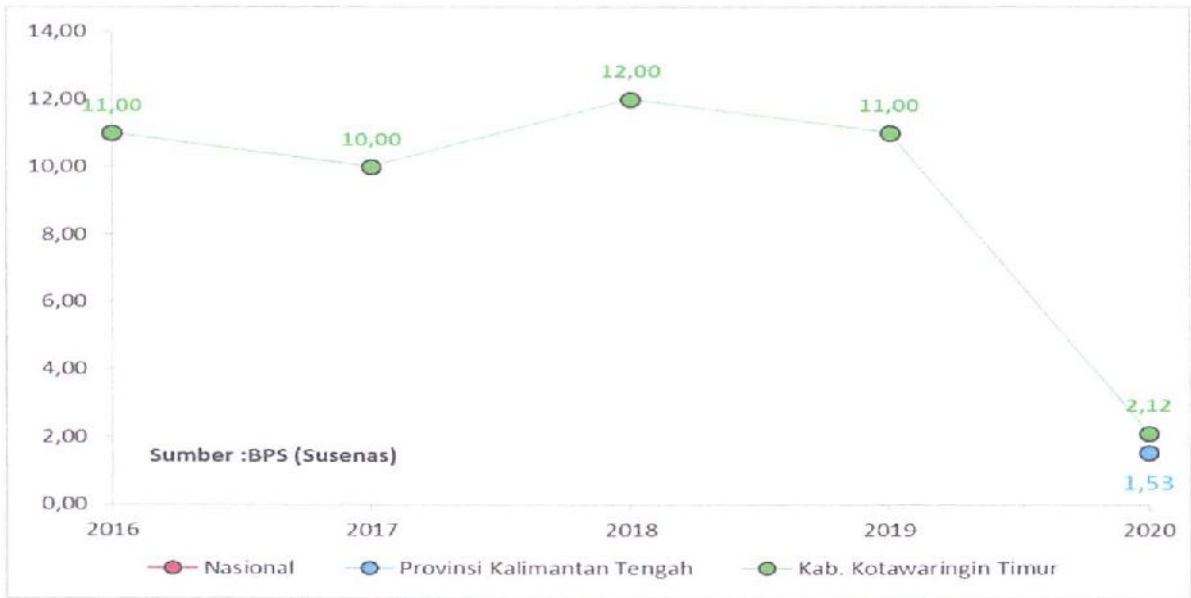
Gambar 3.32 Posisi Relatif AKB Kab. Kotim Tahun 2020

3.1.10 Angka Kematian Balita (AKBa)

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi).Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut:

- >70 : sangat tinggi
- 40 - 70 : tinggi
- 20 - 39 : sedang
- <20 : rendah.

Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020, perkembangan AKBa di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan tren positif karena terjadi penurunan dari angka 11 pada tahun 2016 menjadi angka 2,12 pada tahun 2020 atau menurun sebesar 8 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Dan pada tahun 2020 AKBa Kabupaten Kotawaringin Timur berada di atas AKBa Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 1,53. Adapun tren AKBa Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode tersebut tersaji pada Gambar 3.33 berikut ini.



Gambar 3.33 Tren AKBa Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Di tingkat regional Kalimantan Tengah pada tahun 2020, AKBa tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lamandau pada angka 4,00, sedangkan AKBa terendah dicapai oleh Kabupaten Barito Utara pada angka 0,26. Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada peringkat ke-5 tertinggi untuk AKBa Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020, secara rinci tersaji pada Gambar 3.34 berikut ini.



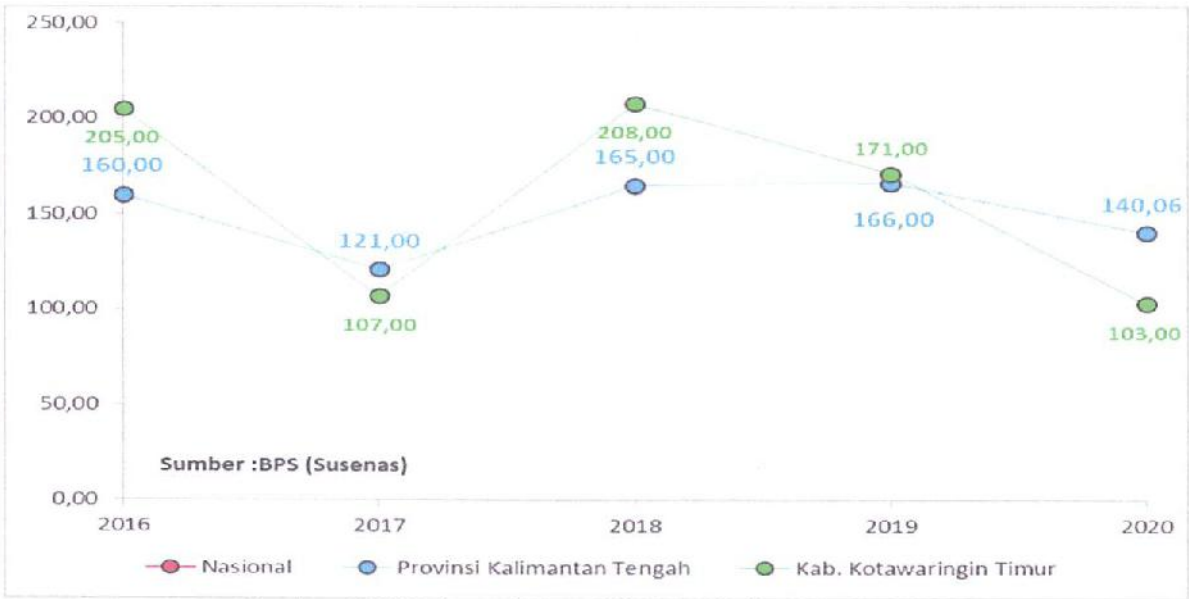
Gambar 3.34 Posisi Relatif AKBa Kab. Kotim Tahun 2020

3.1.11 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor

kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

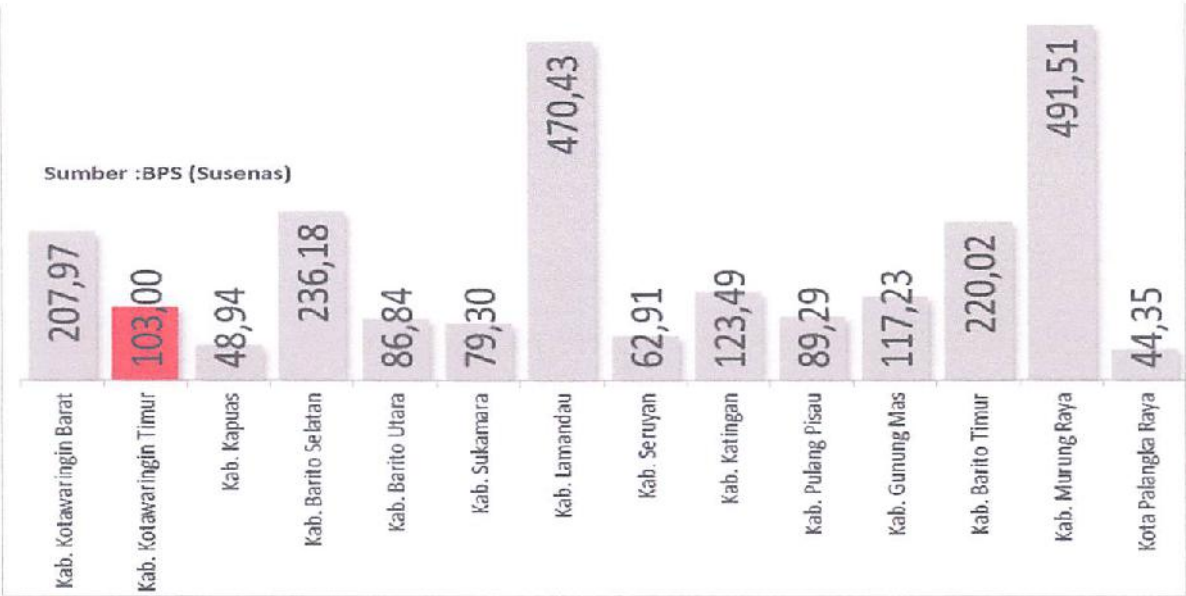
Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020, perkembangan AKBa di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan tren positif karena terjadi penurunan dari angka 205 pada tahun 2016 menjadi angka 103 pada tahun 2020 atau menurun sebesar 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Dan pada tahun 2020 AKI Kabupaten Kotawaringin Timur berada di bawah AKI Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 140,06. Adapun tren AKI Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode tersebut tersaji pada Gambar 3.35 berikut ini.



Gambar 3.35 Relevansi Tren AKI Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.35 memperlihatkan tren penurunan AKI di Kabupaten Kotawaringin Timur jauh lebih cepat dibandingkan dengan tren penurunan AKI di Provinsi Kalimantan Tengah.

Di tingkat regional Kalimantan Tengah pada tahun 2020, AKI tertinggi dicapai oleh Kabupaten Murung Raya pada angka 491,51, sedangkan AKI terendah dicapai oleh Kota Palangka Raya pada angka 44,35. Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada peringkat ke-7 terendah untuk AKI Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2020, secara rinci tersaji pada Gambar 3.36 berikut ini.



Gambar 3.36 Posisi Relatif AKI Kab. Kotim Tahun 2020

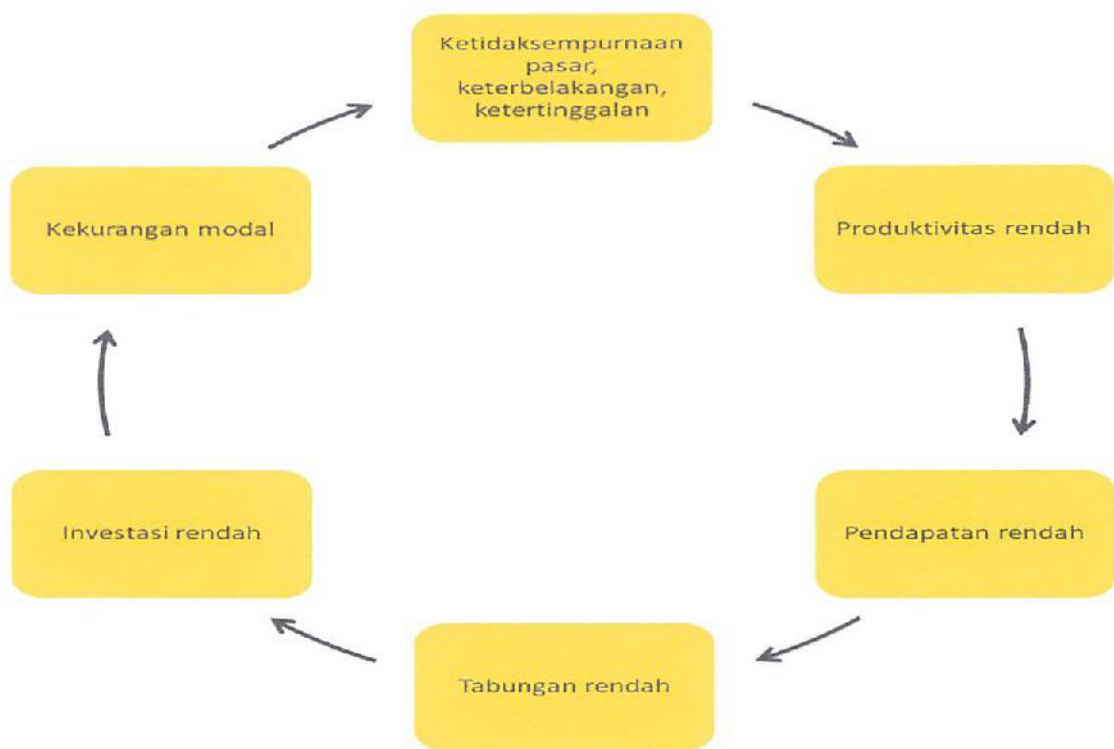
3.2 Determinansi Kemiskinan Daerah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang menjadiperhatian khusus di daerah manapun. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi makro suatu daerah atau juga kondisi regional, maupun nasional. Suatu daerah dikatakan miskinbiasanya ditandai dengan pendapatan per kapitanya rendah, pertumbuhan tingkatpenduduk yang tinggi, sebagian besar tenaga kerja bergerak di bidang pertaniandan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan.

Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang salingmempengaruhi, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu daerah mengalami banyak masalah untuk mencapaipembangunan yang lebih tinggi. Beberapa penyebab kemiskinan jika diidentifikasi dari sisi ekonomi:

1. Secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksemaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produksinya rendah, yang pada gilirannya upah menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal

Secara skematis, lingkaran kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 3.37 sebagai berikut

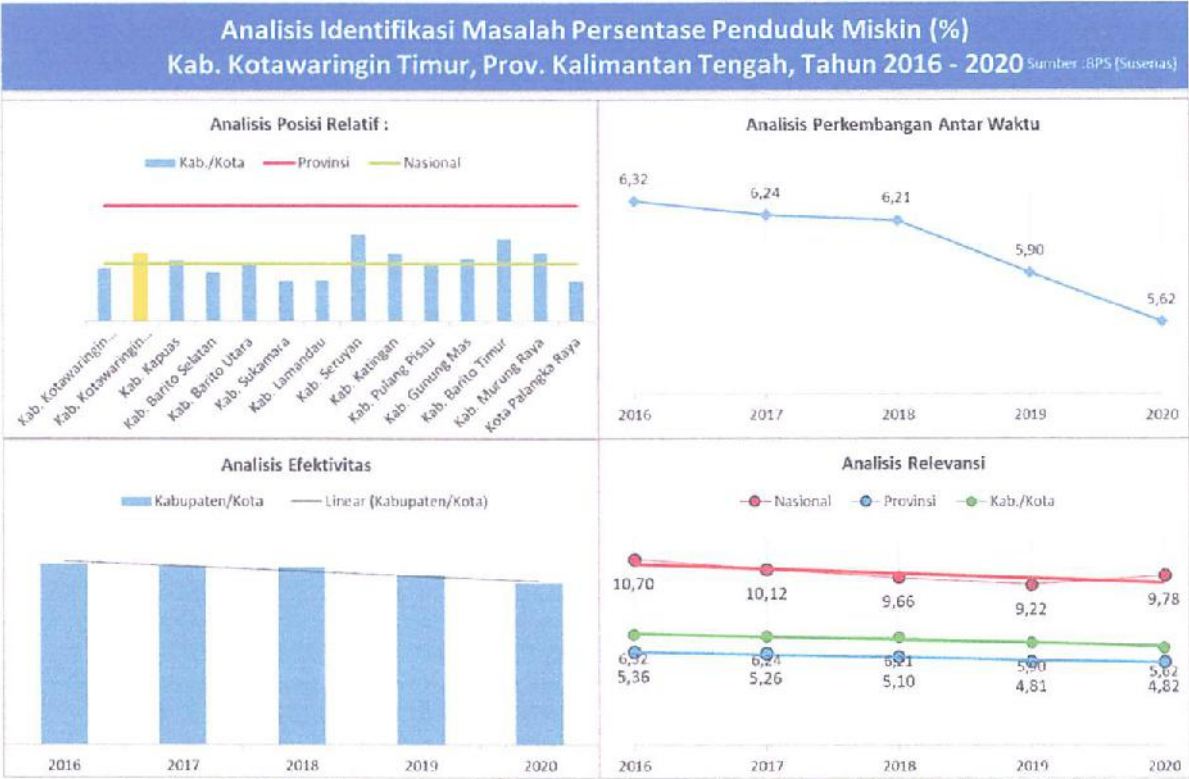


Gambar 3.37 Lingkaran Setan Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

Gambar 3.37 memperlihatkan bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang tidak sebatas akibat minimnya modal dan kemampuan kerja.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan bekerja secara produktif, kemerosotan daya beli, hingga keterasingan dari kehidupan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan ketidakmampuan kerja, tapi juga berkaitan dengan hak-hak yang tidak terlindungi, serta hilangnya kesempatan untuk mendapat harga yang layak atas produk yang dihasilkan atau tenaga yang diberikan, atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh bantuan, subsidi, dan program-program dari pemerintah.

Berdasarkan pemaparan dalam profil kemiskinan daerah, dapat diambil kesimpulan awal bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 relatif berhasil, bahkan pada periode tahun 2019-2020 tingkat kemiskinan sekaligus jumlah penduduk miskin absolut keduanya mengalami penurunan. Ringkasan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.38 sebagai berikut:



Gambar 3.38 Ringkasan Capaian Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kotim 2021-2026

Gambar 3.38 memperlihatkan bahwa dari 3 analisis yakni analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas, dan analisis relevansi menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 relatif berhasil. Bahkan jika mengacu pada analisis relevansi, dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2019-2020, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur relatif lebih baik daripada penanggulangan kemiskinan di tingkat Nasional maupun Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun keberhasilan tersebut masih perlu ditingkatkan karena masih belum mencapai target RPJMD di tahun 2020 yakni tingkat kemiskinan berada pada angka 5,32. Artinya ada beberapa permasalahan sehingga target tersebut belum tercapai. Identifikasi atas permasalahan yang dimaksud akan dijabarkan pada sub sub bab berikutnya.

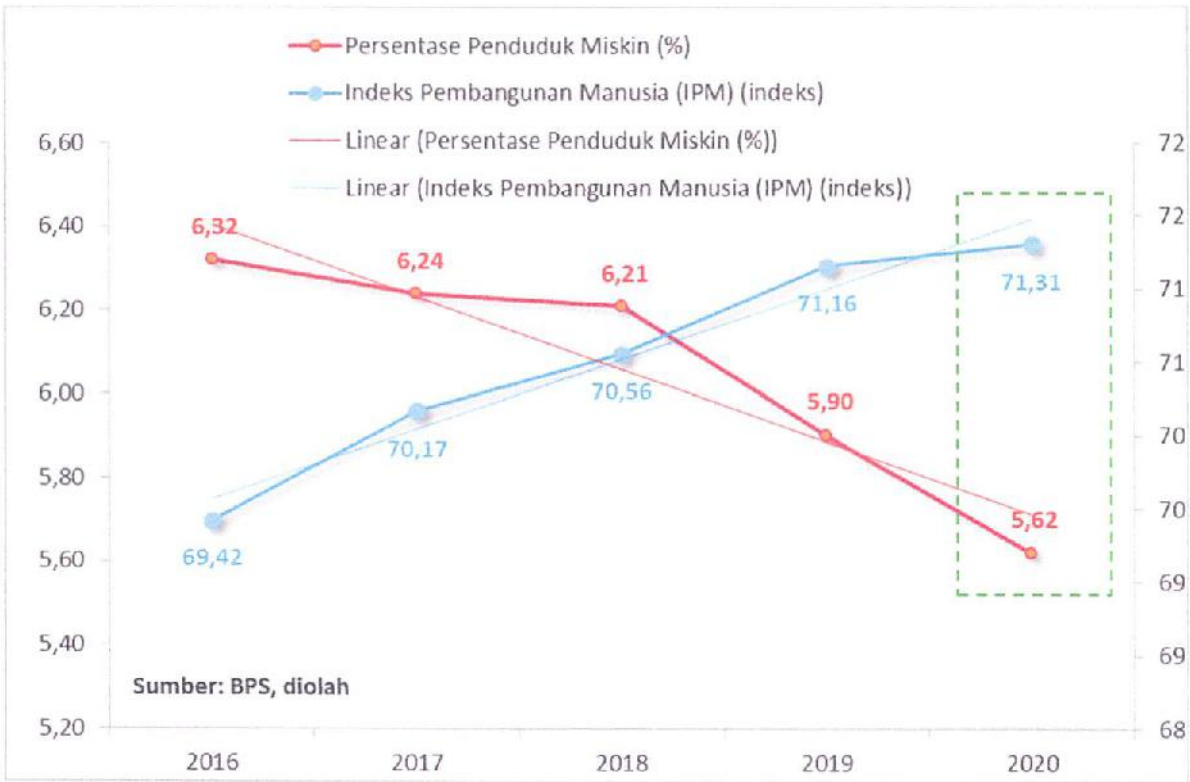
3.2.1 Pembangunan Manusia

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Gambar 3.37 memperlihatkan ada 2 mata rantai yang terkait dengan 4 komponen penyusun IPM yakni mata rantai Ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan ketertinggalan; dan mata rantai Pendapatan rendah. Mata rantai Ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan ketertinggalan terkait dengan komponen IPM yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Umur Harapan Hidup, Sedangkan mata rantai Pendapatan rendah terkait dengan komponen IPM yakni Pengeluaran/Pendapatan per Kapita yang Disesuaikan.

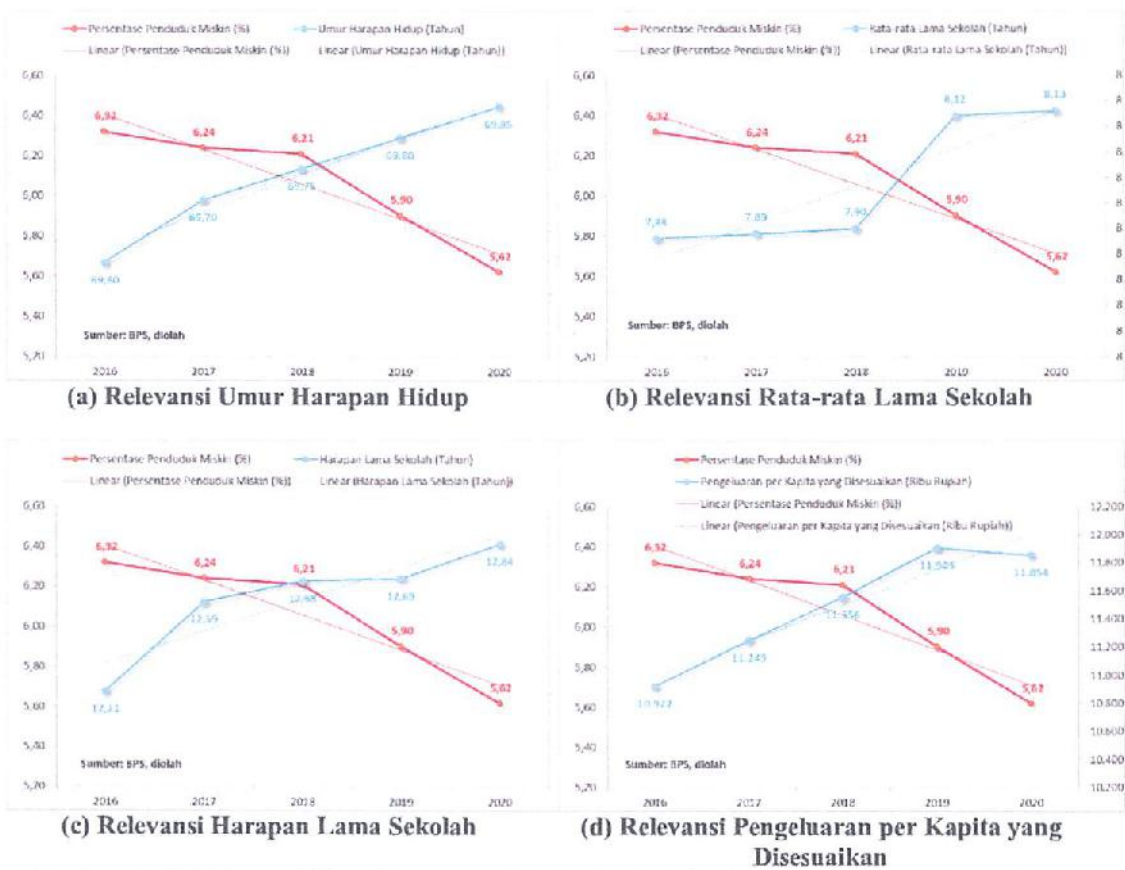
Secara logis, IPM merepresentasikan tingkat akses masyarakat kepada 3 dimensi dasar pembangunan manusia. Semakin tinggi IPM, maka semakin kuat akses masyarakat terhadap 3 dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dengan demikian, kedua mata rantai dalam lingkaran setan kemiskinan akan tereduksi ketika IPM beserta komponen di dalamnya semakin kuat. Adapun efektivitas peningkatan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 3.39 berikut ini



Gambar 3.39 Efektivitas IPM terhadap Tingkat Kemiskinan Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.39 memperlihatkan bahwa tren peningkatan IPM sejalan dengan tren penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini secara logis mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap 3 dimensi pembangunan manusia memberikan implikasi positif terhadap penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini adalah mereduksi 2 mata rantai dalam lingkaran setan kemiskinan.

Mengingat bahwa IPM tersusun atas 4 komponen indikator, dengan demikian tren yang sama seharusnya juga ditunjukkan oleh keempat komponen penyusun IPM. Secara lengkap relevansi tren 4 komponen penyusun IPM terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan pada Gambar 3.40 sebagai berikut:



Gambar 3.40 Relevansi Tren Komponen IPM terhadap Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2020

Gambar 3.40 memperlihatkan bahwa tiap komponen penyusun IPM memiliki tren positif yang memiliki relevansi positif juga terhadap tingkat kemiskinan. Namun data tersebut belum bisa menyajikan berapa persen dari penduduk miskin yang ikut merasakan dampak perkembangan keempat komponen penyusun IPM. Selain itu belum juga terpilah berdasarkan gender.

3.2.2 Ketimpangan Pengeluaran

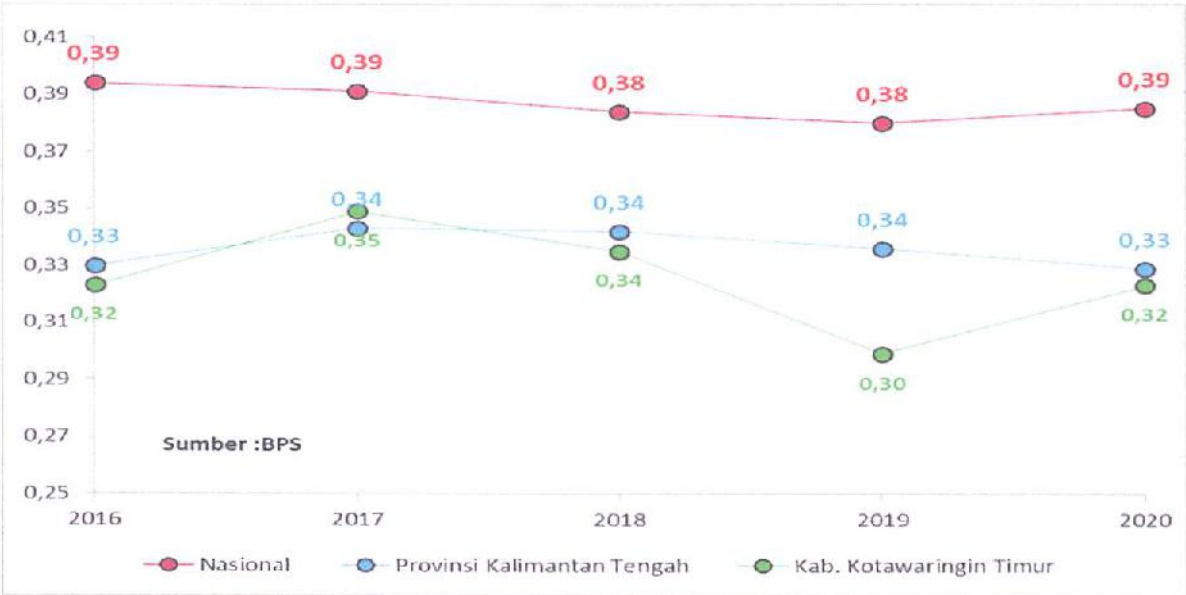
Secara umum ketimpangan dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Salah satu penyebab ketimpangan sosial karena adanya hambatan untuk mengakses kehidupan yang lebih layak dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya.

Gambar 3.37 memperlihatkan bahwa salah satu mata rantai dalam lingkaran setan kemiskinan yang terkait dengan ketimpangan adalah mata rantai pendapatan rendah. Semakin tinggi ketimpangan yang terjadi, maka semakin rendah kesempatan masyarakat miskin untuk memperbaiki tingkat pendapatannya. Secara statistik, indikator *proxy* yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (Gini Ratio). Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran

kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Perubahan rasio Gini merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Rasio Gini mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020, tidak ada perubahan signifikan pada perkembangan rasio Gini di tingkat Kabupaten Kotawaringin Timur, Povinsi Kalimantan Tengah, maupun Nasional. Hal tersebut ditunjukkan dari kesamaan rasio Gini pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 seperti yang terlihat pada Gambar 3.41 berikut ini.



Gambar 3.41 Relevansi Tren Rasio Gini Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.41 memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2019-2020, terjadi peningkatan rasio Gini di Kabupaten Kotawaringin Timur maupun Nasional. Di Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi peningkata rasio Gini dari 0,30 pada tahun 2019 menjadi 0,32 pada tahun 2020. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri oleh karena terjadi peningkatan distribusi pendapatan pada periode tahun tersebut. Secara sistemik, peningkatan ketimpangan ini menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan akses masyarakat untuk memperoleh pendapatan.

3.2.3 Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara

laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Secara statistik, indikator yang dipergunakan untuk mengukur pembangunan gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

IPG berguna untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020, terjadi peningkatan IPG di Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni dari 87,73 pada tahun 2017 menjadi 88,12 pada tahun 2020. Walaupun terjadi peningkatan, namun IPG Kabupaten

Kotawaringin Timur masih berada di bawah IPG Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional. Secara rinci disajikan pada Gambar 3.42 berikut ini.



Gambar 3.42 Relevansi Tren IPG Kab. Kotim Tahun 2016-2020

Gambar 3.42 memperlihatkan bahwa pada periode tahun 2019-2020, perkembangan IPG di Kabupaten Kotawaringin Timur masih lebih baik jika dibandingkan dengan perkembangan IPG di Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional.

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa IPG memiliki komponen yang sama dengan IPM karena disusun berdasarkan perbandingan antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Dengan kata lain jika komponen IPM disajikan secara terpisah antara Perempuan dan Laki-laki, maka dapat dilihat seperti pada Tabel 3.7 berikut ini

Tabel 3.7 Komponen IPM Perempuan dan Laki-laki Kab. Kotim Tahun 2010-2020

Tahun	Umur Harapan Hidup (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Pendapatan per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah)	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2010	67,12	70,91	7,71	6,52	10,65	10,07	14.827	5.427
2011	67,22	71,00	7,71	6,60	10,81	10,07	15.044	5.529
2012	67,29	71,08	7,93	6,66	11,09	10,64	15.264	5.538
2013	67,37	71,16	8,04	6,71	11,87	11,75	16.054	5.547
2014	67,46	71,25	8,15	6,80	12,33	11,85	16.190	7.484
2015	67,56	71,35	8,26	7,11	12,38	11,87	16.202	7.695
2016								
2017	67,67	71,61	8,30	7,41	12,80	12,52	17.309	8.106
2018	67,72	71,66	8,31	7,45	12,87	12,62	17.879	8.250
2019	67,77	71,72	8,51	7,67	12,88	12,63	18.420	8.499
2020	67,81	71,77	8,52	7,68	12,89	12,78	18.329	8.479

Sumber: BPS (berbagai tahun terbitan, diolah)

Tabel 3.7 memperlihatkan bahwa ketimpangan tertinggi antara Perempuan dan Laki-laki terjadi pada komponen Pendapatan per Kapita yang Disesuaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih rentan terperangkap dalam mata rantai pendapatan rendah. Data ini juga mengindikasikan adanya ketimpangan yang sangat tinggi, yakni lebih dari 50 persen, pada akses kegiatan ekonomi produktif antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, gender merupakan permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.2.4 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Miskin

Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak berharta,berpenghasilan rendah, dan serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak, seperti sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan air bersih, dan sanitasi. Kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pengangguran, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, konsumsi, lokasi, dan lingkungan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat korelasi yang positif signifikan antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, khususnya pada tingkat pengangguran masyarakat miskin. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Berkebalikan dengan tingkat pengangguran, tingkat pendidikan justru memiliki korelasi yang negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pendidikan berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian dan keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses pembangunan. Berhubungan dengan kontribusinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi, maka pendidikan dikatakan sebagai modal manusia (*human capital*). Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dengan tingkat yang semakin tinggi dapat menurunkan jumlah kemiskinan.

Selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah pengangguran penduduk miskin dan penurunan jumlah penduduk miskin yang bekerja baik di sektor pertanian maupun bukan di sektor pertanian. Secara rinci disajikan pada Tabel 3.8 berikut ini

Tabel 3.8 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja (Persen)

Tahun	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
2016	50,81	20,64	28,55
2017	40,91	31,81	27,28
2018	39,60	12,25	48,15
2019	50,15	9,65	40,20
2020	51,26	9,13	39,61

Sumber: BPS (berbagai tahun terbitan, diolah)

Tabel 3.8 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja dari 50.81 persen pada tahun 2016 menjadi 51,26 persen pada tahun 2020. Sebaliknya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yang bekerja dari 49,19 persen pada tahun 2016 menjadi 48,74 persen pada tahun 2020. Walaupun angka perubahannya terkesan kecil, namun sangat terasa dampaknya bagi masyarakat miskin.

Jika hal tersebut di atas dikaitkan dengan Gambar 3.37 tentang lingkaran setan kemiskinan, peningkatan jumlah pengangguran penduduk miskin akan berdampak pada penurunan pendapatan penduduk miskin yang berujung pada keterbelakangan dan ketertinggalan. Fenomena ini didukung dengan adanya data tingkat pendidikan penduduk miskin usia angkatan kerja yang semakin menurun selama periode tahun 2016 s.d. tahun 2020 untuk tingkat pendidikan SD dan SMA. Secara rinci disajikan pada Tabel 3.9 berikut ini

Tabel 3.9 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Terakhir (Persen)

Tahun	< SD	Tamat SD/SLTP	SLTA+
2016	24.35	60.30	15.35
2017	17.60	63.09	19.31
2018	20.34	62.21	17.45
2019	28.87	57.60	13.54
2020	20.53	69.83	9.64

Sumber: BPS (berbagai tahun terbitan, diolah)

Tabel 3.9 memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja penduduk miskin semakin menurun dari tahun 2016 s.d. tahun 2020. Persentase angkatan kerja penduduk miskin yang tamat SD mengalami penurunan dari 24,35 persen pada tahun 2016 menjadi 20,53 persen pada tahun 2020. Dan persentase angkatan kerja penduduk miskin yang tamat SMA mengalami penurunan dari 15,35 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 9,64 persen pada tahun 2020.

Data pada Tabel 3.9 tersebut merupakan potret sederhana betapa rendah modal manusia (*human capital*) yang dimiliki oleh penduduk miskin. Dengan demikian nilai tambah yang dimilikipun tidak sebanding dengan tantangan yang harus dihadapi untuk menembus garis kemiskinan. Karena semakin kecil modal manusia yang dimiliki oleh penduduk miskin, maka semakin lemah pula kemampuan berkompetisi dalam kegiatan ekonomi produktif.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan di daerah yang ada berdasarkan perencanaan yang berasal baik dari pemerintahan pusat, maupun hasil perencanaan pemerintah daerah, yang disertai dukungan pemerintah pusat atau sektor swasta di daerah. Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena mengecilnya celah spasial maupun temporal pada penduduk miskin itu sendiri.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dan diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di daerah. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya dengan variabel lain dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui system kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyediaan sanitasi, air bersih dan sebagainya.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijakan yang secara langsung memberikan dampak serta mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan (3) kebijakan lainnya yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan

dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. dan kebijakan lainnya yang mendukung kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya pada masyarakat setempat. Konsep tersebut di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan penduduk selalu berkaitan dengan pendapatan penduduk yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.

Program penanggulangan kemiskinan daerah yang menjadi komitmen Pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan ini secara khusus untuk menjawab permasalahan yang ada pada bab sebelumnya yang terfokus pada :

(1) Ketimpangan Pengeluaran

Hal ini dengan melihat bahwa selama periode tahun 2019-2020, terjadi peningkatan rasio Gini di Kabupaten Kotawaringin Timur maupun Nasional. Di Kabupaten Kotawaringin Timur terjadi peningkatan rasio Gini dari 0,30 pada tahun 2019 menjadi 0,32 pada tahun 2020. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri oleh karena terjadi peningkatan distribusi pendapatan pada periode tahun tersebut. Secara sistemik, peningkatan ketimpangan ini menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan akses masyarakat untuk memperoleh pendapatan

(2) Gender

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari 4 komponen yaitu Usia harapan hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah dan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan

Sesuai data IPM berdasarkan gender memperlihatkan bahwa ketimpangan tertinggi antara Perempuan dan Laki-laki terjadi pada komponen Pendapatan per Kapita yang Disesuaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih rentan terperangkap dalam mata rantai pendapatan rendah. Data ini juga mengindikasikan adanya ketimpangan yang sangat tinggi, yakni lebih dari 50 persen, pada akses kegiatan ekonomi produktif antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, gender merupakan

permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

(3) **Tingkat Pengangguran dan tingkat pendidikan masyarakat miskin**

Memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja dari 50,81 persen pada tahun 2016 menjadi 51,26 persen pada tahun 2020. Sebaliknya terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yang bekerja dari 49,19 persen pada tahun 2016 menjadi 48,74 persen pada tahun 2020. Walaupun angka perubahannya terkesan kacil, namun sangat terasa dampaknya bagi masyarakat miskin

Pada sisi angkatan kerja, tingkat pendidikan penduduk miskin semakin menurun dari tahun 2016 s.d. tahun 2020. Persentase angkatan kerja penduduk miskin yang tamat SD mengalami penurunan dari 24,35 persen pada tahun 2016 menjadi 20,53 persen pada tahun 2020. Dan persentase angkatan kerja penduduk miskin yang tamat SMA mengalami penurunan dari 15,35 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 9,64 persen pada tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penanggulangan kemiskinan menggunakan 4 (empat) strategi penanggulangan kemiskinan yaitu

- (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- (4) Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Dari 4 (empat) strategi tersebut dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program yaitu :

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil,
3. Program lainnya

4.1 PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU

Program ini berfokus pada program-program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Dengan demikian akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar semakin tinggi dan semakin merata.

Dalam strategi kebijakan, program ini ber focus pada pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat miskin dengan harapan dapat mengurangi pengeluaran masyarakat miskin sehingga pendapatan yang ada dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Ada beberapa OPD yang terlibat dalam strategi ini diantaranya adalah Dinas Pendidikan terkait dengan bantuan siswa miskin, bantuan Operasional sekolah, dan lain sebagainya termasuk pemberian Kartu Indonesia Pintar. Selanjutnya Dinas Kesehatan dengan memberikan kemudahan pelayanan kesehatan. Dinas Sosial memberikan bantuan langsung baik berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan verifikasi data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinas PUPRPerkim terkait dengan Penyediaan Air bersih dan Sanitasi dan bantuan rehabilitasi Rumah tidak layak huni. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait bagaimana memberikan akses kemudahan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh legalitas data kependudukan.

Strategi kebijakan untuk Program ini dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Prioritas Program Bantuan Sosial Dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, Atau Individu

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan PSU lingkungan perumahan, permukiman, dan pelayanan dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	Persentase penduduk berakses air minum / air bersih (dalam persen) Rasio rumah layak huni (dalam persen) Persentase areal kawasan kumuh (dalam persen)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	88,83	4.996.445.300	92,55	0	96,28	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	DPU/PRPKP
2	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan PSU lingkungan perumahan, permukiman, dan pelayanan dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	Persentase Rumah tinggal bersanitasi (dalam persen) Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak terhambat (dalam persen)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (aman)	6,39	1.950.000.000	6,5	150.000.000	8,19	450.000.000	10	600.000.000	11,81	750.000.000	13,62	900.000.000	DPU/PRPKP
3	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan PSU lingkungan perumahan, permukiman, dan pelayanan dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	Persentase penduduk berakses air minum / air bersih (dalam persen) Rasio rumah layak huni (dalam persen) Persentase areal kawasan kumuh (dalam persen)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase terlaksananya kawasan permukiman	21,34	1.383.952.000	11,37	170.000.000	21,81	1.236.418.000	33,75	1.235.392.000	33,91	1.232.314.000	45,05	1.228.210.000	
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan PSU lingkungan perumahan, permukiman, dan pelayanan dasar	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	Persentase penduduk berakses air minum / air bersih (dalam persen) Rasio rumah layak huni (dalam persen) Persentase areal kawasan kumuh (dalam persen)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase terlaksananya Cakupan Permukiman Yang Tertata	32,72	0,00	39,45	0,00	46,18	100000000,00	52,91	100000000,00	59,65	100000000,00	66,38	0,00	
5	Bidang Pendidikan	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dasar 9 Tahun	Rata-rata Lama Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dasar 9 tahun	88%	106.279.939.471	88%	42.160.559.942	90%	41.274.559.942	92%	41.382.059.942	93%	42.444.936.513	95%	43.574.936.513	Dinas Pendidikan
6	Bidang Kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh	Unsur Harapan Hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Upaya Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan	82,7	100.246.956.516	85	57.735.104.800	86,8	60.659.930.000	88,3	62.952.805.000	89,5	68.008.162.500	90,4	70.802.285.000	Dinas Kesehatan

Bab IV: Prioritas Program

No	Urusan Pemerintahan/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		inovasi dan pemanfaatan teknologi																	
7		Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan dan Peningkatan Sumber daya manusia kesehatan	80,8	21.440.157.148	83	320.000.000	84,7	323.750.000	86,7	323.750.000	88,3	15.025.742.500	90	22.173.750.000	Dinas Kesehatan
8			Meningkatnya PHBS Rumah Tangga dan membudayakan Germas		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat yang diberdayakan pada bidang Kesehatan	66,7	1.448.399.000	72,3	225.000.000	76,7	225.000.000	80,7	300.000.000	85,3	300.000.000	90	300.000.000	Dinas Kesehatan
9	Bidang Sosial	Meningkatkan kemampuan PMKS untuk mengatasi masalah sosial yang dialami	Peningkatan pelayanan kepada PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	100 Orang	381.400.000	100 Orang	410.000.000	100 Orang	451.000.000	100 Orang	496.100.000	100 Orang	545.710.000	100 Orang	600.281.000	Dinas Sosial
10				Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang ditangani	15 Orang	646.097.764	20 Orang	361.500.000	20 Orang	397.650.000	20 Orang	437.415.000	20 Orang	481.156.500	20 Orang	529.272.150	Dinas Sosial
11				Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Pendamping PKH	46 Orang	556.900.000	49 Orang	540.665.000	49 Orang	594.731.500	49 Orang	492.358.000	49 Orang	545.443.800	49 Orang	599.988.180	Dinas Sosial
12	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Penguatan kinerja, kualitas, dan sistem pelayanan publik pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Penerbitan KK yang tepat waktu	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan KK, penyelesaian perekaman dan Pencetakan KTP-el serta Penerbitan KIA yang tepat waktu	20%	1.440.940.000	40%	130.000.000	60%	143.000.000	80%	157.300.000	90%	173.030.000	100%	190.333.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim

4.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Strategi ini berfokus pada program-program pemberdayaan masyarakat miskin yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan disamping itu program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat guna memperkuat daya beli masyarakat miskin. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memperkecil tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan pengeluaran antara laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin melalui berbagai pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan dan lain sebagainya.

Ada beberapa OPD yang terlibat dalam strategi ini diantaranya adalah Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan dinas Pendidikan melalui PKBM dan lainnya.

Strategi kebijakan untuk Program ini dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Prioritas Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peningkatan kualitas kelembagaan, pelaku usaha, dan sarana-prasarana usaha	Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase LPM aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYRAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dibina/difasilitasi	100%	296.043.300	100%	264.294.520	100%	898.001.765	100%	942.901.853	100%	990.046.946	100%	1.039.549.293	DPMD
2	Bidang Pertanian	Memfaatkan keragaman sumber daya lokalita menjadi varietas unggul nasional	Meningkatnya kesejahteraan pelaku pertanian, peternakan dan perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	92.403.400	200%	60.000.000	200%	260.000.000	200%	325.000.000	300%	357.500.000	300%	411.125.000	Dinas Pertanian
3		Memfaatkan keragaman sumber daya lokalita menjadi varietas unggul nasional	Meningkatnya kesejahteraan pelaku pertanian, peternakan dan perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase jumlah kegiatan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan	100%	-	100%	50.000.000	100%	308.500.000	100%	385.625.000	100%	443.468.750	100%	509.989.063	Dinas Pertanian
4		Memfaatkan keragaman sumber daya lokalita menjadi varietas unggul nasional	Meningkatnya kesejahteraan pelaku pertanian, peternakan dan perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah izin usaha pertanian yang dikeluarkan	100%	35.744.300	100%	35.000.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000	100%	132.250.000	Dinas Pertanian
5		Memfaatkan keragaman sumber daya lokalita menjadi varietas unggul nasional	Meningkatnya kesejahteraan pelaku pertanian, peternakan dan perkebunan	Penguatan Cadangan Pangan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyelenggaraan Penyuluhan serta Sarana dan Prasarana Penyuluhan		914.629.115		380.000.000		1.830.450.000		2.288.062.500		2.634.271.875		3.025.962.656	Dinas Pertanian
6	Bidang Kelautan dan Perikanan	Mendorong pelaku usaha perikanan melakukan peningkatan kelembagaan, peningkatan kompetensi dalam manajemen pengelolaan usaha perikanan serta memfasilitasi akses kemitraan, iptek dan informasi untuk meningkatkan nilai kompetitif pelaku usaha perikanan	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		100%	61.496.550		60.000.000		63.847.050		85.000.000		100.738.319		125.000.000	Dinas Perikanan

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7		Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan optimalisasi logistik perikanan untuk mendukung gerakan makan ikan serta ketersediaan bahan pangan (Produk perikanan)	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton/Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			61.147.300		10.000.000		62.847.050		90.000.000		130.249.500		105.249.500	Dinas Perikanan
8		Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan optimalisasi logistik perikanan untuk mendukung gerakan makan ikan serta ketersediaan bahan pangan (Produk perikanan)	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			0		0		-		24.774.220		25.000.000			Dinas Perikanan
9		Meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan optimalisasi logistik perikanan untuk mendukung gerakan makan ikan serta ketersediaan bahan pangan (Produk perikanan)	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			22.394.600		-		25.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000	Dinas Perikanan
10	Bidang Perindustrian	Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti /substitusi impor	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah	Presentase kenaikan status industri dari kecil menjadi menengah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah			100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	102.500.000	100%	102.500.000	Disperdagin
11	Bidang Pangan	Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Presentase penanganan daerah rawan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- Tercapainya konsumsi energi (kkalori/kapita/hari)	2225,9	72.278.600	2217,4	474.921.400	2209,0	697.031.250	2200,6	729.855.050	2192,2	825.328.835	2190,0	937.594.702	DKP
12	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penguatan kapasitas koperasi dan Pelaku UMKM untuk pengembangan usaha melalui akses permodalan, meningkatkan produktivitas, kualitas dan inovasi serta pemasaran	Meningkatnya aktivitas Usaha dan daya saing Koperasi dan LMKM	Presentase usaha mikro dan kecil	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tercapainya jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan jumlah desa yang terdapat UMKM nya		182.291.500	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas Koperasi dan UKM

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13		produk Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil	Meningkatnya aktivitas Usaha dan daya saing Koperasi dan UMKM		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah UMKM	6 Kali	235.131.500	6 Kali	165.000.000	6 Kali	170.000.000	6 Kali	200.000.000	6 Kali	225.000.000	6 Kali	250.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
14	Bidang Tenaga Kerja	Peningkatan kualitas kelembagaan, pelaku usaha, dan sarana-prasarana usaha	Meningkatkan Kompetensi dan kualitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,28 %	97.243.792	0,30 %	294.000.000	0,32 %	294.000.000	0,35 %	294.000.000	0,37 %	294.000.000	0,40 %	354.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Bidang Tenaga Kerja				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	43 %	55.950.000	45 %	196.541.415	47 %	196.541.415	49 %	196.541.415	51 %	196.541.415	53 %	256.541.415	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4.3 PROGRAM LAINNYA

Strategi ini berfokus program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan. Urgensi dari strategi ini bermula pada substansi yang fundamental yakni kemiskinan adalah permasalahan multidimensi yang memerlukan penanganan pada berbagai sektor secara kontinyu dan komprehensif. Pada program penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin. Secara normatif, strategi ini erat kaitannya dengan aktualisasi program-program pada strategi kedua dengan memberikan penguatan kepada masyarakat miskin yang telah dilaksanakan pelatihan dan ketrampilan dengan memberikan bantuan modal, pemberian alat, pakan, bibit serta hal lainnya termasuk pendampingan dan kemudahan pemasaran.

Ada beberapa perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan ini seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Strategi kebijakan untuk Program ini dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Prioritas Program Lainnya

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1		3	3	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bidang Pertanian	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	6.232.846.103	200%	6.910.000.000	300%	8.050.000.000	400%	9.347.500.000	500%	10.749.625.000	600%	12.362.068.750	Dinas Pertanian
2	Bidang Pertanian	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Produksi sektor pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%	1.615.611.964	200%	530.000.000	300%	2.835.000.000	400%	3.543.750.000	500%	3.337.187.500	600%	3.837.765.625	Dinas Pertanian
3	Bidang Pertanian	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jumlah ternak yang terkena penyakit	100%	148.252.500	100%	120.000.000	100%	162.500.000	100%	203.125.000	100%	212.500.000	100%	244.375.000	Dinas Pertanian
4	Bidang Pertanian	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase jumlah kegiatan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan	100%	58.063.532	100%	60.000.000	100%	850.000.000	100%	1.062.500.000	100%	1.221.875.000	100%	1.405.156.250	Dinas Pertanian
5	Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat pelaku usaha perikanan	Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan	Produksi Perikanan Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		100%	293.552.500		50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		76.850.400	Dinas Perikanan
6	Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pengelolaan potensi dan ekonomi perikanan secara berkelanjutan berbasis wilayah, kawasan metropolitan dan sentra perikanan terpadu untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton/Tahun)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			2.190.902.350		300.000.000		308.847.050		475.000.000		533.597.860		552.678.500	Dinas Perikanan
7	Bidang Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya daya saing produk dan manajemen sistem pengendalian dan standarisasi potensi dan produk perikanan secara terintegrasi	Meningkatnya Nilai Tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha	Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			13.847.300		20.000.000		55.000.000		115.000.000		120.000.000		145.000.000	Dinas Perikanan
8	Bidang Perdagangan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan	Kontribusi sektor industri terhadap	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Meningkatnya Sarana Perdagangan (Pasar/ Tradisional) yang			100%	1.000.000.000	100%	750.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	Disperdagin

Bab IV: Prioritas Program

No	Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	
1		3	3	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			jumlah industri kecil dan menengah yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal yang berkelanjutan	PDRB	PERDAGANGAN	terbangun													
9	Bidang Perdagangan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perlindungan konsumen	Alat UTTP yang telah diterima ulang di 17 Kec.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Menurunkan Peredaran Barang dan Jasa yang merugikan Konsumen serta Meningkatkan Kesadaran Pelaku Usaha dalam Penggunaan Alat UTTP yang benar			100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	Disperdagin
10	Bidang Perdagangan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perlindungan konsumen	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatkan Penggunaan produk Dalam Negeri			100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	50.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	Disperdagin
11	Bidang Pangan	Tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan pangan berdasarkan rekomendasi kecukupan gizi dan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Presentase penanganan daerah rawan pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Tercapainya ketersediaan energi (kcalori/kapita/hari)	3384	1.134.045.600	3417	10.435.600	3452	10.435.600	3469	10.435.600	3504	140.957.000	352100%	169.811.749	DKP
12	Bidang Pangan	Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengendalian konsumsi pangan B2SA, pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan promosi pengendalian konsumsi pangan	Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Presentase kawasan pangan lestari yang terbangun	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- Tercapainya konsumsi energi (kcalori/kapita/hari)	2225,9	367.668.850	2217,4	308.558.150	2209,0	210.668.850	2200,6	221.202.000	2192,2	232.261.500	2190,0	243.874.000	DKP

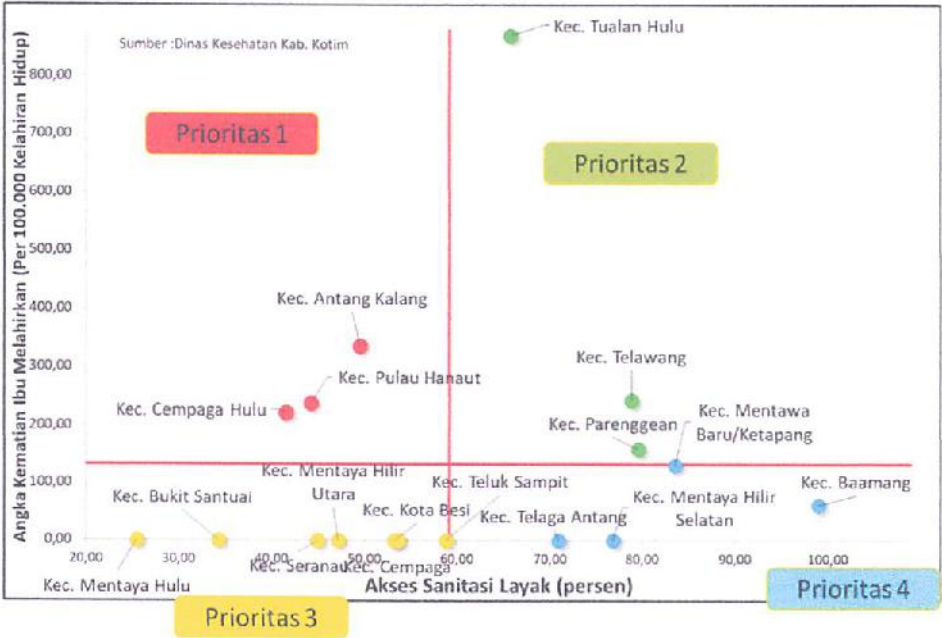
BAB V
LOKASI PRIORITAS

Penentuan lokasi prioritas mengacu pada permasalahan yang telah disampaikan pada Bab 3. Alat analisis yang dipergunakan adalah kuadran wilayah dengan menggunakan 2 indikator yang berkorelasi satu dengan lainnya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang disampaikan dalam Bab 3, yang menjadi akar permasalahan adalah adanya ketimpangan pembangunan modal manusia (*human capital*). Pembangunan modal manusia dilakukan melalui 2 pendekatan utama yakni pembangunan di bidang kesehatan dan pembangunan di bidang pendidikan.

Pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas gizi, penurunan angka kematian ibu, serta peningkatan akses sanitasi layak. Dan pembangunan bidang Pendidikan dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan tingkat menengah pertama pada wilayah-wilayah dengan kecenderungan tingkat kemiskinan yang tinggi.

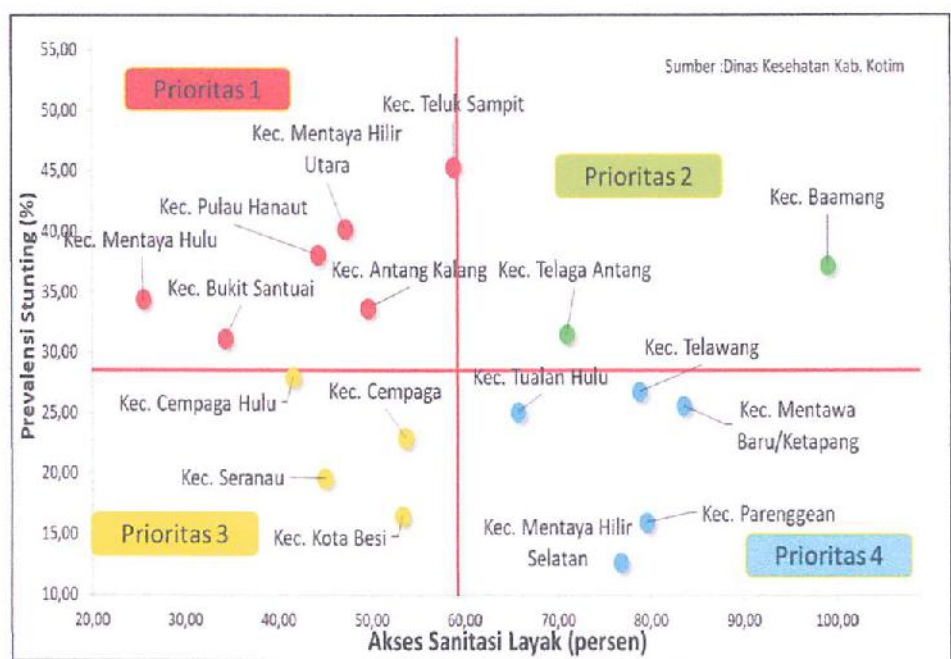
5.1 LOKASI PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

Penentuan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dalam rangka pembangunan modal manusia di bidang kesehatan dilakukan dengan memadukan 3 indikator yakni Angka Kematian Ibu (AKI), Prevalensi Stunting, dan Akses Sanitasi Layak. Korelasi ketiga indikator tersebut disajikan pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 berikut ini.



Gambar 5.1 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan AKI dan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020

Gambar 5.1 memperlihatkan bahwa prioritas pertama penanggulangan AKI melalui peningkatan akses sanitasi layak adalah di Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Pulau Hanaut, dan Kecamatan Cempaga Hulu.

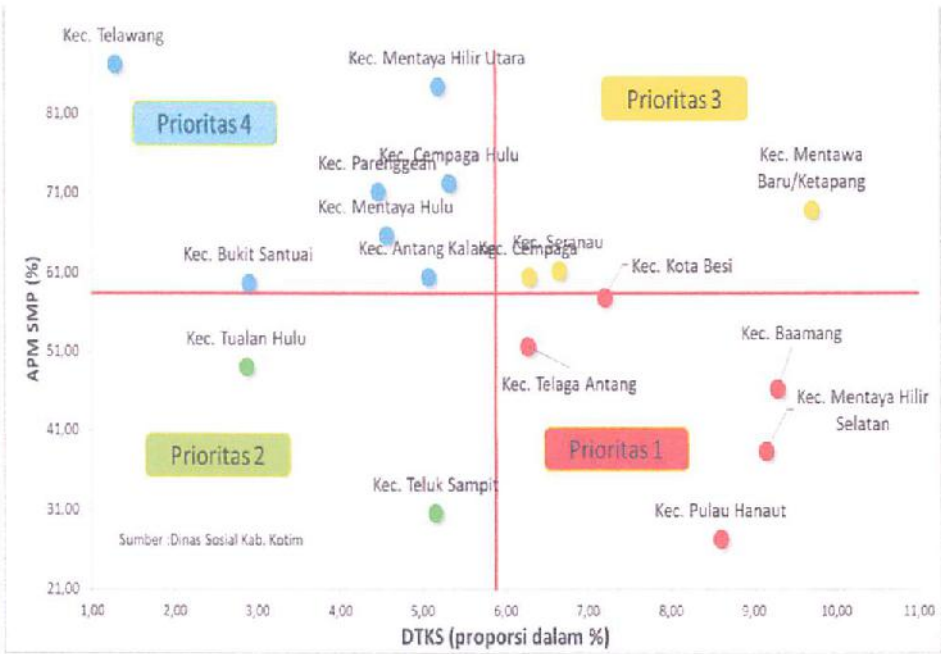


Gambar 5.2 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Prevalensi Stunting dan Akses Sanitasi Layak Tahun 2020

Gambar5.2 memperlihatkan bahwa prioritas pertama penanggulangan Prevalensi Stunting melalui peningkatan akses sanitasi layak adalah di Kecamatan Teluk Sampit, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kecamatan Pulau Hanaut, Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Mentaya Hulu, dan Kecamatan Bukit Santuai.

5.2 LOKASI PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

Penentuan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dalam rangka pembangunan modal manusia di bidang pendidikan dilakukan dengan memadukan 2 indikator yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP. Korelasi kedua indicator tersebut disajikan pada Gambar 5.3 berikut ini.



Gambar 5.3 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan APM dan DTKS Tahun 2020

Gambar 5.3 memperlihatkan bahwa prioritas pertama akses pendidikan menengah tingkat pertama adalah di Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Baamang, KecamatanTelaga Antang, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, dan Kecamatan Pulau Hanaut..

BAB VI PENUTUP

Didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, telah disebutkan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan tidak saja dilihat dari aspek/sisi pendapatan, kepemilikan aset produksi dan harta benda, melainkan kemiskinan juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang/kelompok orang menjadi miskin, dan keterbatasan akses kaum miskin pada keseluruhan proses kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka.

Pemerintah Daerah harus melindungi hak-hak dasar warga terutama kaum miskin dan memastikan adanya kebijakan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Inilah yang disebut sebagai perubahan paradigma penanggulangan kemiskinan dari berbasis proyek dan sektoral menjadi berbasis hak-hak dasar kaum Miskin. Paradigma penanggulangan kemiskinan yang berbasis hak-hak dasar warga sangat relevan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia saat ini. Melalui paradigma ini diharapkan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat terutama kaum Miskin.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui berbagai program kegiatan baik sektoral maupun lintas bidang pembangunan. Selain itu, percepatan penanggulangan kemiskinan juga perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergitas antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat yang mendasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap kebijakan pencapaian penurunan angka kemiskinan yang merupakan isu yang berlaku universal baik secara Global, Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/kota. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Pada Tingkat Nasional dalam RPJMN 2020-2024, Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020 – 2024

bahwa tingkat kemiskinan sendiri diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 % pada tahun 2024. Tingkat Provinsi, Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD 2021-2026 pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 4 - 3 %. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur target penurunan angka kemiskinan ditetapkan pada tahun 2026 menjadi sebesar 4,67 %.

Oleh karena itu, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menentukan prioritas pembangunan hingga berakhirnya periode RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan.